



Candi **BOROBUDUR**

DALAM DIMENSI HUKUM

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
Dakum, S.H.I., M.H.
Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H.

CANDI BOROBUDUR

DALAM DIMENSI HUKUM

ISBN: 978-623-7261-75-9

Hak Cipta 2022 pada Penulis

Hak penerbitan pada UNIMMA PRESS. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit UNIMMA PRESS.

Penulis:

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

Dakum, S.H.I., M.H.

Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H.

Editor:

Slamet Achmad Husein, S.E., M.M

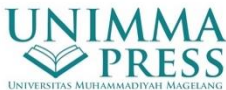
Suharso, S.H., M.H.

Lay out

UNIMMA Press

Desain sampul:

UNIMMA Press



Penerbit:

UNIMMA PRESS

Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang 56172

Telp. (0293) 326945

E-Mail: unimmapress@ummgl.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Cetakan I, _____ 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah* senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang meneladaninya. Buku Ajar ini merupakan salah satu buku yang lahir dari diskusi-diskusi ringan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Daerah. Selain itu, Buku ajar ini juga merupakan hasil pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kebijakan publik terhadap pariwisata Candi Borobudur.

Selain sebagai bahan perkuliahan mahasiswa di kelas, Buku Ajar ini bertujuan sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terhadap pentingnya penataan pariwisata di Magelang agar semakin meningkatkan kepuasan wisatawan. Dengan demikian, semakin tinggi kepuasan wisatawan yang tentunya diimbangi dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, akan semakin tinggi pula jumlah pengunjung wisata di Magelang dan semakin tinggi pula PAD yang diperoleh.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang yang telah memberikan dukungan dan masukan materi kajian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Magelang, 27 Oktober 2022

Dr. Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.Hum.
Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ivii
BAB 1 Sistem Kepariwisataaan	1
A. Tujuan Pembelajaran	Error! Bookmark not defined.
B. Jenis Sistem Kepariwisataaan	Error! Bookmark not defined.
C. Sistem Kepariwisataaan	2
D. Sektor Kepariwisataaan	4
E. Evaluasi	Error! Bookmark not defined.
BAB 2 Pengawasan Pemerintah terhadap Pelayanan Publik dalam Konteks Pariwisata ..	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Arti Penting Pengawasan Pemerintah	Error! Bookmark not defined.
C. Macam dan Bentuk Pengawasan	19
D. Evaluasi	34
BAB 3 Pariwisata di Negara Berkembang.....	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Deskripsi Pariwisata di Negara Berkembang.....	35
C. Alasan Negara Berkembang Merancang Kebijakan Pariwisata	36
D. Evaluasi	37
BAB 4 Peningkatan Daya Saing Pariwisata Nasional dan Daerah	38
A. Tujuan Pembelajaran	38
B. Dasar Hukum Peningkatan Daya Saing Pariwisata.....	38
C. Teori daya Saing Pariwisata.....	38
D. Pendekatan-pendekatan Daya Saing Pariwisata.....	40
E. Evaluasi	44
BAB 5 Pariwisata di Negara Berkembang.....	45
A. Tujuan Pembelajaran	45
B. Industri dan Ekonomi Pariwisata.....	45
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pariwisata	46
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pariwisata	49
E. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Nasional	50
F. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Daerah	57
G. Evaluasi	61
BAB 6 Pengembangan Kepariwisataaan Nasional.....	62
A. Tujuan Pembelajaran	62
B. Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan Nasional Secara Umum	62
C. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kepariwisataaan Nasional	66
D. Evaluasi	72

BAB 7 Optimalisasi Pariwisata Daerah.....	73
A. Tujuan Pembelajaran.....	73
B. Optimalisasi Pariwisata Daerah	73
C. Faktor Pendorong Perkembangan Pariwisata	79
D. Evaluasi	80
BAB 8 Kebijakan Pemerintah pada Wisata Candi Borobudur	81
A. Tujuan Pembelajaran.....	81
B. Kebijakan Pemerintah pada Wisata Candi borobudur	81
C. Pengembangan Kawasan Wisata Candi borobudur.....	83
D. Dasar Hukum Pengelolaan Wisata Candi Borobudur	86
E. Evaluasi	89
BAB 9 Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Candi borobudur.....	90
A. Tujuan Pembelajaran.....	90
B. Model Pemberdayaan Masyarakat.....	90
C. Evaluasi	95
BAB 10 Negara Kesejahteraan dalam Pengaturan Pariwisata di Indonesia.....	96
A. Tujuan Pembelajaran.....	96
B. Tujuan Negara Kesejahteraan	96
C. Sistem Negara Kesejahteraan	106
D. Evaluasi	117
BAB 11 Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pengembangan Candi Borobudur	118
A. Tujuan Pembelajaran.....	118
B. Pendahuluan	118
C. Partisipasi Masyarakat	123
D. Pengembangan Desa Wisata Candi borobudur	130
E. Evaluasi	140
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BIOGRAFI PENULIS	168

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Sistem Pariwisata Menurut Laiper	2
Bagan 1.2 Sistem Pariwisata Menurut Mill dan Morrison.....	3
Bagan 1.3 Sistem Pariwisata Menurut Poon	3
Bagan 1.4 Sistem Pariwisata Menurut Burns dan Holden	4
Bagan 1.5 Sektor Pariwisata dalam Tiga Pilar Utama	5
Bagan 2.1. Pengawasan Legislative Berdasarkan UUD 1945	28
Bagan 2.2. Pengawasan Legislative Berdasarkan UU No 27 Tahun 2009.....	28
Bagan 2.3. Pengawasan Legislative Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009.....	28
Bagan 2.4. Pengawasan Legislative Berdasarkan UU No 27 Tahun 2009.....	28
Bagan 4.1 Rekomendasi Kebijakan dan Program Pembangunan	41
Bagan 5.1 Peran Pariwisata dalam Mempengaruhi Hubungan Internasional	55
Bagan 6.1 Sasaran Pembangunan Pariwisata	71
Bagan 6.2 Pembangunan Industri Pariwisata	71
Bagan 6.3 Pembangunan SDM Pariwisata.....	72
Bagan 7.1 Faktor yang Mendorong Perkembangan Pariwisata Secara Progresif.....	79
Bagan 8.1 Isu Pengembangan Kawasan Wisata Candi Borobudur	84
Bagan 8.2 Hak Badan Pelaksana	88
Bagan 10.1 Sistem Negara Kesejahteraan	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan dan Motif Perjalanan Pariwisata.....	6
Tabel 2.1. Prinsip-Prinsip Pengawasan	14
Tabel 2.2. Tujuan Pengawasan Wisata Candi Borobudur.....	15
Tabel 2.3. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan	17
Tabel 2.4. Pengawasan terhadap Pemerintah.....	19
Tabel 2.5. Pengawasan Internal dan Eksternal	20
Tabel 2.6. Pengawasan Bersifat Preventif dan Represif.....	22
Tabel 2.7. Pengawasan Bersifat.....	22
Tabel 2.8. Tugas Ombusman	25
Tabel 2.9. Kewenangan Ombusman	26
Tabel 2.10. Alat-Alat yang di Gunakan dalam Pengawasan	29
Tabel 3.1 Kebijakan Pariwisata.....	36
Tabel 4.1 Konsep Pengembangan Wilayah Pariwisata.....	42
Tabel 5.1. Permintaan dalam Kepariwisataaan.....	46
Tabel 5.2. Faktor Permintaan dalam Industri Pariwisata	47
Tabel 5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pariwisata.....	49
Tabel 5.4. Tiga Kriteria Obyek Pariwisata Diminati Pengunjung.....	Error!
Bookmark not defined.0	
Tabel 5.5. Peranan Pariwisata.....	58
Table 6.1. Kebijakan Strategi Pemerintah untuk Pengembangan Pariwisata	67
Table. 6.2. Kegiatan Pengembangan Kepariwisataaan Nasional.....	68
Tabel 10.1. Istilah Kesejahteraan.....	99
Tabel 10.2. Tujuan Pokok Negara Kesejahteraan.....	103
Tabel 10.3. Peran Negara kesejahteraan	104
Tabel 10.3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia	111
Tabel 10.4. Pemerataan dalam Penyelenggaraan Kepariwisataaan.....	112
Tabel 11.1 Tujuan ASEAN	118
Tabel 11.2. Empat Pilar MEA	119
Tabel 11.3. 5 Karakter Negara Anggota ASEAN	119

BAB 1

Sistem Kepariwisataan

A. Tujuan pembelajaran

Pada bagian awal menjelaskan pengertian sistem kepariwisataan yang terdiri dari menurut jenis sistem pariwisata dan pendapat ahli tentang sistem pariwisata serta sektor pariwisata secara umum. Sehingga, mahasiswa mampu memahami sistem kepariwisataan untuk pengetahuan membaca materi selanjutnya.

B. Jenis Sistem Kepariwisataan

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti terdapat analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan. Hal ini tidak terlepas dari subsistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, isu lingkungan, ekologi, dan lain-lain antara satu sama lain saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). (Abdul Rachman, dkk. 2001)

Sebagai sebuah sistem, antarkomponen dalam sebuah sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, yang berarti bahwa perubahan dalam salah satu subsistem akan menyebabkan terjadinya perubahan pada subsistem yang lain, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. (Admosudirdjo, P. 1982) Menurut Mill and Morrison, pariwisata merupakan sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba: *"like a spider's web-touch one part of it and reverberations will be felt throughout"*.

Fannel menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu sistem yang dapat dipandang sebagai: *... the interrelated system that includes tourists and the associated services that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accommodation) to aid in their movement"*

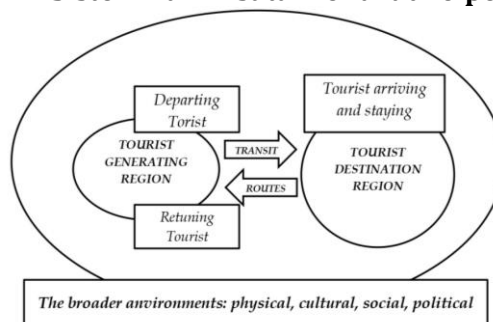
Perspektif teori dependensi atau teori konflik sistem pariwisata merambah sampai internasional melalui korporasi internasional (airline, usaha BPW, dan rantai hotel), pemerintah, dan lembaga nonpemerintah (PATA, IATA, dan IUOTO). Struktur seperti ini merupakan pengulangan dari struktur industri yang mengandalkan penanaman modal asing di Dunia Ketiga, melalui MNCS (*Multi National Corporations*), yang pada akhirnya akan menghasilkan hubungan dominant-dependent dalam teori dependensi.

Sementara itu, dari perspektif teori konsensus (struktural fungsional), sistem pariwisata dunia merupakan suatu bentuk hubungan yang saling terkait, sehingga terjadi distribusi pendapatan dan peningkatan hubungan antarbangsa. (Agus Sulastiyono. 2011) Meskipun sama-sama memandang pariwisata sebagai suatu sistem yang besar, ada perbedaan di antara para ahli mengenai elemen-elemen utama, yaitu: daerah asal (*origin*), daerah tujuan (*destination*), dan daerah antara (*routes perjalanan*).

C. Sistem Pariwisata

Secara sederhana, deskripsi sistem pariwisata menurut Leiper seperti terlihat pada deksripsi dibawah ini ;

Bagan 1.1 Sistem Pariwisata menurut Leiper



Sistem pariwisata secara sederhana juga digambarkan oleh Mathieson dan Wall, yang melihat bahwa sistem pariwisata terdiri atas tiga elemen, yaitu pertama elemen dinamis berupa perjalanan wisatawan; kedua, elemen statis yaitu keberadaan di destinasi; dan ketiga elemen, konsekuensial yaitu berbagai dampak yang timbul. Selanjutnya, menurut Mill dan Morrison, sistem pariwisata terdiri dari empat

komponen utama yaitu: market (*reaching the marketplace*), travel (*the purchase of travel products*), destination (*the shape of travel demand*), dan marketing (*the selling of travel*). (Alexander Abe. 2005)

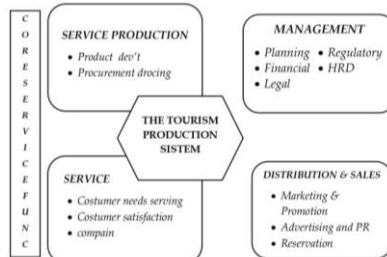
Keempat komponen yang saling terkait ini dideskripsikan seperti terlihat pada deksripsi di bawah ini :

Bagan 1.2 Sistem Pariwisata menurut Mill dan Morrison



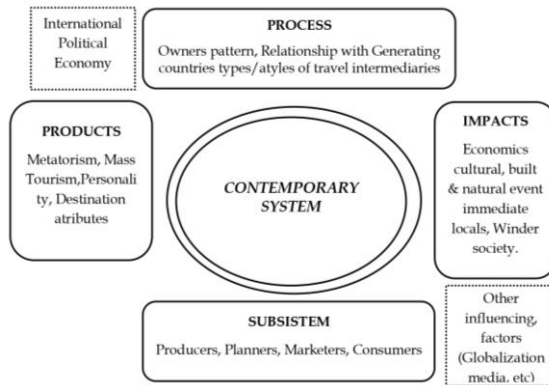
Poon melihat sistem pariwisata dengan perspektif yang berbeda pula, yang lebih menekankan pada aspek pemasaran pariwisata. (Amalia Diamantina. 2010) Menurutnya sistem pariwisata terdiri atas subsistem produksi, subsistem deliveri, subsistem manajemen, dan subsistem distribusi dan penjualan, yang terlihat pada deskripsi di bawah ini:

Bagan 1.3 Sistem Pariwisata menurut Poon



Model sistem pariwisata yang lebih komprehensif, dengan melihat proses dan dampak dari pariwisata, tetapi dengan penekanan pada daerah tujuan wisata dikembangkan oleh Burns dan Holden, seperti pada deksripsi di bawah ini:

Bagan 1.4 Sistem Pariwisata menurut Burns dan Holden

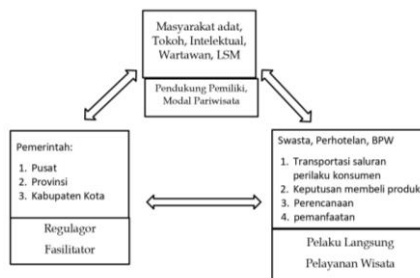


Pada sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut yakni insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor.

D. Sektor Pariwisata

Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. (Amran Hmzah. 2012) Masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. (Anggraeni, R. 2018) yang dimaksud dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta terdiri dari asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha. Sedangkan dalam kelompok pemerintah mencakup berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya dideskripsikan pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.5 Sektor Pariwisata dalam Tiga Pilar Utama



Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensi dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi atau pelancongan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. (Asshiddiqie, dkk. 2003)

Menurut *United Nation World Tourism Organization*, pariwisata adalah meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa selama waktu yang tidak lebih dari satu tahun secara berulang-ulang guna rekreasi, kegiatan bisnis, dan tujuan lainnya. (B. Biwoho, dkk. 2010) Istilah pariwisata pertama kali diperkenalkan oleh dua budayawan pada sekitar tahun 1960 yaitu Moh. Yamin dan Prijono. Kedua budayawan ini memberikan masukan kepada pemerintah saat itu untuk mengganti istilah *tour* agar sesuai dengan bahasa khas Nusantara.

1. Kata “wis” (*man*) memiliki arti rumah, properti, kampung, komunitas pergi, terus-menerus, dan mengembara; dan
2. Kata “ata” memiliki arti bila diartikan secara keseluruhan, pariwisata adalah pergi secara lengkap, meninggalkan rumah (kampung) untuk berkeliling secara terus-menerus.

Menurut Spillane, pariwisata dikelompokkan berdasarkan tujuan dan motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata, di antaranya:

Tabel 1.1. Tujuan dan Motif Perjalanan Pariwisata

(1)	Pariwisata untuk menikmati perjalanan (<i>pleasure tourism</i>)	Merupakan jenis pariwisata yang memiliki tujuan untuk mengetahui suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya dalam mengisi liburan guna memperoleh udara segar atau untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari.
(2)	Pariwisata untuk	Adalah jenis pariwisata yang dilakukan sedang berlibur untuk memulihkan kesegaran jasmani

	rekreasi (<i>recreation tourism</i>)	maupun rohani.
(3)	Pariwisata untuk kebudayaan (<i>cultural tourism</i>)	Adalah jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang berlibur untuk mengetahui adat-istiadat, sejarah, seni budaya, agama maupun gaya dan cara hidup suatu bangsa.
(4)	Pariwisata untuk olahraga (<i>sports tourism</i>)	Merupakan pariwisata yang dilakukan dalam rangka untuk melatih ketangkasan jasmani dan menyegarkan rohani. Jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori: a. <i>Big sports event</i> , yaitu pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa olahraga besar seperti <i>Olympiade Games</i> , <i>World Cup</i> , dan lain-lain. b. <i>Sports tourism of the practitioner</i> , yaitu pariwisata olahraga bagi yang ingin berlatih dan mempraktikkannya sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga basket, sepak bola, dan lain-lain.
(5)	Pariwisata untuk urusan usaha dagang (<i>business tourism</i>)	Merupakan jenis pariwisata yang dilakukan karena adanya pekerjaan yang harus dilakukan di suatu daerah atau suatu negara.
(6)	Pariwisata untuk berkonvensi (<i>convention tourism</i>)	Merupakan pariwisata dalam rangka mengikuti suatu acara atau kegiatan seperti seminar, pameran, konferensi, dan lain sebagainya yang diselingi dengan kegiatan wisata di waktu senggangnya.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai

negara yang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah.

E. Evaluasi

1. Deskripsikanlah pengertian pariwisata secara umum!
2. Sebutkan beberapa teori sistem kepariwisataan!
3. Uraikan bagaimana sistem pariwisata menurut beberapa pendapat tokoh!
4. Jelaskan sektor pariwisata dalam tiga pilar utama!

BAB 2

Pengawasan Pemerintah terhadap Pelayanan Publik dalam Konteks Pariwisata

A. Tujuan pembelajaran

Pada bagian kedua menjelaskan pengawasan pemerintah terhadap pelayanan publik dalam konteks pariwisata terdiri dari arti pengawasan pemerintah, macam dan bentuk pengawasan pemerintah, sifat pengawasan (internal, eksternal, preventif, represif), pengawasan oleh ombudsman, dan pengawasan oleh legislative. Sehingga, mahasiswa memahami peran pemerintah secara komprehensif.

B. Arti Pengawasan Pemerintah

Transformasi guna meraih perbaikan kualitas wisata perlu dilakukan pengawasan (*control*), terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian, akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi. (Bagir Manan. 2011)

Istilah pengawasan, pengendalian, dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Pengawasan dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. (Bahagijo, Sugeng. 2016)

Upaya memperbaiki pelayanan publik di dalam sistem negara Indonesia, sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut agar lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka pemerintah mengeluarkan pedoman tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. (Baskoro, dkk. 2008)

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Sedangkan pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya. Pada pengertian pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada di luarnya. (Bohari. 2012)

Pengendalian adalah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolok ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yakni rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.

Berangkat dari definisi pengawasan dan pengendalian tersebut, dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dari pengawasan yakni pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan. Sedangkan pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai. Eratnya pengertian pengendalian dengan pengawasan tersebut yang kedua-duanya tercakup dalam pengertian *controlling*, dalam administrasi pembangunan di Indonesia lahir lah sistem *wasdal* (pengawasan dan pengendalian). (Breman Jan, dkk. 2014)

Pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan di sini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control*, *internal control*, dan *self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. (Budiarjo, dkk. 2008)

Djaenuri berpendapat bahwa: “pengawasan yang dilakukan oleh siapapun, baik pejabat pengawas maupun masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan rencana”. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan hasil pembangunan menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk menilai suatu keluaran pembangunan dan dapat dianggap telah memenuhi kebutuhan yang telah dirasakan. (Dadang Juliantara. 2010)

Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Peraturan-peraturan sangat diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat terwujud. (Dadang Juliantara. 2011)

Berdasar paham negara demokratis, rakyat merupakan unsur yang paling berdaulat dan paling berkuasa, dibandingkan dengan struktur kekuasaan lain yang ada. Pada susunan negara yang demokratis, pada dasarnya rakyat merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi atas negara. Berdaulat di sini bukan berarti segala keputusan harus diambil oleh rakyat, tetapi yang dituntut oleh rakyat adalah pemerintahan tetap di bawah kontrol rakyat atau masyarakat. Dengan demikian, rakyat dengan kedaulatannya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah. Kontrol dari rakyat ini bisa disebut juga sebagai kontrol sosial atau *social control*. (Direktorat Jendral Pariwisata. 2016)

Kontrol sosial merupakan kontrol konsumen atau pelanggan terhadap produser atau penjual. Kontrol sosial juga dapat dilakukan oleh siapapun yang berkepentingan terhadap suatu organisasi atau kelompok masyarakat, baik internal control, *built-in, self control*, maupun *external control*. Untuk itu, rakyat sebagai konsumen dalam hal ini berkedudukan atau bersikap sebagai konsumen, penanggung dampak, dan pembayar resiko terhadap produk-produk pemerintah. Dengan demikian, rakyat sebagai konsumen dari produk pemerintahan dalam hal ini juga memiliki sifat konsumeristik yaitu suatu hak untuk melakukan kontrol terhadap produk-produk pemerintahan dan pembangunan disinilah letaknya keberadaan kontrol sosial.

Adanya hak konsumeristik, lebih lanjut masyarakat berhak untuk meminta kompensasi, bahkan ganti rugi terhadap pelayanan yang diterimanya jika ternyata merugikan atau bahkan membahayakan. Kontrol sosial dapat diwujudkan ke dalam bentuk pendisiplinan, pelatihan, dan pengawasan dapat diadaptasikan ke dalam berbagai situasi dari organisasi atau masyarakat.

Rakyat merupakan sumber dari kekuasaan politik, sehingga rakyat dapat sewaktu- waktu mengganti pemerintahan yang dipandang sudah tidak lagi mampu melaksanakan tugas-tugas yang melekat padanya. Walaupun sifat kekuasaan adalah begitu besarnya kekuasaan, tetapi ia dapat dikontrol dan kekuasaan dibuat bertanggungjawab kepada rakyat.

Rakyat mempunyai peluang besar untuk mengontrol pemerintahan. Sehubungan dengan kedudukan rakyat dalam sistem politik yang demokratis, sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. (Eddy Kiswanto. 2015) Dengan demikian, rakyat diasumsikan paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat daripada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem yang otoriter.

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat adalah sejajar dengan hubungan antara produsen dan konsumen. Hal tersebut karena kesejajaran inilah rakyat memiliki kedudukan untuk mengontrol pemerintah. Dengan demikian, rakyat sebagai konsumen dari produk pemerintahan, dalam hal ini juga memiliki hak konsumeristik yaitu suatu hak untuk melakukan kontrol terhadap produk-produk pemerintahan dan pembangunan.

Kontrol sosial pada akhirnya akan menghasilkan *feedback*, baik positif maupun negatif. *Feedback* positif tidak akan mengganggu proses berikutnya, tetapi untuk *feedback* negatif adalah juga sangat penting. Apabila *feedback* negatif ini tidak ditanggapi secara benar dan sungguh-sungguh, maka akan dapat membahayakan kelangsungan proses produksi atau proses pelayanan. (Djohan, Djohermansyah. 2010)

Feedback itu sendiri merupakan hasil dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pemakai produk (pelayanan publik) dalam hal ini rakyat atau masyarakat. *Feedback* negatif harus direspon sedemikian rupa sehingga mampu diketahui berbagai kebutuhan konsumen dengan berbagai macam kelebihan maupun kekurangannya. *Feedback* juga sangat penting peranannya bagi perbaikan berbagai kekurangan dalam suatu proses produksi. Tanpa *feedback* negatif maka produser (pemerintah) tidak akan mengetahui kekurangan yang ada dalam proses produksi, dalam hal ini adalah proses pelayanan publik di dalam kinerja pemerintahan.

Feedback dapat terjadi langsung maupun tidak langsung. *Feedback* langsung terjadi jika *feedback* langsung disampaikan kepada unit kerja

pemegang tanggungjawab, sedang yang tak langsung dapat melalui berbagai saluran seperti media masa dan sebagainya. Pemerintah dalam menanggapi berbagai koreksi, evaluasi, keluhan atau pengawasan yang dilakukan masyarakat dituntut untuk akomodatif, artinya pemerintah harus merespon secara positif berbagai masukan tersebut.

Kemampuan pemerintah merespon berbagai pengawasan (kontrol) dari masyarakat akan sangat menentukan keadaan pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya di sini adalah apabila pemerintah mampu mengakomodasi berbagai tuntutan dari masyarakat berarti tidak akan menimbulkan masalah baru, akan tetapi apabila pemerintah tidak mampu merespon dan mengakomodasi berbagai tuntutan tersebut, akan menimbulkan perasaan kecewa dan resah dalam masyarakat. Pada situasi tertentu karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan yang ada, hal ini dapat membuat masyarakat merasa tidak puas dan merasa resah atau gelisah. (Edwin, G. 2015)

Menurut Blumer dalam Harper bahwa perilaku lain yang muncul, dapat muncul sebagai ungkapan perasaan tidak puas, kegelisahan, dan kekecewaan terhadap suatu kondisi juga dapat menimbulkan terjadinya tindakan atau gerakan sosial atau pula *social movement*. Gerakan sosial merupakan salah satu tipe dari tindakan kelompok atau *collective behaviour* yaitu sebagai tindakan yang relatif spontan dan tidak kekal dan merupakan tindakan-tindakan yang kontras dengan hal-hal yang relatif rutin dari interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, perilaku masyarakat pun bisa berubah sehingga menimbulkan sikap dan perilaku lain. "Perilaku masyarakat dapat berubah dan perilaku lainpun terbentuk, sikap maupun perilaku yang dimaksud adalah bisik-bisik, rumor, gosip, isu, apatis, diam atau *masabodo*, berlambat-lambat, menyampaikan tanggapan, keluhan, saran atau tuntutan pemenuhan janji, perbaikan dan pertanggungjawaban, unjuk rasa atau protes, boikot, sikap menentang atau pernyataan "tidak", oposisi dan perlawanan terbuka, perilaku marjinal, merusak, dan nihilistik". (Elviandri, dkk. 2019)

Dengan demikian dampak atas rasa tidak puas terhadap berbagai situasi, dapat menimbulkan berbagai keadaan yang tidak kondusif bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu sebaiknya dibuka ruang (*sphere*) bagi masyarakat untuk memberikan kontrol terhadap berbagai kinerja pemerintah. Selain dari

pada itu, pemerintah juga harus dapat merespon berbagai kontrol yang dilakukan oleh masyarakat dan menganggapnya sebagai feedback atas berbagai pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Kontrol dari rakyat juga berpeluang bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan walaupun rakyat dalam hal ini telah memiliki lembaga legislatif sebagai wakilnya, tetapi kontrol atau pengawasan dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat termasuk individu.

Kesulitan bagi terlaksananya kontrol sosial ini, adalah karena aparatur negara kita tidak terbiasa menerima kritik, tidak mau dikritik dan tidak bersedia mendengar kritik. Dengan demikian, kontrol sosial menjadi suatu kegiatan yang sulit dilakukan. Aparatur pemerintah juga sering menganggap sepi kritikan dari masyarakat. Masyarakat pun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, menjadi enggan untuk melakukan kontrol, karena merasa tidak pernah digubris atau tidak diresponnya berbagai masukan. Akibatnya para aparatur cenderung berbuat semauanya, menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah adalah sejajar dengan hubungan antara produser dan konsumen, maka tolok ukur yang dipakai juga adalah tolok ukur konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai penerima, pembeli, atau penerima dampak dari produser. (F, Marbun, dkk. 2009)

Prinsip dasar dalam pengawasan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Prinsip-Prinsip Pengawasan	
(1)	Prinsip Tercapainya Tujuan (<i>Principle of assurance of objective</i>). Pengawasan harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau devisiasi perencanaan.
(2)	Prinsip Efisiensi Pengawasan (<i>Principle of efficiency of control</i>). Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari devisiasi-devisiasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan.
(3)	Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (<i>Principle of control responbility</i>). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
(4)	Prinsip Pengawasan Masa Depan (<i>Principle of future control</i>) Pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
(5)	Prinsip Pengawasan Langsung (<i>Principle of direct control</i>).

	Tekhnik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.
(6)	Prinsip Refleksi Perencanaan (<i>Principle of reflection of plan</i>). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan
(7)	Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (<i>Principle of organizational suitabillity</i>). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.
(8)	Asas Wewenang Individual (<i>Principle of individuality of control</i>). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer Teknik kontrol harus ditunjukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.
(9)	Prinsip Standar (<i>Principle of standar</i>). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
(10)	Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (<i>Principle of strategic control</i>). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
(11)	Prinsip Kekecualian (<i>The expection Principle</i>). Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
(12)	Prinsip Pengawasan Fleksible (<i>Principle of flexibility of control</i>). Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
(13)	Prinsip Peninjauan Kembali (<i>Principle of review</i>). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
(14)	Prinsip Tindakan (<i>Principle of action</i>). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing, dan directing.

Adapun tujuan pengawasan yaitu:

Tabel : 2.2. Tujuan Pengawasan Wisata Candi Borobudur

Tujuan Pengawasan Wisata Candi Borobudur		
(1)	Mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan	Artinya bahwa pengawasan yang baik dan tepat adalah pengawasan yang mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Agar dapat mencegah hal tersebut, perlu dilakukan <i>controlling</i> secara rutin dan tegas. Maksud dari tegas disini adalah pemberian sanksi yang seharusnya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Adanya cara tersebut diharapkan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi akan selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang dijalankannya.
(2)	Mempertinggi rasa tanggungjawab	Adanya proses <i>controlling</i> yang dilakukan secara rutin akan mengakibatkan setiap orang yang ada di dalam organisasi akan selalu bertanggungjawab terhadap semua tugas yang dikerjakannya. Sehingga tidak akan terjadi tindakan yang saling menyalahkan dalam melaksanakan tugas. Untuk dapat meningkatkan rasa tanggungjawab dapat dilakukan dengan cara membuat laporan secara tertulis tentang penyimpangan yang terjadi, jika memang penyimpangan tersebut tidak bisa dihindarkan. Agar sistem laporan tersebut bisa berjalan lancar, dituntut berbagai syarat tertentu, misalnya seperti kedisiplinan dalam pelaporan, kemampuan menilai kebenaran laporan, dan lain sebagainya.
(3)	Menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis	Dengan adanya pengawasan, diharapkan seawal mungkin bisa dicegah terjadinya berbagai penyimpangan. Sehingga semua bagian yang ada di dalam organisasi akan selalu siap dan selalu berusaha supaya tidak terjadi kesalahan pada bagiannya. Dengan kata lain, semua bagian akan selalu dalam kondisi yang dinamis tapi tetap terarah dengan sistem manajemen yang baik, sehingga tujuan dari organisasi akan bisa tercapai.
(4)	Memperbaiki berbagai	Artinya dengan adanya pengawasan harus dapat diaplikasikan berbagai cara tindakan

kesalahan dan juga penyimpangan yang terjadi	perbaikan terhadap penyimpangan dan kesalahan yang terjadi. Hal tersebut dengan maksud agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlarut-larut, yang dapat berakibat pada penurunan profit organisasi atau bahkan bisa menimbulkan kerugian.
--	--

Tahap-tahap dalam proses pengawasan terdiri paling sedikit lima tahap yaitu:

Tabel 2.3. Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Tahap-Tahap Proses Pengawasan		
(1)	Penetapan standar pelaksanaan	Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Tiga bentuk standar yang umum antara lain: - Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produksi. - Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. - Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu pekerjaan harus diselesaikan. Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan. Standar-standar yang tidak dapat dihitung juga memainkan peranan

	penting dalam proses pengawasan. Memang, pengawasan dengan standar kualitatif lebih sulit dicapai, tetapi hal ini tetap penting untuk mencoba mengawasinya. Sebagai contoh standar kesehatan personalia, promosi karyawan yang terbaik, sikap kerjasama, dan berpakaian yang pantas dalam bekerja.
(2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan yakni menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berapa kali (<i>how often</i>) pelaksana seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan? Dalam bentuk apa (<i>what form</i>) pengukuran akan dilakukan-laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone? Siapa (<i>who</i>) yang akan terlibat-manajer, staf departemen? Pengukuran tersebut sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.
(3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan	Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: a) Pengamatan (<i>observasi</i>) ; b) Laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis; c) Metode-metode otomatis; dan d) Inspeksi dan pengujian (<i>test</i>), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern (<i>in-ternal auditor</i>) sebagai pelaksana pengukuran.
(4) Perbandingan Pelaksanaan dengan standart evaluasi	Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (<i>deviasi</i>).

	Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk menidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.
(5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Ada beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi : - Mengubah standar mula-mula, barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. - Mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. - Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

C. Macam dan bentuk pengawasan Pemerintah

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum. Dari segi manajemen, Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi pemerintahan berjalan dengan baik dan terjamin penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, pengawasan dapat memperkecil hambatan yang terjadi dan segera melakukan perbaikan.

Dilihat dari segi hukum administrasi, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap atau tindak badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.

1) Pengawasan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4. Pengawasan terhadap Pemerintah

Pengawasan terhadap Pemerintah		
(1)	Pengawasan dari segi kedudukan	badan/organ yang melakukan pengawasan dibedakan pengawasan bersifat internal dan pengawasan bersifat eksternal.
(2)	Pengawasan dari segi waktu	saat dilaksanakan pengawasan dibedakan; pengawasan bersifat <i>preventif/a-priori</i> dan pengawasan bersifat <i>represif/ a posteriori</i> .
(3)	Pengawasan dari segi sifat	dibedakan pengawasan bersifat <i>rechtmatigheid</i> dan pengawasan bersifat <i>doelmatigheid</i> .

2) Pengawasan Bersifat Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau struktural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri. (Firman Freaddy Busroh. 2016) Berdasar Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 pengawasan internal terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pengawasan Internal dan Eksternal

(1)	Internal	Pengawasan atasan langsung baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah	Pengawasan atasan langsung lazim disebut Pengawasan Melekat atau <i>built in control</i> . Pengawasan ini menyatu dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi yang dapat dilaksanakan langsung oleh atasan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di bawahnya. Pedoman Pengawasan Melekat diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan
------------	-----------------	--	---

		atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Internal	Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan	Menurut Pasal 4 ayat (4) Inpres No. 15 Tahun 1983, pengawasan fungsional dilakukan oleh: a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasar Keppres No. 31 Tahun 1983 BPKP berfungsi melakukan audit pemeriksaan. Namun Keppres No. 31 Tahun 1983 ini telah dicabut dengan Keppres No. 42 Tahun 2001. Kemudian dengan Keppres No. 103 Tahun 2001 (Pasal 53) disebutkan BPKP tidak lagi mempunyai kewenangan melakukan audit. b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintahan non Departemen/Instansi Pemerintah lainnya. c. Inspektorat Wilayah Propinsi.
(3)	Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadia	Pengawasan bersifat ekstern adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktural kedudukannya berada di luar pemerintah (<i>eksekutif</i>), misalnya, pengawasan dalam

		bidang keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (Bepeka). Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui <i>mass-media</i> (pers atau Tv). Pengawasan politis (<i>political control</i>) oleh partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat berupa hearing.
(4)	Eksternal	Pengawasan masyarakat
		pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3) Pengawasan Bersifat *Preventif* dan *Represif*

Tabel 2.6. Pengawasan Bersifat *Preventif* dan *Represif*

Pengawasan Bersifat <i>Preventif</i> dan <i>Represif</i>		
(1)	Pengawasan bersifat preventif atau kontrol apriori	Pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan. Misalnya, peraturan daerah tingkat II harus memperoleh persetujuan atau pengesahan lebih dahulu dari pemerintah daerah tingkat I.
(2)	Pengawasan bersifat represif atau kontrol aposteriori	Pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan/perbuatan pemerintah. Pengawasan demikian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi terhadap suatu tindakan yang keliru dan sekaligus memulihkannya, misalnya koreksi oleh badan peradilan (<i>judicial control</i>) terhadap perbuatan Pemerintah yang keliru. Tugas ini dilakukan pengadilan sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan

4) Pengawas bersifat *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*

Tabel 2.7. Pengawasan Bersifat *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*

(1)	Pengawasan bersifat <i>rechtmatigheid</i> atau segi legalitas	Pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji segi hukum (<i>rechtmatigheid stoetsing</i>) suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum ataukah tidak. Pengujian demikian ini dilakukan oleh hakim melalui pengadilan. Tugas ini dilakukan pengadilan sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum (<i>law pro tectio</i>) terhadap rakyat.
(2)	Pengawasan bersifat <i>doelmatigheid</i> atau Kemanfaatan	Pengawasan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada segi kemanfaatan (<i>opportunitas</i>).

5) Pengawasan oleh Ombudsman

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (UMD), badan hukum milik negara, dan badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapata daerah (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan serta penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Guna merealisasikan maksud tersebut diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal (Ombudsman) yang

secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi objektivitas maupun akuntabilitasnya. Kondisi tersebut, pada tahun 2000 presiden menetapkan suatu kebijakan berupa upaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman ini bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan (Penjelasan Umum UU Nomor 37 Tahun 2008).

Upaya agar lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, wewenang Komisi Ombudsman Nasional, dibentuklah UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayanan publik, sebelum adanya UU Ombudsman ini, dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan, yang memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Tujuan dibentuknya Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008). Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mendasarkan pada asas kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan (Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 2008). Adapun fungsi, tugas, dan wewenang

Ombudsman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008.

Pada Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, dan badan swasta atau perorang yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pada Pasal 7 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman bertugas:

Tabel 2.8. Tugas Ombudsman

Tugas Ombudsman	
(1)	Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)	Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
(3)	Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.
(4)	Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
(5)	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
(6)	Membangun jaringan kerja.
(7)	Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
(8)	Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Salah satu tugas Ombudsman adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi dimaksud adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang

perorangan (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008). Selanjutnya, laporan dimaksud adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 37 Tahun 2008).

Ombudsman dalam melaksanakan tugas memeriksa laporan wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, tidak memungut biaya, wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak, dan mempermudah pelapor. (Frinces, Z.H. 2017)

Selanjutnya, Wewenang Ombudsman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang:

Tabel 2.9. Kewenangan Ombudsman

Kewenangan Ombudsman	
(1)	Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
(2)	Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau pun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.
(3)	Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.
(4)	Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan
(5)	Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
(6)	Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi atau membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
(7)	Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Tugas Ombudsman dalam melaksanakan wewenangya dalam memeriksa laporan tidak hanya yang bersifat memaksa (misalnya pemanggilan), namun dituntut pula untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak. Hal tersebut agar penyelenggara negara mempunyai kesadaran sendiri dan dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan persuasif berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi. Hal inilah yang membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi.

Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterimanya, dapat dilakukan dengan cara memanggil terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (*subpoena power*).

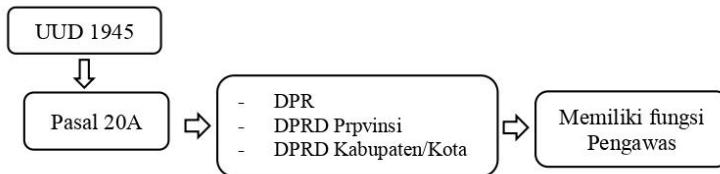
Selanjutnya, Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan, atau dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden yang dapat dijadikan bahan bagi DPR atau presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di daerah, jika dipandang perlu Ombudsman dapat mendirikan perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan (Pasal 43 UU Nomor 37 Tahun 2008). Namun, sejak diberlakukannya UU Nomor 37 Tahun 2008 hingga kini sudah 2 tahun 8 bulan (saat ditulis buku ini) belum dibentuk perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penanganan pengaduan atas pelanggaran maladministrasi pada bidang pelayanan publik di daerah tidak efektif.

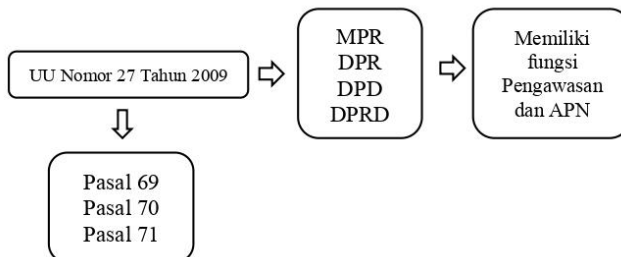
6) Pengawasan oleh Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah. Pengawasan legislatif disebut dengan istilah pengawasan representatif. Lembaga perwakilan rakyat dimaksud adalah:

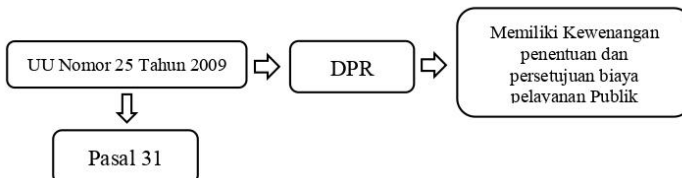
Bagan 2.1. Pengawasan Legislatif Berdasarkan UUD 1945



Bagan 2.2. Pengawasan Legislatif Berdasarkan UU No 27 Tahun 2009



Bagan 2.3. Pengawasan Legislatif Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009



Bagan 2.4. Pengawasan Legislatif Berdasarkan UU No 27 Tahun 2009



Tujuan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh legislatif adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparat pemerintah (unit satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah) berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana (trategis) dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik jika hanya bergantung kepada laporan saja. Pimpinan yang bijaksana akan menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan. (Gamal Suwanto. 2014)

Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan pada Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB). Pada saat menjalankan teknik pengawasan, tentunya diperlukan alat bantu untuk mensukseskan suatu kegiatan. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal dan paling umum digunakan adalah:

Tabel 2.10. Alat-Alat yang Digunakan dalam Pengawasan

Alat-Alat yang Digunakan dalam Pengawasan		
(1)	Manajemen Pengecualian (<i>Management by Exception</i>)	Teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapat perhatian dari wirausahawan. Manajemen pengecualian didasarkan pada prinsip pengecualian, prinsip manajemen yang muncul paling awal pada literature manajemen. Prinsip pengecualian menyatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional, sementara wirausahawan menangani persoalan organisasional non rutin atau di luar kebiasaan.
(2)	<i>Management Information System</i> (MIS)	Suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen, informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Konsep MIS dirancang melalui beberapa tahap utama antara lain: - Tahap survei pendahuluan dan perumusan masalah; - Tahap desain konseptual; - Tahap desain terperinci; dan - Tahap implementasi akhir. Kriteria agar MIS berjalan efektif, yaitu: - Mengikutsertakan pemakai dalam tim perancangan; - Mempertimbangkan secara hati-

	hati biaya sistem; - Memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi; - Adanya pengujian pendahuluan; dan - Menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem.
(3) Analisis Rasio	Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca rugi-laba organisasi.
(4) Penganggaran	Anggaran dalam TWCB adalah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Disamping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat pengawasan. Anggaran adalah bagian fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. Pengawasan anggaran atau <i>Budgetary Control</i> merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan membandingkan

Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana, petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lainnya yang juga berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif. Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan.

Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Sebaik apapun sistem dan program serta sebesar apapun dana yang tersedia, semua akan sia-sia jika tak diawasi oleh pemerintah daerah. (H. Kodhyat. 2016)

Sistem pengawasan yang efektif, seharusnya mendukung strategis dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan, tidak haanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. (Gamal Suwantoro. 2017)

Sistem tersebut harus dapat menunjukan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera sehingga terhindar hal-hal yang tidak diharapkan. Jika perlu dengan cara-cara pengecualian.

Sistem pengawasan yang efektif memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya informasi yang mudah dimengerti dan padat. Sistem pengawasan harus dapat

mengakomodasi situasi yang unik atau yang berubah-ubah. Sistem pengawasan harus pula dapat mengakomodasikan kapasitas seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri. Pada pengawasan yang terpenting adalah harus ada rasa saling percaya, komunikasi, dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan.

Koordinasi mutlak diperlukan sehingga harus ada kerelaan para pengawas duduk bersama untuk menyinkronkan dan membangun sistem pengawasan yang efektif. Untuk membangun sistem pengawasan yang efektif tidak diperlukan lembaga baru, cukuplah dengan pengawas yang sudah ada dimaksimalkan.

Perlu disadari, pengawasan daerah pada TWCB bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan tersebut di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Jadi, pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi sejak awal dalam tahap perencanaan.

Domain pengawasan tidak hanya terbatas pada masalah keuangan tetapi juga proyek atau pembangunannya. Jadi, baik keuangannya maupun pelaksanaan pembangunannya harus terealisasi sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Satu pekerjaan bisa dua atau tiga institusi yang mengawasinya.

Pengawasan diri tercipta jika rancang bangun kerjanya jelas dan pemilihan orang yang mampu bagi pekerjaannya dilakukan dengan baik. Sistem pengawasan harus menitik-beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan. Jika terdapat sanksi dan peringatan paling tidak hal tersebut diminumkan. Jika ada sanksi haruslah dilaksanakan dengan hati-hati dan manusiawi. Sistem pengawasan harus jujur dan objektif artinya tidak memihak, dan satu-satunya tujuan adalah peningkatan kerja.

Pada saat melakukan pengawasan, pengawas dituntut untuk mempelajari organisasi atau institusi yang akan diawasi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, bagi pengawas diperlukan metode pengawasan yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berbagai

metode pengawasan, yaitu pengawasan pengarah, pengawasan penapisan (*screening*) atau *yes-no-control*, dan pengawasan pasca kegiatan.

Pengawasan pengarah ditujukan terhadap masukan dan proses pengawasan penapisan di lakukan terhadap proses dan pengawasan pascakegiatan dilakukan terhadap hasil. Pada suatu organisasi biasanya dilaksanakan pengawasan kombinasi ketiganya. Secara garis besar, metode pengawasan dapat dibagi menjadi dua yaitu metode kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan.

D. Evaluasi

1. Jelaskan arti penting pengawasan yang dilakukan pemerintah!
2. Uraikanlah pengertian pengawasan bersifat internal dan eksternal!
3. Jelaskan pengertian pengawasan bersifat preventif dan represif!
4. Uraikan proses pengawasan oleh Ombudsman!
5. Uraikanlah proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif!

BAB 3

Pariwisata di Negara Berkembang

A. Tujuan Pelaksanaan

Pada bagian ketiga menjelaskan pariwisata di negara berkembang, terdiri dari Deskripsi pariwisata di negara berkembang dan alasan negara berkembang merancang kebijakan pariwisata. Sehingga, mahasiswa mampu memahami arah kebijakan negara dalam memprioritaskan pariwisata agar segala sumber daya yang digunakan dan dialokasikan dapat seefisien mungkin dan mampu memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian negara berkembang.

B. Deskripsi Pariwisata di Negara Berkembang

Sektor pariwisata memang sektor yang potensial karena sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan berhasil mendorong kemajuan daerah-daerah yang dulu tandus dan kurang berkembang karena tidak punya sumberdaya alam. Banyak negara di dunia sekarang ini yang menganggap pariwisata sebagai sebuah aspek penting dan integral dari strategi pengembangan negara. Setiap literatur pariwisata memberikan ulasan bahwa sektor pariwisata memberikan keuntungan ekonomi terhadap negara yang bersangkutan. (Hadiwijoyo, S.S. 2012) Keuntungannya diperoleh dari pendapatan nilai tukar mata uang asing, pendapatan pemerintah, stimulus pengembangan regional, penciptaan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan. (Hadiwijoyo, S.S. 2012)

Namun demikian, banyak aspek dari pariwisata yang lebih dari sekadar aktivitas ekonomi. Pada kegiatan pariwisata terjadi interaksi yang begitu besar dalam masyarakat, ada ketergantungan pelayanan dalam skala luas, fasilitas, maupun masukan-masukan yang mendorong kesempatan dan tantangan pada negara yang bersangkutan. (Hamidi, Jazim dkk. 2009)

Pada kegiatan pariwisata, tidak ada dua negara atau lebih ataupun dua area atau lebih dalam suatu negara, yang menghadapi masalah yang sama pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu strategi pengembangan pariwisata tidak hanya untuk masalah-masalah yang terjadi pada saat ini, tetapi masalah-masalah yang akan dihadapi nanti. Negara-negara yang sedang berkembang perlu menetapkan dan melaksanakan strategi-strategi khusus untuk menghindari terjadinya pengembangan pariwisata yang tidak terarah. (Hendry Simamora. 2010)

Jenis kegiatan wisata di dunia terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, negara-negara yang bergabung dalam pengelolaan sektor sektor pariwisatanya, seperti Hawaii, Bermuda, Karibia, Canary Island, dan lain-lain. Kedua, negara-negara yang menganggap sektor pariwisata sebagai sebuah aktivitas penting/sektor penting, misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, UK, USA, negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), China, Thailand, dan lain-lain. (Heng, T.M. 2010) Ketiga, negara-negara yang menganggap sektor pariwisata sebagai sektor pendukung, misalnya Iran, Brunei, Saudi Arabia, dan lain-lain.

C. Alasan Negara Berkembang merancang Kebijakan Pariwisata

Alasan mendasar negara memprioritaskan pariwisata agar segala sumber daya yang digunakan dan dialokasikan bisa sefisien mungkin dan mampu memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian negara (Gorda, 2014). Beberapa alasan sebuah negara, khususnya negara yang sedang berkembang merancang kebijakan pariwisata lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kebijakan Pariwisata

Kebijakan Pariwisata	
(1)	Pariwisata sering dianggap sebagai sebuah sumber penting dari <i>hard foreign exchange earnings</i> (pendapatan nilai tukar mata uang asing).
(2)	Salah satu pembentuk dari PDB.
(3)	Penghasil atau penyumbang devisa negara.
(4)	Sebagai industri ekspor, pariwisata tidak menghadapi aturan perdagangan dan kuota seperti halnya barang-barang pabrikan. bahan mentah, dan produk-produk pokok kebutuhan dasar.
(5)	Wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam, misalnya kondisi iklim sejarah, budaya, dan sebagainya yang tidak didesain

secara khusus. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan pariwisata terhadap infrastruktur alam mempunyai *marginal cost* yang rendah.

(6) Mengembangkan negara atau suatu daerah yang miskin akan sumber daya alam. Pariwisata bisa diciptakan dengan membangun objek-objek wisata buatan yang tidak tergantung kepada keberadaan sumberdaya alam.

(7) Pariwisata mampu memberikan lapangan kerja baru baik di negara sedang berkembang maupun negara maju.

(8) Sebagai sebuah aktivitas campuran untuk memenuhi permintaan akan jasa dan produk, pariwisata menjadi pendorong bagi produk lainnya seperti makanan, cinderamata, dan sebagainya.

(9) Adanya pariwisata yang maju, menghasilkan permintaan yang meningkat atas akomodasi dan infrastruktur.

D. Evaluasi

1. Deskripsikanlah kondisi pariwisata di negara berkembang!
2. Uraikan alasan mengapa negara memprioritaskan pariwisata!
3. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan terkait pariwisata di negara berkembang!

BAB 4

Peningkatan Daya saing Pariwisata Nasional dan Daerah

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian keempat menjelaskan peningkatan daya saing pariwisata nasional dan daerah terdiri dari dasar hukum peningkatan daya saing pariwisata, teori daya saing pariwisata, pendekatan-pendekatan daya saing pariwisata, dan pendekatan pengembangan wilayah. Sehingga, mahasiswa mampu memahami bahwa daerah memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan jenis strategi dan kebijakan untuk pariwisata.

B. Dasar Hukum Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan memperkuat pangsa pasarnya, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.

C. Teori daya saing Pariwisata

Teori daya saing menurut Porter yakni daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam industri untuk menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya yang disebut keunggulan kompetitif. (Hikmat, H. 2013)

Porter menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal yakni mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kepercayaan bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan efisiensi. (I Gede Pitana, dkk. 2019)

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menilai daya saing, antara lain:

1) Harga yang murah

Harga murah artinya tidak sekadar murah, namun tetap mempertahankan kualitas. Kualitas sama tapi harga yang lebih murah tentu saja lebih menguntungkan konsumen. Akan lebih baik lagi bila harga murah tetapi mampu memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan pesaing. Umumnya perusahaan yang menawarkan produk yang lebih murah adalah perusahaan yang umumnya dapat melakukan efisiensi. Pada istilah Michael Potter, perusahaan mempunyai keunggulan dari segi biaya (*cost leadership*). Adanya efisiensi tersebut, perusahaan memperoleh margin yang sama atau lebih besar meskipun menetapkan harga yang murah karena biayanya yang lebih kecil.

2) Diferensiasi

Melakukan diferensiasi berarti menawarkan atau melakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan pesaing. Sesuatu yang ditawarkan berbeda, akan memberikan perhatian bagi konsumen. Berbeda bukan hanya sekadar berbeda, misalnya berbeda hanya dalam kemasan. Perbedaan tersebut haruslah unik, atau bisa memberikan nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh produk pesaing.

3) Pelayanan

Pelayanan dapat dijadikan suatu keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan yang dapat memberikan service excellence dapat memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Perusahaan-perusahaan bersaing terutama dalam memanjakan pelanggannya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

D. Pendekatan-Pendekatan Daya Saing Pariwisata

Berbagai pendekatan yang digunakan dalam studi yang berkaitan dengan peningkatan daya saing kepariwisataan meliputi pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan, pendekatan pengembangan wilayah, pendekatan kesesuaian antara penawaran dan permintaan, pendekatan pemberdayaan komunitas lokal, pendekatan keterkaitan ke dalam dan ke luar, pendekatan pengembangan pariwisata tanpa batas, dan pendekatan ekowisata. (I Gusti Bagus Rai Utama, dkk. 2012)

Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan adalah "usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka" (World Commission Environment and Development) Untuk dapat mencapai tujuan berkelanjutan WCED mensyaratkan harus dipenuhinya: peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah terhadap lingkungan hidup; dan menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang.

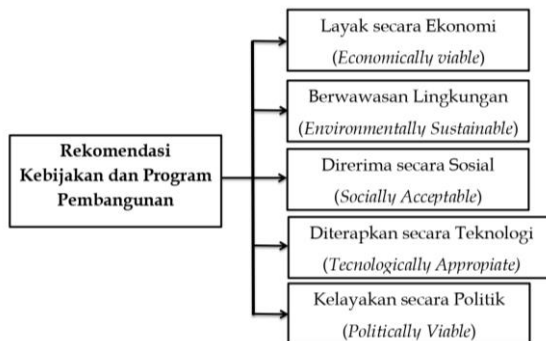
Berbagai isu lingkungan yang terjadi telah memicu munculnya landasan pemikiran dan perspektif ekologi yang dikenal dengan pemikiran tentang model pembangunan berkelanjutan (sustainable development model). Konsep tersebut dasarnya merupakan suatu bentuk keprihatinan mendalam terhadap konsekuensi jangka panjang dari adanya bentuk tekanan yang besar terhadap daya dukung alam, serta kerusakan lingkungan. (I Gde Pitana, dkk. 2015)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan yang menyangkut aspek lingkungan alam, aspek lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. (I Gusti Ngurah Gorda. 2014) Oleh karena itu, pendekatan konservasi akan menjadi fokus dalam setiap usaha pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam. Pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mempertaruhkan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesadaran terhadap nilai keseimbangan ekologis dan etnologis, prinsip pelestarian serta nilai manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. (Yoeti, 2013) Melalui konsep pembangunan yang bermuara pada perwujudan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan

lingkungan, maka akan tercipta suatu sistem yang sinergis sehingga tercapai tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pelaksanaan pembangunan ekonomi secara terpadu dengan pembangunan lingkungan hidup. (Pranowo, 2018)

Mekanisme pembangunan pada dasarnya berlangsung di suatu kawasan dalam suatu wilayah tertentu selalu akan memiliki pengaruh terhadap wilayah yang melingkupinya baik berupa efek langsung (*direct effect*), efek tak langsung (*indirect effect*) maupun efek ikutan (*induced effect*). (PKSPL, 2011) Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan serta arahan dan program-program implementasi pembangunan yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan yang di terangkan pada bagan di bawah ini:

Bagan 4.1 Rekomendasi Kebijakan dan Program Pembangunan



Pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan menghendaki ketaatan pada azas-azas perencanaan meliputi; 1). Prinsip pengembangan pariwisata yang berpijak pada aspek pelestarian lingkungan hidup dan berorientasi ke depan (jangka panjang) serta berpola lintas sektoral; 2). Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal setempat; 3). Prinsip pengelolaan aset geografis dan sumber daya alam yang tidak merusak tapi melestarikan; 4). Penekanan pada optimalisasi peran perkembangan kegiatan pariwisata daerah pers dalam memacu kesesuaian antara kegiatan pengembangan pariwisata dengan skala, kondisi dan karakter suatu kawasan yang akan dikembangkan. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal dengan bermuara pada pengembangan apresiasi yang lebih peka pada warisan budaya, lingkungan hidup, jati diri bangsa dan nilai-nilai agama. (lin Meriza. 2018)

Antisipasi yang tepat dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi akibat program pariwisata yang berorientasi memperkuat potensi lokal dan kemampuan masyarakat sekitar.

E. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Tiga konsep utama dalam pengembangan wilayah yang mengacu pada fungsional (*functional integration*), dan pendekatan desentralisasi (*decentralization approach*) termasuk teori-teori yang sangat relevan diterapkan dalam program pengembangan pariwisata. Sebagai industri jasa, pariwisata dimaksudkan menjadi penggerak kegiatan perekonomian wilayah dalam pengertian yang luas, sehingga perlu disediakan secara lengkap fasilitas-fasilitas perkotaan/pelayanan yang memadai untuk membantu kelancaran kegiatan. (Indra, Muh. Ridwan. 2007)

Tabel 4.1 Konsep Pengembangan Wilayah Pariwisata

No.	Konsep	Deskripsi
1.	Konsep Pusat Pertumbuhan	Mengembangkan wilayah sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan potensi yang dimilikinya (area strategis, ekonomi, produk, <i>image</i> , dan sebagainya) serta mengintegrasikan pusat tersebut dalam pengembangan sistem infrastruktur pendukung yang efisien.
2.	Konsep Integritas Fungsional	Alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi-fungsi yang komplementer
3.	Konsep Desentralisasi	mencegah terjadinya aliran ke luar (<i>outflow</i>) dari sumber dana dan sumber daya manusia (<i>braindrain</i>).

Melalui ketiga konsep tersebut diharapkan pengelola wilayah (dengan daerah yang lebih kecil) memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan jenis strategi dan kebijakan untuk daerahnya. Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekadar kegiatan pendekatan pemberdayaan komunitas lokal dengan obyek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan pasar, tetapi juga merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai tamu (*guest*) dan masyarakat setempat sebagai tuan rumah (*host*). (Imawan, Riswandha. 2017)

Kegiatan pengembangan yang terkait dengan karakteristik masyarakat namun hanya menggunakan pendekatan sepihak dari sisi pasar merupakan konsep yang tidak proporsional. Suatu kegiatan

pengembangan terhadap suatu lokasi komunitas tertentu di mana karakter masyarakat secara fisik sosial budaya merupakan sumber daya utama. Oleh karenanya, pengembangan perlu memandang masyarakat yang berlatar belakang seniman, swasta, dan budayawan sebagai sumber daya yang berkembang dinamis untuk berkembang sebagai subyek bukan hanya sekadar obyek. (Iwan Triyuwono. 2010)

Pendekatan tersebut perlu ditempuh, sebab masyarakat lokal adalah orang-orang yang paling tahu mengenai kondisi sosial budaya setempat. Setiap kegiatan pembangunan harus memperhitungkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di sekitar obyek wisata. Oleh karena itu, setiap keputusan perencanaan harus mencerminkan masyarakat lokal yang secara aktif ikut terlibat di dalamnya. (Izatul Yussof, dkk. 2012)

Dengan keterlibatan masyarakat sejak awal, hal tersebut akan lebih menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat, kesesuaian dengan kapasitas yang ada, serta menjamin adanya komitmen masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. Konsep pendekatan tersebut dalam jangka panjang akan memungkinkan tingkat kontinuitas yang tinggi, hal demikian dikarena pengembangan pariwisata melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal perlu didasarkan pada kriteria sebagai berikut: Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal. Meningkatkan pendapatan secara ekonomis sekaligus distribusi pendapatan merata bagi penduduk lokal. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak sosial seminimal mungkin.

Dari berbagai potensi maupun kendala yang ada dalam upaya pengembangan pariwisata, diharapkan pembangunan pariwisata lebih terencana dengan baik. Arah kebijakan dan strategi pengembangan tersebut secara internal meliputi pengembangan atraksi dan objek wisata yang berbasis pada potensi alam dan pengembangan fasilitas

pendukung wisata, sistem transportasi (aksesibilitas), sarana prasarana, promosi dan pemasaran, sumber daya manusia, dan rencana investasi.

F. Evaluasi

1. Sebutkan dasar hukum peningkatan daya saing pariwisata nasional di daerah!
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap pengertian teori daya saing!
3. Jelaskan pendekatan yang digunakan dalam peningkatan daya saing kepariwisataan!

BAB 5

Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Nasional dan Daerah

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian kelima menjelaskan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional dan daerah, terdiri dari industri dan ekonomi pariwisata, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pariwisata, kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional, kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah. Sehingga, mahasiswa mampu memahami peran pariwisata terhadap ekonomi nasional dan daerah lebih jelas.

B. Industri dan Ekonomi Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sangsakerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "pari" dan "wisata". "Pari" berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan "wisata" berarti perjalanan, bepergian yang sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. (Johnny Ibrahim. Dkk. 2016)

Secara luas, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan dalam literatur lainnya, pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam efek *multiplier* sektor bagi produksi lainnya. (Kantaprawira Rusadi. 2018)

Menurut arti terminologi, pariwisata dapat terbentuk apabila ada pelaku wisata (*demand*) yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, ketersediaan infrastruktur pendukung, keberadaan obyek wisata dan atraksi wisata yang didukung dengan sistem promosi dan pemasaran yang baik serta pelayanan terhadap para pelaku wisata (*supply*). (Lupiyoadi, R. 2016)

World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan permintaan pariwisata sebagai permintaan terhadap barang dan jasa yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata. Pihak yang melakukan permintaan adalah wisatawan sebagai konsumen, pemerintah dan swasta dalam rangka investasi dan promosi wisata. Terdapat tiga elemen dasar permintaan pariwisata, antara lain: 1). Permintaan aktual atau efektif, 2). *Suppressed demand* (permintaan yang ditunda); 3). Tidak ada permintaan. (Manahati Zebua. 2014)

Dari ketiga elemen dasar tersebut, permintaan aktual merupakan permintaan terealisasi, sehingga dapat diukur atau didefinisikan secara jelas. Sedangkan kedua elemen lainnya masih merupakan permintaan yang sulit untuk dianalisis, hal tersebut karena belum terealisasi transaksinya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pariwisata

Pariwisata lebih banyak dilakukan ketika pendapatan meningkat. Pada saat banyak keluarga yang memasuki kelompok pendapatan tinggi, maka permintaan untuk berwisata meningkat lebih cepat dari pendapatan. Permintaan dalam kepariwisataan dibagi dua yakni sebagai berikut:

Tabel 5.1. Permintaan dalam Kepariwisataan

Permintaan dalam Kepariwisataan	
(1) <i>Potensial Demand</i>	yaitu sejumlah orang yang berpotensi untuk melakukan perjalanan wisata
(2) <i>Actua Demand</i>	orang-orang yang melakukan perjalanan wisata pada suatu daerah tujuan wisata

Sedangkan permintaan dalam industri pariwisata ditentukan oleh beberapa faktor yang dikelompokkan dalam general *demand* dan *specific demand* menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.2. Faktor Permintaan dalam Industri Pariwisata

No.	<i>General Demand Factor</i>	<i>Determining Specific Demand Factor</i>
1.	Purchasing Power: Kekuatan untuk membeli banyak barang ditentukan oleh pendapatan yang siap dibelanjakan (<i>disposable income</i>) yang erat kaitannya dengan standar hidup dan intensitas perjalanan yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.	Harga: Secara umum, <i>price differentiation</i> berlaku dalam kepariwisataan sebagai suatu strategi dalam pemasaran. Faktor harga sangat menentukan dalam persaingan antara sesama operator. Bila perbedaan dalam kesediaan fasilitas tidak berbeda jauh, wisatawan cenderung akan memilih harga paket wisata yang lebih murah.
2.	Demographic Structure and Trends : Permintaan pariwisata ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, serta struktur usia penduduk. Jumlah penduduk yang banyak dengan pendapatan per kapita yang kecil akan memperkecil kemungkinan/kesempatan melakukan perjalanan wisata. Usia penduduk yang masih muda dengan pendapatan relatif tinggi cenderung akan melakukan perjalanan wisata dibandingkan	Daya Tarik Wisata : Daya tarik yang terdapat di daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi sangat mempengaruhi pemilihan daerah tujuan wisata. Orang tidak mau mengunjungi daerah wisata dengan daya tarik biasa saja, karena mereka harus membayar dan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan wisata. Daya tarik tujuan wisata dapat didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan memadai.

dengan penduduk yang berusia pensiun.		
3.	<i>Social and Culture Factors:</i> Industrialisasi yang menyebabkan meningkatnya pemerataan pendapatan dalam masyarakat sehingga waktu senggang pun meningkat, yang menyebabkan orang-orang berkecenderungan sering melakukan perjalanan wisata.	Kemudahan Berkunjung: Kemudahan transportasi ke daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi akan mempengaruhi pilihan wisatawan. Tersedianya prasarana yang memadai akan menjadi faktor penting dalam menentukan perjalanan wisata yang akan dilakukannya. Wisatawan akan mempertimbangkan hal-hal seperti; bandara yang bersih dan nyaman, jalan yang mulus menuju obyek wisata, transportasi yang mudah dan nyaman, dan lain sebagainya.
4.	<i>Travel Motivation and Attitudes:</i> Motivasi untuk melakukan perjalanan wisata sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Masih eratnya hubungan kekeluargaan masyarakat dan tradisi saling berkunjung satu dengan yang lain sehingga meningkatkan permintaan untuk melakukan perjalanan wisata.	Informasi dan Layanan Sebelum Kunjungan: Faktor Tourism Information Service sangat penting untuk diketahui wisatawan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi wisatawan, kendaraan yang akan dipakai, waktu dan apa saja yang perlu dibawa, pelayanan pemesanan tiket, perpanjangan visa, penukaran valuta asing, dan sebagainya.
5.	<i>Opportunities to travel and Tourism Marketing Intensity</i>	Citra : Wisatawan memiliki kesan dan harapan tersendiri tentang daerah tujuan wisata

Adanya Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE): Membuka kesempatan untuk melakukan perjalanan wisata karena biaya perjalanan yang telah ditanggung perusahaan, dan adanya kesempatan bersama keluarga untuk ikut melakukan perjalanan wisata.	yang akan dikunjungi. Kunjungan wisata yang dilakukan diharapkan terhindar dari pikiran negatif seperti bencana alam atau bom sehingga akan meninggalkan kesan yang baik saat mereka kembali ke daerah/negara asalnya. Keramah-tamahan penduduk di daerah tujuan wisata menjadi pertimbangan dalam menciptakan citra yang bagus di mata wisatawan.
--	---

Pariwisata dari sisi penawaran merupakan suatu keinginan dari pengelola pariwisata untuk menawarkan hal-hal yang menarik dari obyek wisata yang dikelola baik dari segi keunikan obyek wisata tersebut maupun pemandangan/cinderamata yang ada di daerah obyek wisata tersebut pada tingkat harga yang telah ditentukan.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pariwisata

Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pariwisata tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran
Pariwisata**

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pariwisata		
(1)	<i>Attraction</i> (daya tarik)	Daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut DTW) untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam, masyarakat, dan budayanya.
(2)	<i>Accesable</i> (transportasi)	Accesable dimaksudkan agar wisatawan domestik dan manca negara dapat dengan mudah menjangkau ke tempat wisata.
(3)	<i>Amenities</i> (fasilitas)	Amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan nyaman tinggal lebih lama di DTW.
(4)	<i>Ancillary</i> (kelembagaan)	Adanya lembaga pariwisata, membuat wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW karena merasakan keamanan, (<i>protection of tourism</i>), dan terlindungi.

Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati oleh pengunjung di antaranya sebagai berikut:

Tabel 5.4. Tiga Kriteria Obyek Pariwisata Diminati Pengunjung

Tiga Kriteria Obyek Pariwisata Diminati Pengunjung		
(1)	<i>Something to see</i>	adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
(2)	<i>Something to do</i>	adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa mendapatkan perasaan senang, bahagia, relax, dengan menggunakan fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah tinggal di sana.
(3)	<i>Something to buy</i>	adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, agar dapat dijadikan oleh-oleh.

E. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Nasional

Industri pariwisata sering dianggap sebagai jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi Indonesia. Kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh ekspor non-migas yang menurun, impor yang naik, dan pembangunan ekonomi yang timpang, dipandang dapat diatasi dengan industri pariwisata karena industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru yang memberikan lebih banyak peluang ekonomi. Industri pariwisata juga menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional. Bagi Indonesia, diharapkan pariwisata dapat menyumbang neraca pembayaran, meningkatkan pengertian internasional, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan toleransi. (Manan, dkk. 2009)

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti usaha perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan paket wisata. Akan tetapi, banyak kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan erat dengan pariwisata, seperti transportasi, telekomunikasi, dan bisnis eceran. (Marbun, SF. 2011)

Selain menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat ditempatkan dimana saja (*footlose*). Oleh sebab itu pembangunan wisata dapat dilakukan di daerah yang pengaruh penciptaan lapangan kerjanya paling menguntungkan.

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Bahkan sektor tersebut diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Pada situasi demikian muncul pertanyaan seperti kebijaksanaan mana yang lebih baik? Mengikuti cara Nusa Dua ataukah Pantai Kuta agar kegiatan pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang paling banyak bagi negara dan juga bagi masyarakat? Apakah pengembangan kegiatan pariwisata dilakukan di segenap wilayah Indonesia atau hanya di beberapa daerah tertentu yang dianggap paling siap? Ada niat untuk menarik wisatawan dalam jumlah besar, sebelumnya harus disadari bahwa jumlah yang besar dan hanya terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu dapat menurunkan kualitas

kehidupan masyarakat yang pada akhirnya justru akan menghilangkan daya tarik daerah tersebut. (Marilang, 2012)

Perlu disadari bahwa keindahan lingkungan alam dapat terganggu bila jumlah dan kualitas perilaku wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut tidak dapat dikendalikan secara efektif. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tertentu perlu melibatkan penduduk setempat sehingga mereka dapat ikut berperan dan menarik manfaat dari kegiatan tersebut. Pengembangan pariwisata memerlukan modal. Modal dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Dalam situasi di mana pemerintah terpaksa harus bekerja dengan sumber daya yang amat terbatas, diharapkan pihak swasta dapat berperan lebih besar dengan ikut mendanai pembangunan berbagai prasarana, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan objek atau daerah tujuan wisata. (Mardisano, 2012)

Bagi investor swasta, keikutsertaan dalam pembangunan prasarana wisata jelas merupakan beban investasi tersendiri. Namun demikian, investor mendapatkan imbalan berupa hak tertentu. Pemberian hak tersebut hendaknya tidak mengganggu kepentingan pihak lain. Kebijakan yang menjamin perlakuan terhadap investor, hendaknya direncanakan dengan cermat dan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan dari pihak lainnya, termasuk hak dan kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat. Adanya keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan prasarana wisata, maka modal publik dapat dipusatkan pada proyek yang menciptakan sinergi bersama-sama dengan proyek yang telah dirintis oleh sektor swasta. Hal tersebut berarti di masa mendatang dapat diharapkan akan ada kerja sama antara pemerintah dan sektor wisata.

Ada beberapa masalah mendasar yang berkaitan dengan kebijaksanaan pariwisata. Misalnya, masih harus ada kesepakatan mengenai perimbangan biaya untuk promosi dan pembangunan yang didanai sektor publik. Adanya pendanaan pemerintah tersebut telah betul-betul melancarkan pembangunan pariwisata atau justru menyebabkan pelaku industri wisata menjadi kurang peka terhadap kebutuhan wisatawan sehingga mereka menjadi kurang aktif dalam memberikan layanan yang terbaik bagi wisatawan.

Banyak anggapan bahwa kebijaksanaan pariwisata baik secara nasional maupun daerah, seperti dirancang khusus untuk kepentingan

operator wisata saja. Pemerintah sebaiknya lebih peka terhadap kebutuhan dan keinginan wisatawan, operator wisata, serta masyarakat dalam menghadapi perbedaan kepentingan. Pemerintah harus berupaya menyeimbangkan perbedaan kepentingan sehingga pariwisata bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil. Hal tersebut dapat tercapai bila kegiatan pariwisata bersifat ramah lingkungan. Borley menyatakan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik yang jauh melebihi nilainya sebagai aset pariwisata. Agar aset pariwisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan agar bertahan dalam jangka panjang, lingkungan seharusnya tidak dipertaruhkan hanya karena pertimbangan jangka pendek.

Namun demikian, kegiatan wisata juga dapat membawa dampak negatif. Pariwisata sering dianggap sebagai penyebab macetnya lalu lintas, kerusakan lingkungan, kehancuran warisan budaya bangsa, dan membawa masuk nilai budaya dan kebiasaan yang negatif.

Pariwisata dipandang sebagai suatu kegiatan ekonomi sehingga pariwisata harus dicermati seperti kegiatan ekonomi lainnya. Seperti halnya dengan kegiatan ekonomi lainnya, isu yang berkembang di sektor ini pun berkaitan dengan sumber daya dan dana. Berangkat dari kondisi tersebut seseorang harus memilih antara pariwisata dengan kegiatan lainnya, antara berbagai jenis pariwisata, dan antara daerah tujuan wisata yang satu dengan daerah tujuan wisata lainnya.

Dampak negatif kegiatan pariwisata terhadap kelestarian lingkungan dan warisan budaya nasional, adalah hal-hal yang banyak digunakan sebagai alasan campur tangan pemerintah. Pembangunan pariwisata memerlukan dukungan kebijaksanaan pariwisata yang tepat yang mampu menjadi pijakan dan panduan bagi tindakan strategik di masa mendatang. Hal tersebut penting bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Misalnya, pasar wisata sering terdapat di daerah yang memiliki keunggulan komparatif karena keindahan alamnya. Karena daerah itu mampu menarik begitu banyak wisatawan maka lalu lintas menjadi macet, terjadi polusi dan juga kerusakan terhadap lingkungan yang sebenarnya merupakan dasar keunggulan daerah tersebut. Sementara itu pihak swasta dengan kepemilikan swasta dapat

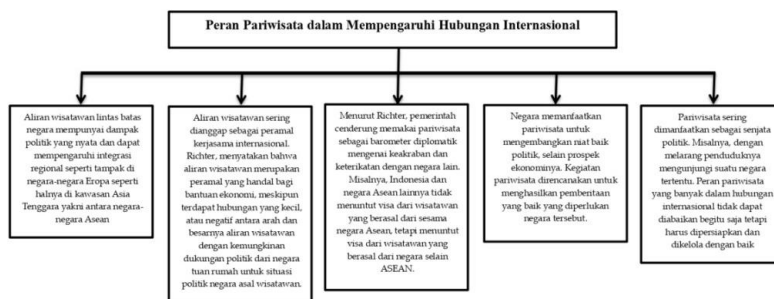
memecahkan masalah tersebut dengan menarik biaya dari para wisatawan yang datang ke objek wisata tersebut dan memanfaatkan sebagian pendapatannya untuk menjaga nilai pasarnya.

Namun, sebagian besar pasar wisata adalah milik publik atau umum, seperti taman, pantai, dan pegunungan. Aset seperti itu seringkali masih dianggap sebagai aset alamiah yang tidak perlu dipelihara. Dengan kata lain, pasar wisata dengan tidak adanya hak kepemilikan, maka tidak layak diberi kebijaksanaan. Situasi seperti itu masyarakat setempat seringkali memerlukan tindakan kolektif dari pemerintah sebagai pilihan yang paling nyata dan populer. Namun tindakan kolektif tersebut dapat menjadi kontroversial karena cenderung membedakan orang atas dasar kemampuannya dalam membayar.

Pariwisata dapat menimbulkan pertentangan hak, terutama antara hak daerah dan pusat terhadap orang luar atau asing. Persengketaan semacam itu sering diselesaikan melalui proses politik dan pasar politik (*political markets*). Berkaitan dengan itu akibatnya terdapat bahaya yang mengancam, yaitu bahwa kegagalan pasar akan dimanfaatkan untuk membenarkan dan menjadi alasan bagi setiap bentuk campur tangan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Situasi ini akan menjadi lahan subur untuk terjadinya kolusi antara kepentingan pribadi-pribadi tertentu dengan jabatan publik. Jelaslah bahwa isu-isu tersebut hanya bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan publik yang dapat menengahi kebutuhan dan keinginan yang saling bertentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Luasnya kegiatan pariwisata terutama di tingkat internasional dengan situasi dimana batas antarnegara semakin hilang, telah menjadikan pariwisata sebagai suatu kegiatan penting yang turut mempengaruhi hubungan internasional. Peran pariwisata dalam mempengaruhi hubungan internasional sering diabaikan, padahal sangat penting.

Bagan 5.1 Peran Pariwisata dalam Mempengaruhi Hubungan Internasional



Kebijakan pariwisata haruslah mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor-faktor nonekonomi. Tanpa tujuan dan sasaran yang jelas justru akan mengakibatkan perencanaan pengembangan tampak seperti tanpa koordinasi dan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. (Marpaung, H, dkk. 2012) Beberapa area penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pariwisata yakni sebagai berikut:

1. *Pengembangan pariwisata dilakukan oleh pemerintah atau swasta?*

Terdapat pada negara berkembang, pihak swasta belum memiliki pengalaman yang cukup, belum memiliki sumber daya, dan bahkan mungkin belum tertarik untuk menanam investasi di sektor pariwisata. Negara-negara di Asia Selatan, pemerintah mengambil peran aktif dalam mengembangkan kegiatan pariwisata. Perhatian mereka lebih difokuskan pada pengaruh kegiatan pariwisata internasional terhadap masyarakat lokal. Berbagai dampak nonekonomi dari pariwisata, serta dampak sosial budaya dan lingkungan, lebih diprioritaskan penanganannya oleh para pembuat kebijakan. Pada negara-negara yang sudah maju pun masih terdapat pembatasan pembatasan dalam kegiatan pariwisata, khususnya pada jenis jenis pariwisata tertentu, yang dilakukan di lokasi-lokasi yang tertentu pula.

2. *Pariwisata Internasional atau Domestik?*

Kebanyakan negara berkembang lebih mengutamakan pengembangan pasar wisata internasional karena alasan alasan tertentu. Namun pasar domestik tidak boleh diabaikan karena pariwisata domestik mempunyai peranan penting dalam memperkuat identitas nasional dan nilai kebangsaan. Penguatan identitas nasional di India dilakukan melalui kegiatan pariwisata

domestic, telah menjadi bagian penting yang ikut menentukan kebijakan. Sedangkan di Australia peringatan 200 tahun masyarakat Australia dan Tahun Wisata Bangsa-Bangsa merupakan contoh nyata dari kegiatan pariwisata yang digunakan sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional suatu bangsa.

3. *Skala Pengembangan Pariwisata*

Banyak negara telah mencoba untuk menetapkan sasaran kebijakannya guna memaksimalkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Sebagai contoh, daerah tujuan wisata Indonesia adalah pulau Bali. Sekitar 60% dari seluruh wisatawan yang datang ke Indonesia berkunjung ke Bali. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan menggunakan Bali sebagai pusat penyebaran (*point of distribution*). Melalui kunjungan di Bali ini, pengunjung diarahkan agar mengunjungi pulau-pulau lainnya. Adanya kebijakan tersebut maka diharapkan daerah lain juga dapat berkembang kegiatan pariwisatanya.

4. *Pariwisata tertutup*

Pariwisata tertutup memisahkan wisatawan dari masyarakat umum. Pengembangan pariwisata tertutup ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari nilai tukar mata uang asing tanpa mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan asli akibat datangnya wisatawan asing. Sekitar tahun 60-an, Tanzania menyukai pengembangan pariwisata tertutup untuk melindungi kebudayaan Afrika dari pengaruh wisatawan asing.

Pada tingkatan resort, terdapat beragam jenis pariwisata tertutup, misalnya Butlins Holiday Camps di Inggris, Club Med di banyak negara, dan lain-lain. Jenis-jenis pengembangan tersebut diangkat untuk alasan-alasan perlindungan budaya masyarakat sosial yang eksklusif atau kadang juga untuk mencegah kerusakan alam. Ada beberapa perbedaan dalam pengembangan pariwisata tertutup yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, di mana terdapat celah pendapatan antara pendatang dan tuan rumah yang sangat besar dan ada perbedaan kebudayaan dan sosial yang dapat mengancam. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pariwisata antara negara yang sedang berkembang dengan negara yang sudah maju berbeda dampaknya meskipun kebijakannya sama. (Maschab, dkk. 2012)

Pengoptimalan potensi pariwisata berhubungan dengan kebutuhan antara lain:

- a. Sasaran pengembangan untuk sektor pariwisata.
- b. Formulasi kebijakan untuk menetapkan sasaran-sasaran tersebut.

Kedua tahap penyusunan kebijakan pariwisata mengikutsertakan intervensi pemerintah. Sedangkan sektor swasta tidak diikutsertakan dalam penentuan kebijakan. Perbedaan-perbedaan utama dalam ketertarikan, pendekatan dan motivasi untuk melakukan investasi pariwisata antara sektor pemerintah dan swasta dalam perencanaan pariwisata adalah untuk meminimalkan konflik-konflik potensial dan untuk menggambarkan *framework* pengembangan dimana sektor swasta akan terlibat. (MD, Moh.Mahfud. 2011) Hal tersebut memberi gambaran bahwa tanpa keterlibatan pemerintah dalam perencanaan pariwisata maka pengembangan industri pariwisata akan mengalami kekosongan arah, dan inisiatif jangka pendek yang mungkin akan membahayakan potensi jangka panjang.

F. Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Daerah

Otonomi Daerah sudah berlangsung sejak 1 Januari 2001, membuat pemerintah daerah sibuk mengatur daerahnya masing-masing agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing yang salah satunya adalah potensi dalam sektor pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas berperan atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas lebih berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga

harus mengetahui hal hal yang merugikan dengan adanya pariwisata tersebut. (Mill, R.C, dkk. 2018)

Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi industri dalam hal upayanya mengembangkan potensi dalam sektor pariwisata adalah untuk menjadikan sektor pariwisata tersebut sebagai sumber penghasil devisa dan penerimaan negara, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Saat ini, pemerintah menyadari bahwa potensi pada sektor pariwisata adalah alat untuk membangun perekonomian suatu daerah dimana sektor pariwisata berada.

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting. Aspek tersebut di antaranya aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis, dan aspek-aspek yang lainnya. Aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

Menurut Hutabarat, peranan pariwisata saat ini mencakup pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan dan yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga poin di atas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5. Peranan Pariwisata

Peranan Pariwisata	
(1) Peran Ekonomi	a. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu, mendorong peningkatan dan pertumbuhan pembangunan di sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya.

		b. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menyediakan hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan, dan lain-lain. Peluang usaha tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.
(2)	Peran Sosial	a. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran, dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha tersebut dibutuhkan tenaga kerja dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung adalah dibidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga kerja di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.
(3)	Peran Kebudayaan	a. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan. b. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata Daya tarik

tersebut harus terus dipelihara dan dilestarikan. Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli, Hal tersebut mendorong masyarakat untuk memelihara apa yang menjadi ciri khas untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik serta pertumbuhan pendapatan dari subsektor perdagangan, hotel, dan sumbangannya terhadap kinerja perekonomian. Indikator kinerja perekonomian adalah pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan akan menciptakan dampak langsung terhadap subsektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Selanjutnya sesuai dengan teori basis ekonomi, teori basis ekspor, dan teori sektor pemimpin (leading sector). Perkembangan pariwisata memberikan pengaruh yang berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, baik yang langsung memasok barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata maupun yang tidak langsung yakni melalui efek pengganda sehingga PDRB dan total penyerapan tenaga kerja meningkat. (Miriam. 2008)

Peningkatan kinerja perekonomian dapat mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dinilai dengan indikator struktur produksi, yaitu penurunan rasio produksi sektor pertanian terhadap produksi sektor nonpertanian. Perubahan struktur penyerapan tenaga kerja adalah penurunan rasio total tenaga kerja sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor nonpertanian.

Peningkatan kinerja perekonomian berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan harapan hidup dan peningkatan penduduk melek huruf. Meningkatnya pendapatan per kapita menyebabkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan pun akan meningkat.

Kesejahteraan masyarakat di samping dipengaruhi oleh peningkatan kinerja perekonomian juga dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi. Pergeseran kontribusi sektor pertanian ke nonpertanian akan mengakibatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatanpun meningkat.

G. Evaluasi

1. Uraikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata!
2. Jelaskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Pariwisata!
3. Analisislah kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Nasional!
4. Jelaskan kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Daerah!

BAB 6

Pengembangan Kepariwisata Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian keenam menjelaskan pengembangan kepariwisataan nasional terdiri dari kebijakan pengembangan kepariwisataan dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional. Sehingga, mahasiswa mampu memahami kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan kepariwisataan nasional di wilayah-wilayah Indonesia.

B. Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Nasional

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang besar kontribusinya. Berdasarkan laporan *World Travel and Tourism Council* (WTTC), sektor pariwisata mempekerjakan kurang lebih 235 juta orang di seluruh dunia serta berkontribusi sebesar 9,3 persen dari produk PDB global. Sektor pariwisata di Indonesia berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB dan secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan kurang lebih 8,9 juta orang (*multiplier effect*). (Muh Arfin M. Salim. 2019)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas di berbagai daerah. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah. Namun agar potensi dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerjasama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata, serta masyarakat.

Diperlukan mensosialisasikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) sekaligus menginventarisir problem di masing-masing daerah dan mencari solusi agar tercipta iklim pariwisata yang kondusif. Kunci pengembang pariwisata ada di Pemerintah Daerah (Baskoro, 2008). Pariwisata mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai efek pengganda yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Proyek RIPPARNAS merupakan turunan Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan disusun RIPPARNAS ditingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Pada prinsipnya RIPPARNAS mengatur tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan strategi dan indikasi program pariwisata sampai dengan 2025. Proyek RIPPARNAS terdiri dari empat pilar utama yakni membangun industri pariwisata, membangun destinasi, membangun dan mengembangkan pemasaran pariwisata, membangun dan mengembangkan kelembagaan pariwisata. Berdasarkan dokumen tersebut telah ditentukan 50 destinasi pariwisata nasional, 88 kawasan strategis pariwisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional. (Muhammad Arief Satrio. 2021)

Pengembangan destinasi pariwisata merupakan program utama dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata, pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya.

Tujuan utama kebijakan pengembangan destinasi pariwisata adalah peningkatan pendapatan devisa pariwisata Indonesia dan pengeluaran rata-rata wisman selama di Indonesia. Implementasinya melalui penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata, partisipasi even investasi pariwisata, pekatan kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, konsolidasi akses transportasi

mancanegara dan negeri, peningkatan kapasitas industri pariwisata, dan lain-lain.

Sementara itu, pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan enam kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan even, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya.

Tujuan utama kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata adalah meningkatnya kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia. Kebijakane tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan *familiarization trip*, peningkatan informasi pasar wisata, partisipasi pada bursa pariwisata internasional, operasionalisasi Visit Indonesia *Tourism Office*, penyelenggaraan Festival Indonesia di mancanegara, pengembangan publikasi di media elektronik dan digital, serta beberapa lainnya. Pelaksanaan kedua kebijakan tersebut akan saling berintegrasi sehingga pendapatan devisa pariwisata yang diperoleh dapat diakselerasi pertumbuhannya baik melalui peningkatan jumlah wisman maupun pengeluaran wisman.

Pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, kemenparekraf telah menetapkan enam belas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di dua belas provinsi sebagai fokus pengembangan. Penetapan kawasan fokus tersebut diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya Kemenparekraf. (Natal Situmorang, dkk. 2020)

Namun dalam jangka panjang, kepariwisataan nasional akan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 yang mencakup 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang menetapkan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional.

Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada era globalisasi, peran pariwisata akan bertambah penting dengan semakin berkembangnya perdagangan dan investasi luar negeri. Peran Kemenparekraf untuk mendukung peningkatan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Indonesia menjadi penting.

Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang bermuara pada peningkatan devisa pariwisata Indonesia menjadi sangat vital. Posisi pariwisata dalam NPI yang selama ini selalu surplus memiliki kecenderungan menjadi defisit. Salah satu indikasinya adalah jumlah wisatawan nasional (Wisnas) yang ke luar negeri terus meningkat jumlahnya bahkan di tahun 2012 pertumbuhannya lebih tinggi, daripada kunjungan wisman. Peningkatan tersebut adalah dampak dari globalisasi yang didukung dengan bertambahnya masyarakat kelas menengah Indonesia sehingga semakin terjangkaunya biaya transportasi penerbangan ke luar negeri.

Dilihat dari sisi *inbound tourist*, kuantitas kunjungan wisman ke menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2000. Menurut studi, kunjungan wisman ke Indonesia dipengaruhi secara positif oleh negara asal wisatawan dan area pariwisata negara pesaing. Perolehan PDB negara asal wisman merupakan faktor di luar jangkauan kebijakan Indonesia. Akan tetapi, peluang untuk mendatangkan lebih banyak wisman dapat dilakukan dengan mengembangkan pariwisata yang kompetitif. Oleh karena itu, penetapan kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran menjadi kunci dalam meraih kesuksesan.

Melihat faktor harga pariwisata dapat menentukan jumlah kunjungan wisman, maka diperlukan perbenahan terutama di bidang infrastruktur seperti data yang dipublikasikan *World Economic Forum* bahwa pada tahun 2011, indikator business environment & infrastructure pariwisata Indonesia berada di urutan ke-86 dari 139 negara. Peningkatan infrastruktur pariwisata harus menjadi prioritas Kemenparekraf. Pembenahan infrastruktur pariwisata dan penunjangnya, seperti fasilitas di objek wisata, bandara, pelabuhan, jalan raya, akomodasi, dan akses internet merupakan aspek penting dalam pengembangan destinasi pariwisata. (Nazir, M. 2018)

Infrastruktur pariwisata perlu segera ditingkatkan mengingat bahwa sekitar 47,6% konsumsi wisman dikeluarkan untuk biaya akomodasi, angkutan domestik, dan jasa rekreasi yang berkaitan langsung dengan ketersediaan infrastruktur di Indonesia. Kondisi infrastruktur yang baik akan membuat wisman merasa nyaman berlamalama tinggal di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pengeluaran mereka selama di Indonesia.

Selama satu tahun implementasi kebijakan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan keberhasilan. Jumlah kunjungan wisman selama tahun 2012 menealami peningkatan mencapai lebih dari delapan juta wisatawan. Berdasarkan perhitungan cepat Tim Dampak Ekonomi Kemenparekraf, rata-rata pengeluaran wisman di Indonesia pada tahun 2012 meningkat 1,4% dibanding 2011 dan devisa pariwisata Indonesia naik menjadi US\$9,12 miliar atau tumbuh sebesar 6,6% dari tahun 2011.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana dalam peneembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan Indonesia.

Penataan ruang dapat menunjang kepariwisataan nasional yang tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang harus diatasi karena dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun terbatas pada kepentingan lokal saja dan belum dapat melayani kebutuhan pariwisata diluar lokasi. Seperti penyediaan angkutan wisata hanya di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari luar belum tersedia. (Ndraha, Talizuduhu. 2005)

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang, dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh beberapa *resources*, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber tersebut sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, ketiganya harus benar-benar bisa dipenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan nasional.

1. Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Kepariwisata. Adapun beberapa kebijakan strategi pemerintah untuk pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

Table 6.1. Kebijakan Strategi Pemerintah untuk Pengembangan Pariwisata

Kebijakan Strategi Pemerintah untuk Pengembangan Pariwisata	
(1) Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem	Penataan ruang yang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2) Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik	Sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
(3) Pengembangan pariwisata	Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> . Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai dari sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan produksi jasa).
(4) Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara	RTRWN diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya. Kawasan lindung dapat dioptimalkan sebagai kawasan yang memberikan dukungan bagi kegiatan

	nasional harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).	pengembangan pariwisata (<i>forets tourism</i>). Sedangkan kawasan budidaya dapat memberikan alokasi ruang untuk pengembangan pariwisata. terutama dengan kawasan. kawasan andalan yang sektor unggulannya adalah pariwisata.
(5)	Pengembangan dukungan	Sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkait dengan Struktur pengembangan wilayah.

Kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan kepariwisataan nasional di wilayah-wilayah Indonesia kegiatan pemerintah yang berorientasi pada pengembangan pariwisata di wilayah-wilayah mencakup:

Table. 6.2. Kegiatan Pengembangan Kepariwisata Nasional

Kegiatan Pengembangan Kepariwisata Nasional		
(1)	Pemanfaatan RTRWN, RTRW Provinsi IKab/Kota	Mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam penyesuaian dengan arahan alokasi pemanfaatan ruang.
(2)	Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Pembangunan pariwisata untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan program-oram sektor yang dapat meminimalkan konflik-konflik antar sektor yang terjadi.
(3)	Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal	Mendukung pengembangan pariwisata terutama peneembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan.
(4)	Peningkatan peran serta masyarakat	Pengembangan pariwisata dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
(5)	Peninekatan keterpaduan program	dengan keterlibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata.
(6)	Penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail	Pengembanean pariwisata dengan mengacu kepada arahan RTRWN dan RTRW Provinsi untuk tinekat yane lebih makro. dan meneacu kepada arahan RTRW dan RDTR Kawasan di Kabupaten/ Kota untuk unekat yang lebih detail.
(7)	pemanfaatan standar teknis sektoral	Menyusun rencana detail/rinci pengembangan kawasan pariwisata.

Dalam mendukung berkembangnya pariwisata nasional, berikut merupakan hal-hal yang perlu segera dikerjakan Oleh pemerintah, yaitu:

a) Menyediakan Infrastruktur

Salah satu contoh penambahan infrastruktur jalan yakni jalan yang mengarah ke Bali Barat. Ini untuk memudahkan dan mempercepat transportasi dari Denpasar ke kawasan Bali Barat seperti Jembrana. Kawasan pariwisata di Jembrana masih membutuhkan kedatangan wisatawan. Pengembangan infrastruktur jalan untuk sektor pariwisata di kawasan Bali Barat juga masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan wisatawan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkunjung ke kawasan pariwisata di Jembrana. Perjalanan dari Bandara ke Sanur termasuk dari Bandara ke Nusa Dua juga sering terjadi kemacetan.

Pemerintah perlu mengupayakan jalan layang atau alternatif jalan lain terutama di titik kemacetan. Pembuatan jalan tersebut bisa menekan dampak kemacetan terhadap pariwisata Bali khususnya di seputar Bandara Ngurah Rai. Dengan akses jalan yang memadai, wisatawan lebih mudah dan lebih cepat untuk berlibur ke kawasan Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Penyebaran wisatawan ke seluruh Bali, hal tersebut dapat mendorong pembangunan sarana pariwisata lainnya seperti hotel dan restoran di Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur.

b) Memperluas Berbagai Bentuk Fasilitas

Fasilitas pariwisata Candi Borobudur masih perlu adanya perbaikan. Candi Borobudur merupakan tujuan pariwisata yang sangat besar dan terkenal di mancanegara maka diperlukan berbagai bentuk fasilitas. Maka dari itu pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak swasta, contohnya dalam hal informatika yakni dengan membuat *web design* daerah pariwisata semenarik mungkin sehingga para wisatawan dapat mudah memperoleh informasi terkait pariwisata.

c) Promosi Pariwisata ke Luar Negeri

Kegiatan promosi sangat penting dalam perkembangan pariwisata nasional dan sebagai ujung tombak untuk menarik wisatawan asing datang berwisata di Indonesia. Maka pemerintah melakukan promosi ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang mempunyai potensi wisatawan yang tinggi. Kegiatan promosi tersebut harus disesuaikan dengan product wisata dan negara tujuan promosi. Contohnya negara Jepang, wisatawan yang berasal dari Jepang sangat menyukai kesenian sehingga kita dapat memperkenalkan kesenian nusantara kepada negara tersebut.

d) Sarana Transportasi

Pada perkembangan pariwisata, sarana transportasi merupakan hal yang sangat vital dalam kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya sarana transportasi yang memadai, maka perkembangan kepariwisataan tidak akan dapat berjalan lancar. Seperti di daerah Bali, tersedia sarana transportasi busway "SARBAGITA" dengan Denpasar, Badung, dan Gianyar. Tabanan besar tarifnya Rp2500 dan Rp3500. sehingga para wisatawan dapat dengan mudah tempat wisatanya dengan aman, nyaman, dan murah.

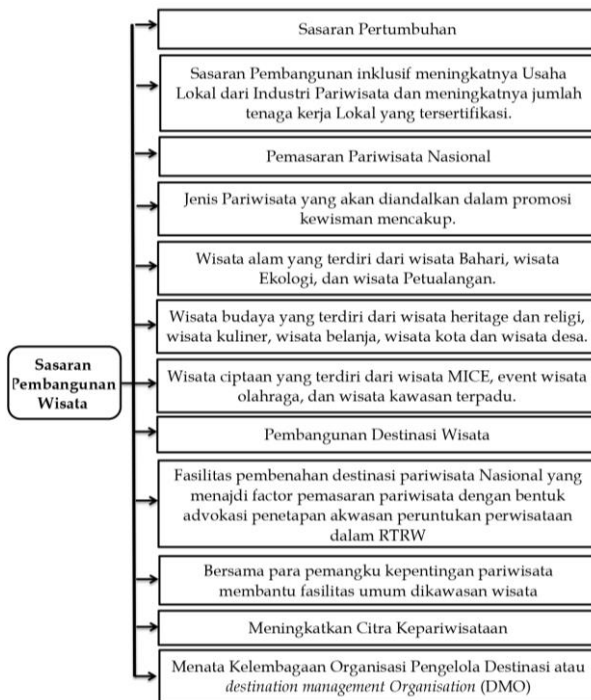
e) Keadaan Infrastruktur dan Sarana-sarana Pariwisata

Keadaan infrastruktur dan sarana wisata perlu pengelolaan khusus dari pemerintah agar infrastruktur yang sudah ada tidak cepat rusak dan kualitasnya dapat ditingkatkan guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Sarana-sarana wisata harus senantiasa dijaga, dirawat, dan ditingkatkan.

Sementara itu, Deputy Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), telah merancang Pembangunan Pariwisata dari 2014. 2019 yang terkait peningkatan daya saing pariwisata.

f) Adapun sasaran pembangunan pariwisata dijabarkan dalam bagan dibawah ini:

Bagan 6.1 Sasaran Pembangunan Pariwisata



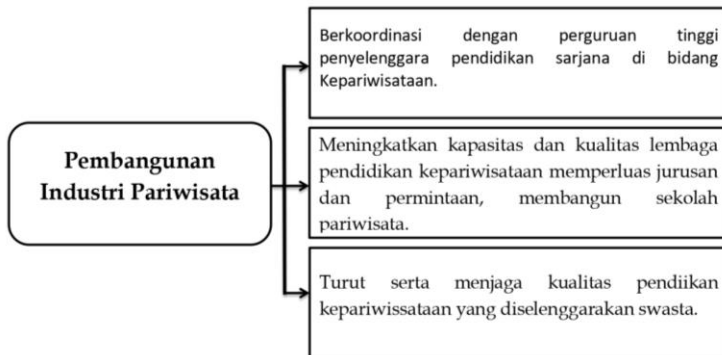
g) Pembangunan industri pariwisata dijabarkan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 6.2 Pembangunan Industri Pariwisata



h) Pembangunan SDM Pariwisata dijabarkan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 6.3 Pembangunan SDM Pariwisata



D. Evaluasi

1. Uraikanlah kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan kepariwisataan yang ada saat ini!
2. Jelaskan kegiatan Pemerintah yang berorientasi pada pengembangan Pariwisata!
3. Apakah yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah dalam mendukung perkembangan Pariwisata!

BAB 7

Optimalisasi Pariwisata Daerah

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian ketuju menjelaskan optimalisasi pariwisata daerah dan faktor pendorong perkembangan pariwisata. Sehingga, mahasiswa mampu memahami tujuan dan fungsi otonomi daerah serta beberapa faktor yang mendorong perkembangan pariwisata.

B. Optimalisasi Pariwisata Daerah

Pembangunan ekonomi mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah-daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. (Nurlelawati. 2019)

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah mengalami pertumbuhan dan perubahan. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mengatakan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga perubahan ekonomi masyarakat. Sehingga, pendapatan daerah juga akan semakin meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, peningkatan infrastruktur yang ada, dan peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat, maka peningkatan pembangunan perekonomian daerah dapat diukur dengan cara kuantitatif.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga sebagai pengembangan usaha-usaha baru.

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan angan yang luas, nyata, bertanggung jawab, dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan diberbagai sektor. (Oka, dkk. 2013)

Pada otonomi daerah dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam maupun luar negeri serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara professional. Kewenangan tersebut diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. (Oka, dkk. 2013)

Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal

daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Disentralisasi pembangunan dipusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri. (Panjaitan, Marojohan. 2012)

Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia di antaranya yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat dilihat bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing.

Pada prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Adanya sentralisasi ke daerah, maka perluasan wewenang daerah kabupaten kota melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi daerah (Ratih Sari, 2013). Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai tombak dari implementasi otonomi daerah dalam upaya menciptakan berbagai pendapatan daerah dan harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan interal dari pembangunan nasional. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber

pendapatan yang dimiliki. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya maka perlu adanya sumber pendapatan daerah.

Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan, atau semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Daerah dituntut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat, dan daerah dituntut dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda, disebabkan adanya perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, dan besaran penduduk, sehingga memungkinkan masing-masing daerah memberi penekanan yang berbeda pada setiap sektor pemasukan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Seperti halnya jika suatu daerah mempunyai tempat wisata yang berpotensi untuk dikomersialkan maka pemerintah harus memberikan

perhatian khusus pada tempat tersebut dan masyarakatnya. Masyarakat dihimbau untuk melestarikan dan pemerintah juga membantu mempromosikan lokasi tersebut untuk dapat dikunjungi para wisatawan. Jika tempat wisata itu akan maju maka masyarakat di daerah tersebut akan mendapatkan dampaknya seperti dapat berjualan, menyediakan penginapan, dan juga di bidang jasa lainnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber dana yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Pedrana, Margherita. 2013)

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga terdapat perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang.

Alokasi dana khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut menuju otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka salah satu indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut adalah

dengan terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Pranowo, M. Bambang. 2018)

Sejalan dengan perencanaan otonomi daerah, setiap daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemampuan keuangan serta pengelolaannya. Sebab, dengan diberlakukannya otonomi daerah maka semakin lama subsidi dan bantuan pemerintah pusat diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada setiap daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu, UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memberikan peluang yang cukup besar untuk menggali dan mengelola penerimaan PAD secara optimal. Lahirnya kedua Undang-Undang tersebut terutama Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dimiliki oleh masing-masing daerah.

Indonesia sektor yang paling dominan dan banyak dikembangkan saat ini adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan peranan yang berarti dalam pembangunan keekonomian nasional, pariwisata juga sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi, menjaga dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong perekonomian regional.

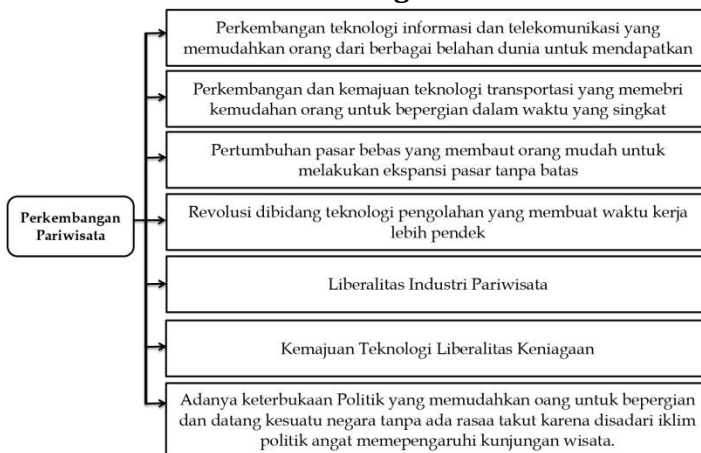
Industri pariwisata yang dapat menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat (CTD). Adanya pengembangan CTD, pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan beragam retribusi yang bersifat legal untuk sumber dana pembangunan. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Komponen PAD yang menonjol adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah. (Pratikno. 2011)

Mata rantai industri pariwisata yang berupa penginapan, restoran/jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan hiburan), usaha perjalanan wisata (travel agent dan pemandu wisata), convention organizer, dan transportasi dapat menjadi sumber PAD yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak. Adapun kontribusi pajak retribusi sangat besar bagi PAD, PAD dari pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai retribusi seperti retribusi pemakaman kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatan lain yang sah maka akan didapa penenmaan dari sektor pariwisata.

C. Faktor Pendorong Perkembangan Pariwisata

Saat ini, pariwisata mengalami perkembangan yang sangat progresif. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan tersebut dijelaskan dalam bagan:

Bagan 7.1 Faktor yang Mendorong perkembangan Pariwisata Secara Progresif



Pada sisi lain, pembangunan hotel-hotel berkembang pesat, baik pendirian hotel- hotel baru maupun pengadaan tambahan kamar-kamar pada hotel yang sudah ada. Fungsi hotel bukan sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, sekadar untuk mendapatkan ketenangan. Hotel memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, sehingga perlu dikembangkan secara baik dan

benar agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha. Hotel merupakan salah jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan. (PKSPL, 2011) Tingkat hunian hotel merupakan suatu indikator yang menunjukkan sejauh mana jumlah kamar terjual yang diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu dijual. Semakin tinggi tingkat hunian hotel maka penghasilan hotel juga akan naik, sehingga hal tersebut akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak penghasilan.

D. Program Wisata Borobudur Trail Of Civilization

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program wisata *Borobudur Trail of Civilization*. *Borobudur Trail of Civilization* adalah pola perjalanan wisata tematik yang diharapkan dapat menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati keindahan dan kemegahan Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia.

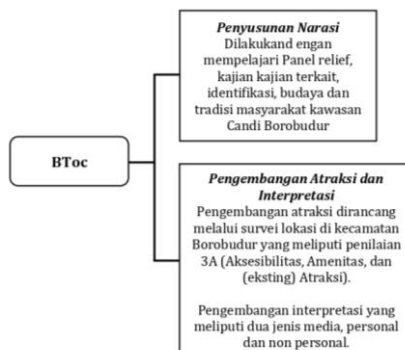
1. Waluku Cultivating Civilization Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata dengan rangkaian proses menanam padi di sawah dan prosesi kirab budaya.
2. Body and Soul Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan melakukan aktivitas wisata dalam rangkaian kebutuhan utama manusia dalam menjalankan kehidupan, yaitu tubuh dan jiwa yang sehat melalui yoga dan pemijatan tradisional.
3. Skilled Hands Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk melakukan aktivitas membuat gerabah dan membuat dengan pewarna alami.
4. Tropical Flora's Wanderland Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan melakukan aktivitas wisata petualang hiking dalam rangkaian perjalanan mengidentifikasi flora yang ditemukan di relief Candi Borobudur.
5. Walking with Stars Aktivitas wisata BTOC ternyata tidak hanya dilakukan pada siang hari. Dengan subtema ini, wisatawan akan diajak berkemah. Rangkaian aktivitas adalah untuk mendapat pengetahuan seputar hubungan era tantara ilmu astronomi dan keberadaan Candi Borobudur.

6. Sudhana Manohara: The Eternal Love Story Mengikuti subtema ini, peserta akan diajak untuk melakukan aktivitas yang romantis, seperti melihat pertunjukan tari dan makan malam romantis.
7. Journey of The Stones Subtema ini akan mengajak peserta untuk mempelajari sejarah pembangunan Candi Borobudur. Namun, peserta tidak sekadar belajar biasa.
8. Jataka Fable Stories Subtema ini cocok untuk anak-anak karena mengajak wisatawan untuk mempelajari ajaran moral berdasarkan karakter hewan di relief Candi Borobudur Pelajaran dibawakan melalui cara hiburan.
9. Music and Rhyme. Pecinta music akan cocok dengan sub tema ini. Sesuai dengan namanya, wisatawan akan diajak mengenal alat-alat music nusantara yang dipahat di relief Candi Boobudur.

Perjalanan tematik dibawah tema besar ***Trail of Civilization*** ini disusun untuk memberikan nilai tambah dengan menghadirkan penceritaan narasi dan interpretasi relief yang mampu menstimulasi **pengalaman** wisatawan **sehingga memberikan kesan** yang lebih mendalam tentang kunjungannya ke Candi Borobudur dan kawasan di sekitarnya.



Bagan 7.1 Penyusunan Narasi, Rancangan Atraksi dan Interpretasi BToC



Gambar 7.1 Identifikasi relief dan kajian-kajian yang terkait



KONSEP RANCANGAN AKTIVITAS

Interpretasi Personal	Interpretasi Non Personal
• <i>Storyteller</i> (Penutur Cerita) • Pemandu Aktivitas • Kostum	• <i>Activity Book</i> • <i>Signage</i> Tematik dan Kawasan • Papan Informasi (narasi relief, eksibisi relief, dll). • <i>Media Promotion & Placement</i> • Audiovisual • Digital library (cloud, etc.) • Merchandising

RENCANA LOKASI

Sub Tema BToC	Nama Desa
Waluku Cultivating Civilization	Desa Karangrejo
Body and Soul	Desa Majaksingi, Desa Wringin Putih
Skilled Hands	Desa Karanganyar
Sudhana Manohara: the Eternal Love Story	Desa Wanurejo, Desa Tuk Songo
Jātaka Fable Stories	Desa Kembang Limus, Desa Ngargogondo
Tropical Flora's Wonderland	Desa Kenalan, Desa Giri Tengah, Desa Bigaran, Desa Giri Purno, Desa Ngadiharjo
Walking with the Stars	Desa Kenalan (Bukit Gondopuwangi), Desa Giri Tengah
Journey of the Stones	Desa Sambeng, Desa Ngargogondo
Music and Rhyme	Desa Wanurejo, Desa Tuk Songo

WALUKU : CULTIVATING CIVILIZATION

Pasas			Lokasi
- Wisatawan Internasional - Wisatawan Domestik			Desa Karangrejo
Segmen Keluarga, Sekolah	Wisatawan Rombongan	Umum, Wisata	

Trail *Waluku: Cultivating Civilization* berdasar pada narasi pengembangan peradaban tradisi agrikultur.

Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk mengalami rangkaian proses menanam padi di sawah dan mendapatkan narasi mengenai perkembangan tradisi tanam, rasi bintang, perubahan musim dan astronomi.

Aktivitas dalam perjalanan tematik ini meliputi;

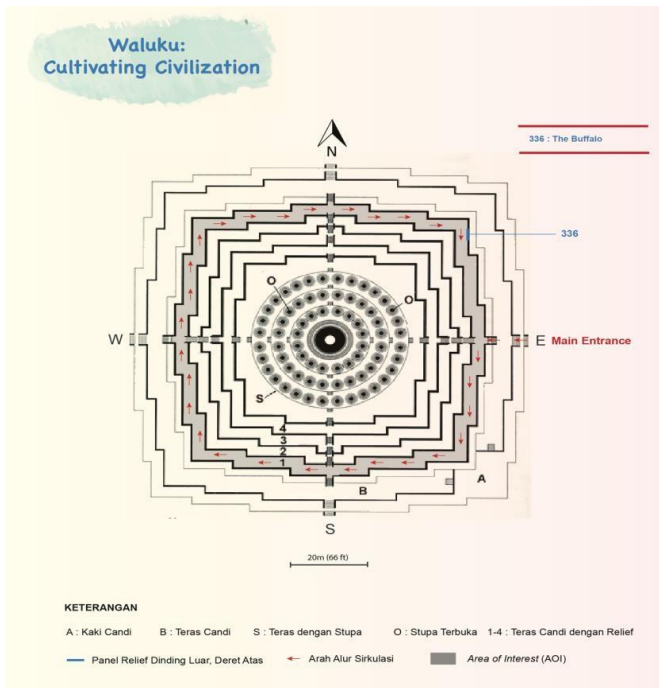
1. Kirab Budaya - Prosesi menanam di sawah
2. Menanam padi di sawah
3. Menangkap belut di sawah
4. Membajak Sawah
5. Menikmati makanan hasil bumi khas persawahan

Sinopsis waluku: cultivating civilization Gambaran harmonisasi sosial budaya dan lingkungan di tengah masyarakat Jawa kuno pada abad ke 9-10 terpeta di berbagai panel relief yang ada di Candi Borobudur. Mengacu pada interpretasi panel yang bercerita tentang peradaban dan kehidupan masyarakat Jawa pada masa kepemimpinan Wangsa Syailendra.

Kata Waluku berasal dari bahasa Jawa yang berarti **bajak**. *Waluku: Cultivating Civilization* sebagai deskripsi untuk mengantar perjalanan ini dengan narasi-narasi yang berasal dari relief tentang tradisi bertani dipadukan dengan pemanfaatan hewan- hewan bertani dan transportasi pada kala itu.

Menegaskan bahwa pada setiap peradaban dan pembangunan dimulai dengan tradisi agrikulturnya, mengacu pada ilmu astronomi, rasi bintang dipergunakan untuk menandai perubahan musim, seiring dengan rotasi bumi yang mengelilingi matahari.

Relief Panel JATAKA No. 336



Rancangan aktivitas dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif. Aktivitas tematik trail *Waluku* meliputi: Kirab Budaya - Prosesi menanam di sawah, Menanam padi di sawah, Menangkap belut di sawah, Membajak Sawah, Menikmati makanan hasil bumi khas persawahan



SUDHANA MANOHARA: THE ETERNAL LOVE STORY

Pasar	Lokasi
• Wisatawan Internasional • Wisatawan Domestik	• Desa Wanurejo • Desa Wringin Putih
Segmen Wisatawan Pasangan, honeymooners, umum.	

Trail *Sudhana Manohara* berdasar pada narasi panel teras I Candi Borobudur, yang bercerita mengenai perjuangan cinta seorang pangeran bernama Sudhana dengan putri Kinnari bernama Manohara. Keduanya harus berhadapan dengan banyak sekali cobaan hingga akhirnya dapat bersatu kembali.

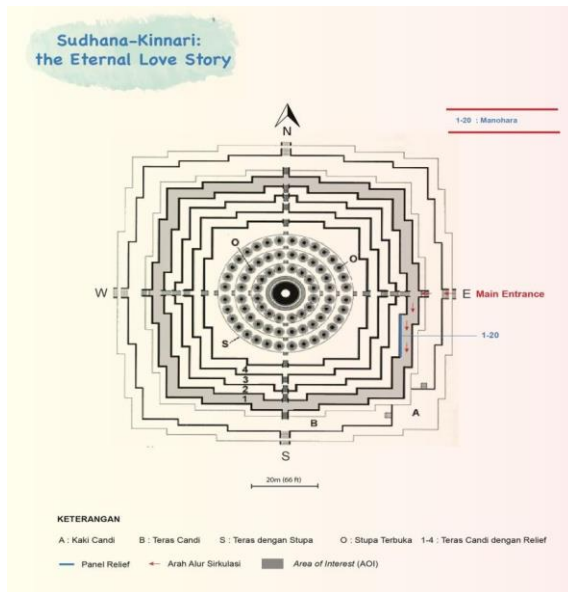
Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk mengalami rangkaian aktivitas kebersamaan dan membangun kedekatan yang dimanjakan dengan nuansa romantika. Para wisatawan akan mendapatkan narasi Sudhana Manohara.

Aktivitas dalam perjalanan tematik ini meliputi :Menonton Epos Sudhana Manohara + *romantic dinner*, Bersepeda mengelilingi kawasan candi, Belajar Menari dan gamelan, Melukis Batu tanda cinta abadi.

Sinopsis *Sudhana Manohara: the Eternal Love Story* Candi Borobudur sejatinya menyimpan pula kisah cinta terbaik sepanjang masa yang disampaikan melalui panel-panel di Teras I. Bercerita mengenai perjuangan cinta seorang pangeran dari negeri Panchala yang bernama Sudhana dengan putri Manohara bernama Manohara. Keduanya harus berhadapan dengan banyak sekali cobaan hingga akhirnya dapat bersatu kembali.

Ia tidak sekedar menggambarkan dua sejoli yang tengah kasmaran, namun menekankan pada hubungan romantik yang sifatnya spiritual pula. Melalui trail *Sudhana Manohara* ini, pengunjung akan diajak untuk mengeksplorasi kisah cinta abadi yang terukir pada Candi Borobudur.

Selain itu, dalam tematik ini, juga diceritakan mitos Nini Brayut yang berhubungan dengan kesuburan dan juga panel di Candi Mendut dan Pawon yang bercerita tentang bahtera rumah tangga dan keluarga. Narasi penceritaan terbagi menjadi 4 babak, pertemuan; perpisahan, perjuangan, pertemuan kembali Panel Relief Lalitavistara



Rancangan aktivitas dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif. Aktivitas tematik trail Sudhana Kinnari meliputi: Menonton Epos Sudhana Manohara+ *romantic dinner*, Bersepeda mengelilingi kawasan candi, Belajar Menari dan gamelan, Melukis Batu tanda cinta abadi

Jātaka Fable Stories

Pasar	Lokasi
• Wisatawan Internasional • Wisatawan Domestik	• Desa Ngargogondo • Desa Kembanglimus
<i>Segmen Wisatawan</i> anak-anak, keluarga, wisata sekolah	

Jātaka Fable Stories berdasar pada narasi panel Jataka, yang bercerita mengenai kehidupan masa lalu Sidharta Gautama sebelum dilahirkan sebagai Sidharta Gautama. Cerita-cerita Jataka berisi ajaran moral melalui kisah pendek dan mayoritas bersifat fabel (cerita-cerita hewan). Tema perjalanan ini berpusat pada cerita Jataka, dan didominasi oleh pertunjukan musical.

Tema perjalanan ini bersifat inklusif dan dirancang dapat diakses oleh semua anak (secara khusus) dan kalangan secara umum. Tema perjalanan ini dapat diakses oleh tunanetra, tunadaksa dan tunarungu.

Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk menyelami ajaran moral dengan cara hiburan.

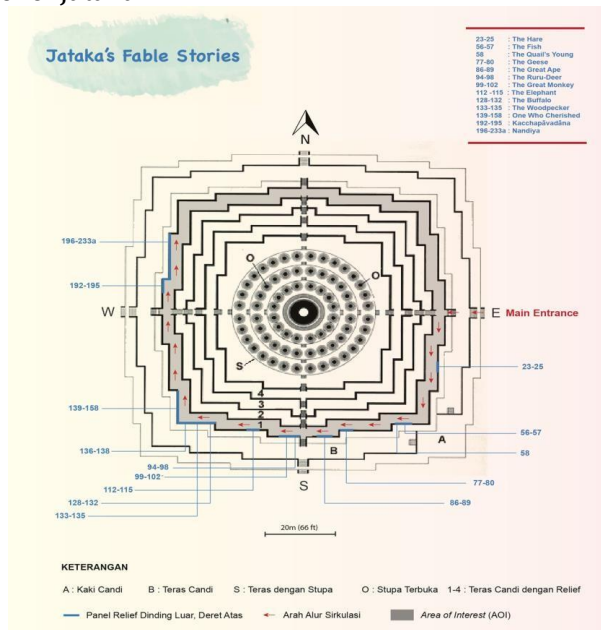
Aktivitas dalam perjalanan tematik ini meliputi;

1. Menonton pertunjukan Jataka
2. Melukis/Membuat gerabah

Sinopsis Jātaka Fable Stories Keberadaan relief-relief Jātaka berisi ajaran-ajaran moral dan kebajikan lewat kisah-kisah fabel (cerita binatang) merupakan salah satu potensi daya tarik Candi Borobudur. Selain menjadi acuan ajaran moral, penggambaran hewan-hewan dalam relief Jātaka juga menjadi *database* atas kekayaan keanekaragaman hayati asli Indonesia dari masa lalu.

Di Candi Borobudur, relief Jātaka memiliki puluhan kisah. Dari 34 kisah Jataka yang telah teridentifikasi, *trail Jātaka Fable Stories* ini akan mengangkat 13 fabel diantaranya. Kisah-kisah yang dipilih, diramu dengan menggabungkan berbagai referensi versi Jātaka dan modifikasi secara kontekstual dalam penceritaan ramah anak, tanpa menghilangkan esensi moral cerita yang termaktub di dalamnya. Selain itu, kisah-kisah ini juga hendak meneruskan ciri khas pantun sebagai akhir pada setiap ceritanya.

Panel Relief Jātaka



Sinopsis Jātaka Fable Stories Cerita fabel yang diangkat untuk *Jātaka Fable Stories* ini disesuaikan dengan rangkaian panel relief Jātaka yang terdapat di Candi Borobudur, antara lain sebagai berikut:

No.	Kitab Jātaka	Judul Cerita	Tokoh Hewan Utama	Ajaran Moral/ Kebajikan	Kode Panel
1	Sasa Jātaka	Kelinci Sasa yang Berderma	Kelinci	Pengorbanan	23-25
2	Vartaka- Sakuna Jātaka	Burung Puyuh yang Bijaksana dan Penuh Kebenaran	Burung Puyuh	Kebenaran	58
3	Mahahamsa Jātaka	Angsa Emas dan Kesetiaan	Angsa	Kesetiaan	77-80
4	Mahakapi Jātaka Vol. 5	Kera Agung dan Petani Malang	Kera Agung	Empati	86-89
5	Ruru Jātaka	Ruru Rusa Penuh Kasih	Rusa	Simpati dan Balas Budi	94-98
6	Mahakapi Jātaka Vol. 3	Raja Monyet Sang Pelindung Yang Berani	Raja Monyet	Melindungi dan Pengorbanan	99-102
7	Hasti Jātaka - Haribhaṭṭa Jātaka No. 19	Gajah Yang Menyelamatkan an Manusia	Gajah	Pengorbanan bagi Orang Lain	112-115
8	Mahisha Jātaka	Kerbau Yang Sabar	Kerbau	Kesabaran	128-132
9	Javasakuna Jātaka	Burung Pelatuk Yang Baik Hati	Burung Pelatuk	Menolong tanpa pamrih	133-135
10	Sigala Jātaka	Anjing Hutan Yang Jatuh Cinta	Anjing Hutan	Tinggi Hati	136-138
11	Matiposaka Jātaka	Anak Gajah Yang Menyayangi Ibunya	Anak Gajah	Sayang Orangtua	139-158
12	Kacchapava dana Jātaka	Penyu Raksasa Berjati Mulia	Penyu	Penyelamatan	192-195
13	Cula Na ndiya	Monyet Nandiya dan Pemburu	Monyet	Perilaku Baik Berbuah Baik	196-200

Rancangan aktivitas dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif. Aktivitas tematik trail Jātaka Fable Stories meliputi: Menonton Pertunjukan Jataka (satu jam dengan 4 cerita) dan Aktivitas permainan dan kesenian tambahan : melukis dengan tangan, mencetak gerabah binatang.

THE JOURNEY OF THE STONES

Pasar	Lokasi
• Wisatawan Internasional • Wisatawan Domestik	• Desa Sambeng • Desa Ngargogondo
<i>Segmen Wisatawan</i> Umum, Keluarga, Rombongan Wisata Sekolah	

The Journey of The Stones berdasar pada narasi rekonstruksi Borobudur.

Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk mengalami rangkaian perjalanan pembangunan borobudur melalui perpindahan batu dan proses pemahatan. Para wisatawan akan mendapatkan narasi tentang pembangunan borobudur dan arsitektur yang unik di Borobudur.

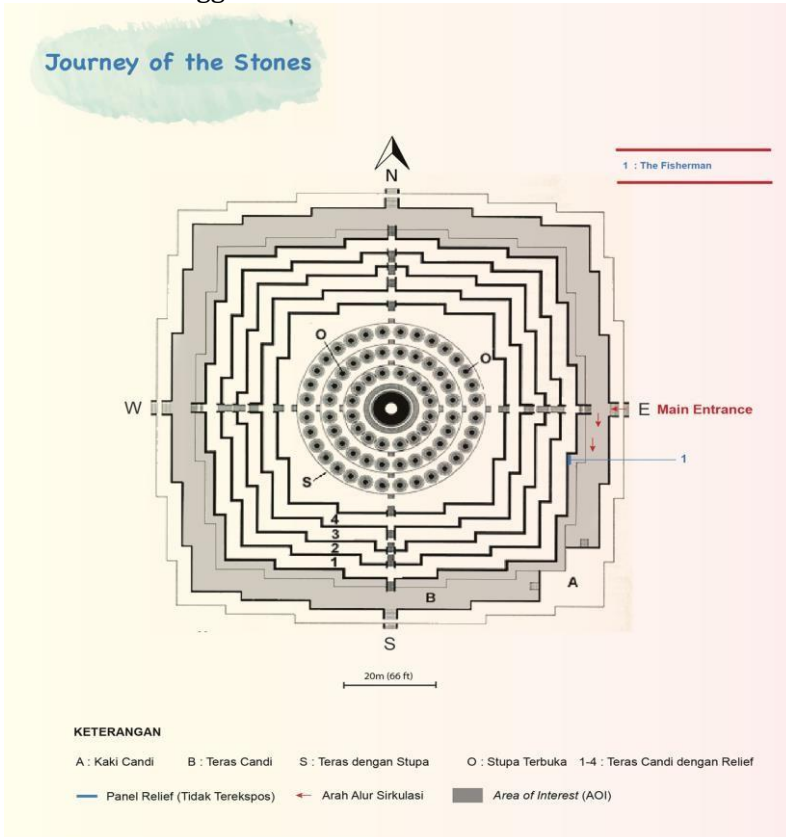
Aktivitas dalam perjalanan tematik ini meliputi : Menelusuri sungai menggunakan *getek*, Menangkap ikan, Menyusuri jalanan menggunakan VW terbuka, Memahat Batu /Mencetak Relief

Sinopsis Journey of the Stones Candi Borobudur merekam teknologi pembangunan *mega-monument* dari masa lampau jauh sebelum pencakar langit dibangun oleh bangsa Barat. Sistem *interlock* yang digunakan dalam membangun struktur Candi Borobudur memungkinkan batuan-batuan andesit dengan berat jutaan ton disusun tanpa bantuan semen ataupun paku.

Proses *interlock* ini menyerupai filosofi mudra atau gerakan tangan *Dharmacakramudra* yang menyatukan antara ibu jari dan telunjuk kedua tangan untuk mengunci sebuah lingkaran.

Topomin nama desa di sekitar Candi Borobudur memiliki asal usul yang berkaitan dengan proses pemindahan batuan tersebut.

Interpretasi panel relief Candi Borobudur yang diangkat dalam tema *Journey of the Stones* ini adalah panel kisah nelayan yang berada di relief Karmawibhangga.



Rancangan aktivitas Dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif.

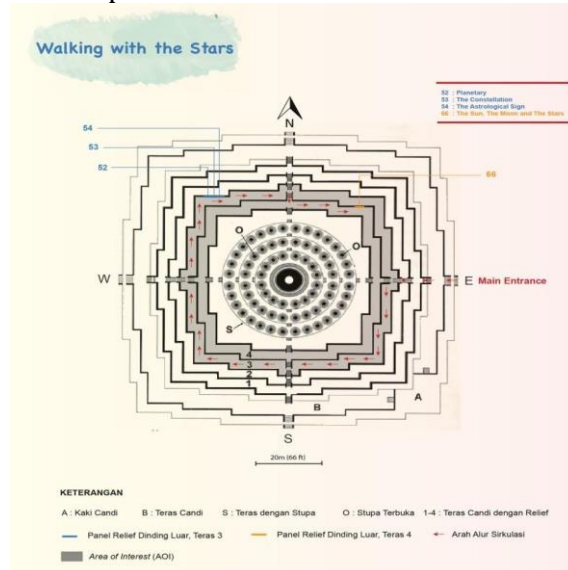
WALKING WITH THE STARS

Pasar	Lokasi
• Wisatawan Internasional • Wisatawan Domestik • Segmen Wisatawan • Umum, Keluarga.	• Desa Kenalan • Desa Giri Tengah

Sinopsis Walking with the Stars Candi Borobudur secara arsitektural ditemukan tidak semata berfungsi sebagai penanda musim namun juga jam, hari, dan arah mata-angin. Integrasi ilmu perbintangan yang berperan dalam perhitungan waktu serta berperan dalam budaya masyarakat dapat diceritakan melalui penelusuran pemahaman astronomi kuno, astro-arkeologi, dan etnoastronomi.

Sejumlah relief di Candi Borobudur menandakan benda- benda langit yang dapat menggambarkan kecermatan atas ilmu perbintangan masyarakat pada zaman itu.

Di pagar langkan lorong ke 4 sisi utara Candi Borobudur sebagai contoh, memiliki gambaran matahari dan bulan sabit yang mengapit 7 bulatan kecil. Tujuh bulatan kecil ini diduga sebagai rasi bintang Ursa Mayor dengan 7 bintang utama yang menandakan arah utara. Selain relief ini memberikan gambaran atas pemahaman perbintangan, ia juga bisa menandakan kecermatan mata angin dengan meletakan pertanda utara di sisi utara Borobudur.



Rancangan aktivitas Dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk

mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif. Aktivitas tematik trail *Walking with the Stars* meliputi: Tracking, Berkemah, Api Unggun + Membakar Ubi/Jagung, Mengamati Langit dan Bintang, Permainan Penanggalan

TROPICAL FLORA'S WONDERLAND

Pasar	Lokasi
• Wisatawan Internasional • Wisatawan Domestik • Segmen Wisatawan • Umum, Keluarga, Pecinta alam	• Desa Kenalan • Desa Bigaran • Desa Giripurno • Desa Ngadiharjo

Trail *Flora's Wonderland* berdasar pada narasi dan hasil penelitian akan diversitas vegetatif di relief candi Borobudur.

Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk mengalami rangkaian perjalanan identifikasi flora yang ditemukan di relief melalui tualang tracking hutan dan cerita mengenai flora di Kawasan Borobudur. Para wisatawan akan mendapatkan narasi tentang keberagaman tumbuhan, hasil pengolahan tanaman dan menikmati panorama di area Borobudur.

Aktivitas dalam perjalanan tematik ini meliputi;

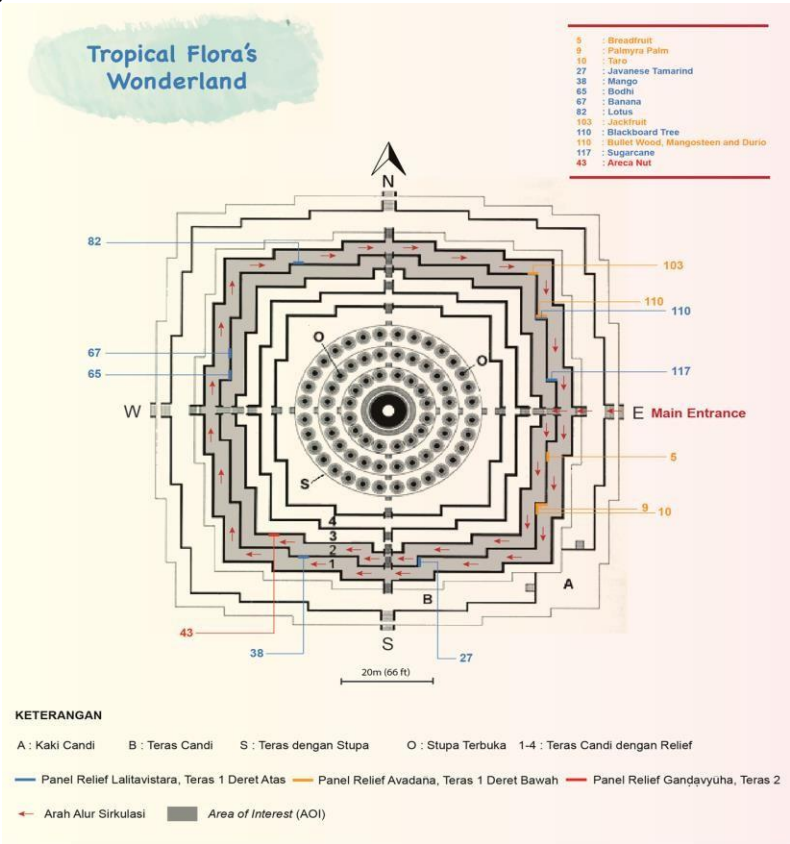
1. Tracking hutan
2. Identifikasi Tanaman
3. Menikmati makanan tradisional dari tanaman

Sinopsis Tropical Flora's Wonderland Candi Borobudur berpotensi menjadi laboratorium keanekaragaman hayati yang amat berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan bangsa.

Terdapat dua kajian yang telah dihasilkan, yakni oleh Balai Konservasi Borobudur (BKB) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / LIPI (2018) yang menghasilkan sebuah direktori mengenai aneka flora yang ada pada relief Candi Borobudur. Usaha yang telah dirintis ini hendaknya dapat dimanfaatkan dan dielaborasi untuk menciptakan narasi biodiversitas Indonesia pada masa lalu, masa kini dan gambarannya di masa yang akan datang.

Kekhasan ini terwakili oleh Candi Borobudur, sebab ia merupakan monumen bersejarah tertua di tanah air yang merekam keanekaragaman hayati dalam bentuk visual.

Panel Relief Relief *Lalitavistara* pada deret atas yang terletak di teras 1, *Avadhana* pada deret bawah yang terletak di teras 1, serta *Gandavyuha* yang terletak di teras 2.



Rancangan aktivitas Dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif. Aktivitas tematik trail Tropical Flora's Wonderland meliputi:Tracking hutan, Identifikasi Tanaman, Menikmati makanan tradisional dari tanaman

MUSIC AND RHYME

Pasar	Lokasi
- Wisatawan Internasional - Wisatawan Domestik <i>Segmen Wisatawan</i> - Umum, Keluarga.	- Desa Wanurejo - Desa Tuk Songo

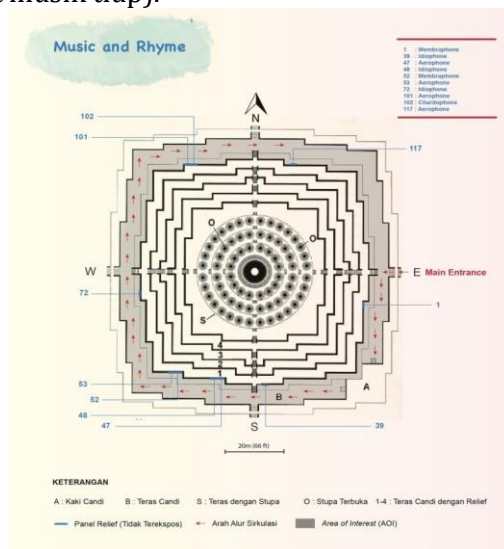
Trail *Music and Rhyme* berdasar pada bukti relief atas alat-alat musik yang terpahat di candi Borobudur.

Tema perjalanan ini akan mengajak wisatawan untuk mengalami rangkaian pengenalan atas alat-alat musik nusantara yang terpahat di candi Borobudur. Para wisatawan akan mendapatkan narasi tentang keragaman suara dengan jenis bahan alat musik maupun jenis-jenis musik tradisional.

Aktivitas dalam perjalanan tematik ini meliputi Workshop music

Sinopsis *Music and Rhyme* Terdapat sepuluh panil pada relief cerita Karmawibhanga yang memuat gambaran tentang berbagai instrumen musik (waditra). Relief itu terbentang dari panel 1, 39, 47, 48, 52, 53, 70, 101, 102, dan 117.

Kesepuluh relief tersebut terdapat penggambaran mengenai penggunaan empat jenis alat musik yaitu jenis *idiophone* (kentongan dan kerincingan), *membraphone* (gendang, kentingan), *chordophone* (alat musik dawai/senar petik dan gesek), dan jenis alat musik *aerophone* (alat musik tiup).



Rancangan aktivitas Dalam rangka meningkatkan pengalaman perjalanan tematik, maka medium interpretasi narasi untuk mendukung pengalaman wisatawan disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang distingtif. Aktivitas tematik trail *Music and Rhyme* meliputi workshop musik.

Pengembangan Interpretasi
Pengembangan Interpretasi BToC

Interpretasi Personal	Interpretasi Non Personal
● <i>Storyteller</i> (Penutur Cerita) ● Pemandu Aktivitas ● Kostum	● <i>Activity Book</i> ● <i>Signage</i> Tematik dan Kawasan ● Papan Informasi (narasi relief, eksibisi relief, dll). ● <i>Media Promotion & Placement</i> ● Audiovisual ● Digital library (cloud, etc.) ● Merchandising

Interpretasi Personal

Storyteller & pemandu aktivitas lokal untuk menjadi penutur cerita (*storyteller*) yang dapat menguasai narasi terkait dengan tematik trail di masing-masing tema.

Contoh pada Waluku: Cultivating Civilization, seorang storyteller dan pemandu aktivitas menguasai penceritaan antara lain tentang proses menanam padi di sawah, tradisi dan budaya agrikultur masyarakat Jawa, komoditas jenis-jenis sawah/ladang yang dapat digunakan untuk bercocok tanam, narasi tentang perkembangan tradisi agrikultur, *pranata wangsa* dan rasi bintang.

Serta pengetahuan terkait hal-hal pendukung aktivitas lainnya, seperti pemaknaan kirab/arak-arakan gunung, jenis-jenis makanan/jajanan tradisional yang disuguhkan.

Medium interpretasi personal yang dapat digunakan adalah kostum yang dikenakan baik oleh seorang pencerita dan juga wisatawan yang hadir yang menggambarkan sosok petani tradisional dengan pakaian khas nya, seperti sorjan, topi caping, balutan jarik untuk perempuan, dan celana komprang untuk laki-laki.

Interpretasi Non-Personal

Perjalanan tematik BToC perlu didorong dengan berbagai bentuk media interpretasi non personal, untuk disesuaikan dengan bentuk aktivitas perjalanan tematik yang spesifik bertujuan memberikan kesan, impresi dan rasa yang *distingtif*.

Activity Book Perjalanan Tematik

Buku ini merupakan panduan perjalanan tematik yang berisi informasi rangkaian perjalanan, aktivitas untuk meningkatkan keterlibatan wisatawan dan narasi terkait perjalanan tematik tersebut.

Perjalanan BToC banyak didasarkan dari panel relief borobudur, dengan demikian alat bantu penyangga narasi perjalanan tematik ini, membutuhkan eksibisi gambar relief yang terkait dengan pengembangan tema. Gambar relief ini dapat diletakan dalam buku aktivitas tematik trail.

Interpretasi Non-Personal

Produksi signage dan media informasi mengikuti nuansa nuansa yang ingin dibangun dalam setiap tema.

Contoh dalam tema Waluku: Cultivating Civilization

- *signage* tematik di area yang telah ditata; yang menunjukkan peta area aktivitas, papan edukatif peralatan persawahan tradisional, rasi bintang orion, dan lain sebagainya.
- *signage* kawasan yang dapat berupa petunjuk menuju ke lokasi tema *Waluku: Cultivating Civilization*, ruang ganti, toilet, parkir, ruang laktasi, ruang informasi, dan lain sebagainya.

Interpretasi Non-Personal Merchandising merupakan bagian dari promosi dan marketing serta peningkatan keterlibatan wisatawan dengan tematik trail. Merchandising dalam tematik Waluku: Cultivating Civilization dapat berupa souvenir seperti: Kaos Tematik, Gerabah Kelinci, Miniatur Gerobak Sapi, Baju Tradisional, Tas anyaman dst-nya. Pengembangan Jangka Panjang pada Pengembangan medium interpretasi narasi Waluku : Cultivating Civilization dapat dikembangkan kedepannya dengan berbagai perluasan interpretasi kultivasi yang mengakar di area Borobudur sehingga menciptakan arena pengumpulan pengetahuan agrikultur dan juga turut mengembangkan perekonomian masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan medium interpretasi Waluku ke depan dapat ditambahkan dengan perkebunan dan pembibitan tanaman buah, sayur, ubi dan rempah yang menjadi bagian dari peradaban area Borobudur sejak dulu. Hal ini juga dapat disokong dengan arena makan di perkebunan yang menyajikan masakan tradisional serta organik dari area setempat.

Selain itu, yang tidak dapat terhindarkan adalah pemanfaatan teknologi yang perlu diintegrasikan dalam perjalanan tematik. Hal ini dapat dimulai dengan sistem informasi

cloud, dimana tanaman dan narasi didigitalisasikan dan dapat diakses melalui *barcode/scanner* pada tiap papan informasi.

Gambar 7.2 restoran bernuansa perkebunan hanya sebagai ilustrasi



Gambar 7.3 digitalisasi informasi/narasi di area destinasi hanya sebagai ilustrasi.



E. Evaluasi

1. Uraikanlah bagaimana pengertian otonomi daerah serta dasar hukumnya!
2. Jelaskan faktor pendorong perkembangan pariwisata!
3. Jelaskan program wisata *Borobudur Trail of Civilization* yang di Luncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB 8

Kebijakan Pemerintah pada Wisata Candi Borobudur

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian kedelapan menjelaskan kebijakan pemerintah pada obyek wisata Candi Borobudur terdiri dari kebijakan pemerintah, pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur dan dasar hukum pengelolaan wisata Candi Borobudur. Sehingga, mahasiswa mampu memahami pengelolaan Obyek Wisata Candi Borobudur.

B. Kebijakan Pemerintah pada Wisata Candi Borobudur

Kebijakan tidak dapat dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik, yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta budaya lokal, merupakan variabel yang lain. Maka harus ada konteks yang memicu lahirnya kebijakan publik.

Kebijaksanaan merupakan keputusan yang bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kasuistis sering terjadi dalam pergaulan, seperti seorang meminta kebijaksanaan kepada pejabat untuk memperlakukan secara istimewa atau secara istimewa tidak diperlakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah atau lembaga.

Kebijakan dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok, yaitu kebijakan merupakan praktik sosial dan kebijakan yang ditimbulkan untuk mendamaikan. Kebijakan merupakan praktik sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan diperjuangkan pula untuk kepentingan masyarakat. Praktik sosial merupakan persoalan atau problema masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu. Isu inilah yang selanjutnya dapat menjadi kebijakan.

Kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu, pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini terdapat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan. Pada dimensi subjek, kebijakan publik adalah dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah merupakan kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuinya. Pada dimensi objek, kebijakan publik merupakan problema atau kepentingan masyarakat. Pada dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan adalah masyarakat.

Kawasan Borobudur dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan pariwisata andalan nasional. Pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur. Borobudur beserta Yogyakarta, Dieng, Sangiran-Solo, Karimunjawa-Semarang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Pemerintah menetapkan target kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 11 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019 di wilayah ini. Kunjungan di Candi Borobudur sendiri pada saat ini sekitar 3-4 juta wisatawan, 500 ribu diantaranya adalah wisatawan asing. (Rabiatul Adawiyah, dkk. 2017)

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program antara lain: pembentukan Badan Otorita Borobudur, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), program pembangunan jalan TOL Bandara NYIA-Semarang melewati Kabupaten Magelang, dan pengaktifan kembali rel kereta lama.

Strategi keberhasilan kawasan Borobudur adalah pengembangan infrastruktur menuju objek-objek wisata lainnya yang terdapat di kawasan Borobudur, termasuk Dieng. Kawasan ini akan dikelola oleh Badan Otorita Borobudur (BOB) yang dibentuk sebagai pengelola kawasan terintegrasi, akan bertanggungjawab dalam koordinasi wisata antara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Wilayah kerja BOB meliputi empat KSPN, yaitu Borobudur-Yogya, Dieng, Solo-Sangiran dan Semarang-Karimunjawa. Badan ini diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 19 Juli 2017. BOB akan menempati lahan 300 hektar (lahan perhutani) di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

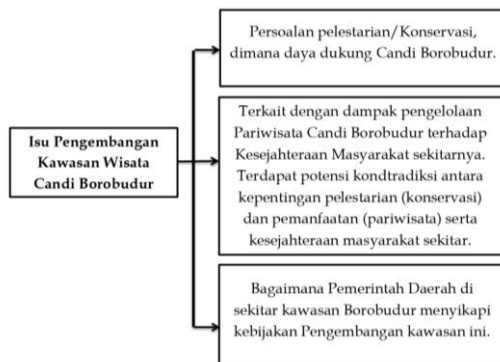
New Yogyakarta International Airport (NYIA) berada di Kulonprogo, dibangun pada tahun 2017–2019, dan akan beroperasi mulai tahun 2020. Jalan TOL Bandara NYIA–Magelang–Semarang juga akan dibangun melewati sisi timur kawasan Borobudur. Jalur keretaapi Yogyakarta–Magelang juga sudah rencana direncanakan akan diaktivasi kembali. Jalan TOL Semarang–Yogya juga akan dibangun untuk mempermudah akses Borobudur dari Kota Semarang. Langkah-langkah tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka mempermudah akses bagi wisatawan menuju Borobudur dan sekitarnya dari berbagai arah. (Radjasa Mu'tasim, dkk. 2013)

Masyarakat maupun pemerintah daerah di sekitar kawasan Borobudur memberikan tanggapan cukup beragam. Secara umum mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur, namun terdapat perbedaan dalam beberapa hal seperti menyikapi pembangunan infrastruktur penunjang, misalnya jalan TOL sebagian mendukung sebagian menolak. Sebagian pemerintah daerah (Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo) menginginkan pembukaan akses transportasi daerah agak terisolir seperti kawasan perbukitan Menoreh.

C. Pengembangan Kawasan Wisata Candi Borobudur

Melihat berbagai kondisi yang ada, setidaknya terdapat 3 isu utama terkait dengan pengembangan kawasan wisata Borobudur ini, khususnya terkait dengan Candi Borobudur.

Bagan 8.1 Isu Pengembangan Kawasan Wisata Candi Borobudur



Jumlah wisatawan yang di Candi Borobudur saat ini melebihi batas kemampuan atau daya tampung candi. Berdasarkan kajian Balai Konservasi Borobudur (BKB) bahwa daya tampung Candi Borobudur hanya 123 orang sekali naik pada saat bersamaan, 528 orang di pelataran, dan 10.308 orang di taman halaman, namun saat ini jumlah wisatawan yang naik jauh melebihi. Diungkapkan oleh Iskandar M Siregar (Kepala Saksi Konservasi BKB), "carrying capacity di Candi Borobudur sebanyak 123 orang dalam satu waktu. Sedangkan kapasitas ruang yang ideal untuk halaman candi sebanyak 528 orang dan di area taman sebanyak 10.308 orang". Terdapat indikasi kerusakan, terutama di bagian tangga mengalami keausan akibat aktivitas wisata. Pada sisi lain BKB telah mentargetkan bahwa Borobudur akan bertahan 1000 tahun lagi.

Menurut hasil kajian Yanuardi, potensi kerusakan Candi Borobudur disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah kerusakan akibat faktor biotis dan abiotis. Faktor biotis karena adanya jasad makroskopis pada bebatuan, faktor abiotis terdiri dari air, suhu udara, kelembaban udara, penyinaran, penguapan, dan polusi udara. Kedua adalah karena vandalisme, seperti corat-coret, goresan, pemindahan, perusakan, dan pencurian. Hal ini tentu menjadi persoalan ketika PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (pengelola wisata candi) yang bergerak di bidang pemanfaatan berkeinginan meningkatkan kunjungan wisata sesuai target pemerintah. (Rama Yudha, Prihadi Nugroho. 2017)

Terkait dengan dampak pengelolaan wisata, keberadaan wisata Borobudur dirasakan belum berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar Candi Borobudur. Pengelolaan wisata candi belum

melibatkan masyarakat atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Antara pengelolaan wisata (oleh PT Taman Wisata) dengan aktifitas masyarakat sekitar masih berjarak, masing-masing berjalan sesuai kepentingannya. Masyarakat merasakan keberadaan wisata candi belum berdampak langsung pada pendapatan mereka. Kebanyakan wisatawan hanya singgah sebentar di Candi Borobudur, kemudian kembali ke Yogyakarta. Belum banyak wisatawan berkunjung ke desa-desa sekitar dan menginap di wilayah Borobudur.

Isu lainnya adalah terpinggirkannya masyarakat sekitar dalam pemanfaatan Borobudur, sebagaimana dinyatakan Nagaoka dalam Kusno, "Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian adalah terpinggirnnya masyarakat oleh desakan arus modal yang gencar menggerus dan menghanyutkan budaya setempat mengikuti arus baru yang masuk. Alasan utama yang diduga menjadi penyebab utama kondisi tersebut terbentuk adalah komersialisasi kawasan pariwisata."

Konsep nilai ruang yaitu ruang kesengajaan, serta ruang keterlibatan dan keterbukaan. Ruang kesenjangan didukung oleh beberapa faktor yaitu sikap apatis masyarakat (kekecewaan relokasi pada tahap pemugaran), tidak adanya konsep pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan dari pemodal luar, rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesenian lokal dan kurangnya sosialisasi tentang konsep pengembangan kawasan. Adapun ruang keterlibatan dan keterbukaan didukung oleh beberapa faktor yaitu potensi wisata yang menarik untuk dikemas, keinginan menikmati nilai ekonomi pariwisata Borobudur, pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara mandiri. (Ramaini. 2012)

Dengan demikian, dibalik adanya kekecewaan masyarakat di sekitar kawasan Borobudur, menyimpan potensi pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya pariwisata harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi (PDRB), ketersediaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan merupakan salah satu pilar pariwisata yang berkelanjutan. Hasil studi UNESCO pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 59 persen wisatawan hanya menghabiskan waktu 1-3 jam di Borobudur, hanya 2 persen yang berkunjung ke pedesaan sekitar, serta minimnya interaksi turis dengan penduduk sekitar.

Borobudur merupakan satu kawasan (*landscap*) yang berbagai pihak memiliki kepentingan didalamnya, yang tidak hanya dilihat sebagai warisan monumen atau bangunan semata, namun menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Pada tahun 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (*World Heritage*) oleh UNESCO.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemanfaatan Borobudur untuk wisata juga seharusnya berorientasi untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan rencana pemerintah mengembangkan kawasan Borobudur, sangat penting dieprsiapkan sistem tata kelola wisata, dampak bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu mempersiapkan skema agar pengembangan kawasan Borobudur ini menghasilkan *multiplier effect* optimal yang positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar Borobudur perlu mempersiapkan strategidan rencana tindak cepat yang yang sistematis dalam menghadapi tantangan tersebut.

D. Dasar Hukum Pengelolaan Wisata Candi Borobudur

Candi Borobudur memiliki beragam nilai baik ekonomi, pendidikan, pusat agama, identitas budaya, identitas budaya bangsa, tempat rekreasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu keberadaannya melibatkan beragam kepentingan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, berbagai pihak menaruh perhatian khusus kepada Candi Borobudur.

Pada tahun 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (*World Heritage*) oleh UNESCO. Kemudian *master plan* untuk pelestarian Borobudur dirintis tahun 2007, dandirekomendasikan agar diciptakan *integrated management system* dalam pemanfaatan dan pelestariannya.

Pada tingkat nasional, Borobudur juga dilindungi dengan regulasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salah satu point penting adalah bahwa pemanfaatan cagar budaya adalah untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui kegiatan pariwisata. (Rani Maswati. 2018)

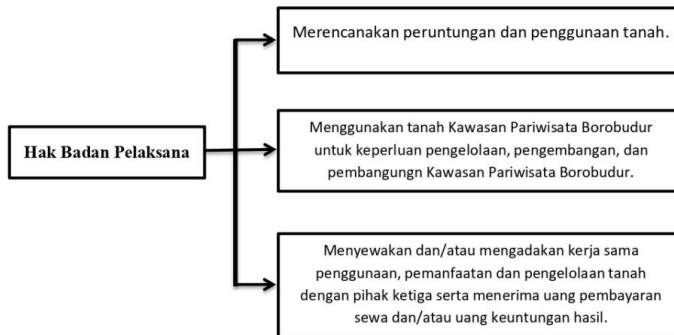
Pada regulasi tersebut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga disebutkan bahwa pengelolaan kawasan cagar budaya difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat, badan pengelola tersebut dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya diterbitkan sebagai arahan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya. Kawasan Borobudur dibagi meliputi SP-1 berada dalam pengelolaan pemerintah pusat dengan radius 5 Km dari pusat candi termasuk Palbapang dan kawasan candi meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo. Kawasan SP-2 berada diluar radius 5 Km dan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai kawasan penyangga. Kawasan situs candi meliputi situs Candi Borobudur, situs Candi Pawon, dan situs Candi Mendut.

Pasal 42 ditegaskan bahwa pengelolaan kawasan Borobudur dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati, dan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya. Adapun peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan Borobudur adalah mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjamin pelestarian kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia. Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan, usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur harus sesuai dengan ketentuan regulasi ini.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Badan ini dibentuk dengan tujuan optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur. Susunan Organisasi Badan Otorita Borobudur terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur, sesuai ketentuan tata ruang dalam Perpres 58 Tahun 2014. (Ratih Sari, dkk. 2013) Pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut meliputi bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan pemukiman, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal, perdagangan, pertanahan dan tata ruang; pariwisata; kehutanan; dan energi dan sumber daya mineral.

Bagan 8.2 Hak Badan Pelaksana



Dengan demikian, Badan Otorita Borobudur, terutama Badan Pelaksana akan melakukan kerja sebagian penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di wilayah kawasan inti (SP1). Pengelolaan lingkungan dan kawasan, pemberian izin, pemanfaatan dan pemeliharaan candi dan kawasan inti berada dibawah kendali badan ini. Keberadaan badan otorita ini berkonsekuensi pada pengelolaan kawasanwisata secara umum.

Pada saat ini masih tahap persiapan dan transisi, tentu saja konsep pengelolaan yang akan dijalankan harus tetap mengedepankan sinergi antara pelestarian, pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa proyek strategis juga sedang berjalan seperti NewYogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, Jalan Tol

Bandara NYIA–Magelang–Semarang, dan reaktivasi rel kereta, yang tentu akan memberikan dampak pada masyarakat.

E. Evaluasi

1. Bagaimana Pemahaman mahasiswa tentang kebijakan Pemerintah pada wisata Candi Borobudur!
2. Bagaimana Pengembangan kawasan Wisata Candi Borobudur!
3. Sebutkan Dasar Hukum Pengelolaan Wisata Candi Borobudur!

BAB 9

Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Candi Borobudur

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian ke sembilan menjelaskan pemberdayaan masyarakat wilayah Candi Borobudur terdiri dari model pemberdayaan masyarakat. Sehingga, mahasiswa mampu memahami model pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan perubahan pola penghasilan masyarakat sekitar.

B. Modal Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan perkembangan zaman, diplomasi juga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Diplomasi yang dilakukan juga tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi saat ini publik juga memiliki peran. Adanya teknologi yang semakin canggih membuat tren yang banyak dilakukan negara saat ini adalah dengan diplomasi publik. Dengan melakukan diplomasi publik, negara bisa mempromosikan apa potensi yang dimiliki dan meningkatkan citra baik kepada dunia. (Ridwan, M. 2012)

Indonesia, diplomasi publik dijadikan ajang untuk memperkenalkan potensi khususnya budaya dan pariwisata kepada dunia internasional. Adapun pengembangan sektor pariwisata Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”. Dari penjelasan tersebut, cukup jelas bahwa pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu pemasukan devisa negara yang tertinggi. (Riwu Kaho, Josef. 2007)

Dalam mendukung upaya diplomasi publik guna meningkatkan citra Indonesia ke mata dunia, Pemerintah juga meluncurkan nation branding yang menjadi identitas negara dalam melakukan promosi pariwisatanya. Pemerintah meluncurkan brand 'Wonderful Indonesia' pada tahun 2011 dengan menggencarkan potensi pariwisata yang sangat beragam untuk diperkenalkan kepada dunia. Letak geografis yang strategis di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia juga menjadi pendukung kuat potensi pariwisata Indonesia. (Wiratama, H. D 2017)

Letak Indonesia yang strategis tersebut juga menjadikan Indonesia dapat menjadi negara poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo pernah berpidato di Nay Piy Taw Myanmar dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi East Asia Summit (EAS) ke-9 bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Jika diturunkan dalam koridor pariwisata, dapat diartikan sebagai peningkatan pariwisata melalui pariwisata maritim.

Pariwisata maritim Indonesia memang memiliki daya tarik yang beragam dalam perkembangannya sampai tahun 2019, wisatawan mancanegara yang masuk ke negeri kita ini terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah kunjungan tertinggi ada pada tahun 2019 dengan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia sebesar 16.106.954 wisatawan (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun dibanding dengan jumlah kunjungan dengan wisatawan mancanegara di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan keempat. (Rismiati, dkk. 2011)

Urutan pertama yaitu Thailand sebesar 39,8 juta wisatawan pada tahun 2019, disusul Malaysia dan Singapura dengan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 26,1 juta dan 19,1 juta wisatawan. (Risnain, Muh. 2016) Dengan meningkatnya turis asing berbagai negara datang mengunjungi negara kita ini dan perbandingan kunjungan turis mancanegara ke beberapa negara Asia Tenggara, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan jumlah pariwisata yang datang ke Indonesia agar dapat sejajar dengan negara lain. Beberapa cara-cara yang diupayakan pemerintah yaitu melalui promosi nation brand yaitu 'Wonderful Indonesia'. Nation brand ini pertama kali diperkenalkan oleh Kementrian Pariwisata pada tahun 2011 menggantikan brand lamanya yaitu 'Visit Indonesia'.

Balai Konservasi Borobudur (BKB) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam konservasi Candi Borobudur telah melibatkan masyarakat sekitar dalam konservasi. BKB telah melakukan berbagai kajian dengan tema terkait upaya pelestarian Borobudur dengan melibatkan masyarakat, serta melakukan upaya pemeliharaan/pelestarian Candi Borobudur berkelanjutan dengan melibatkan tenaga lokal sebagai tenaga terampil. Tenaga-tenaga terampil yang menjadi tulang punggung pemelihara Candi Borobudur adalah warga-warga lokal yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus.

Dari aspek pemanfaatan, pengelolaan wisata Candi Borobudur dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Taman Wisata Candi. Adapun masyarakat terlibat di dalam aktifitas wisata untuk sektor informal seperti pedagang asongan dan jasa lainnya. Borobudur sebagai aset wisata, memiliki nilai yang cukup kuat, mampu berperan sebagai salah satu objek dan tujuan wisata lokal maupun internasional, mampu menjadi ikon pariwisata, dan hal ini tidak terlepas dari media-media yang berperan sebagai brand yang membentuk, membangun, dan mencipta identitas pada suatu entitas pariwisata. (Riyanto Sofyan. 2012)

Keberadaan wisata Borobudur juga turut menciptakan perubahan pola penghasilan masyarakat sekitar. Penduduk yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian, memiliki kesempatan untuk terlibat dalam usaha jasa wisata, pedagang asongan, maupun kios, dan sarana lainnya. Pada awalnya keberadaan wisata Candi Borobudur yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi memberikan pengaruh pendapatan tambahan bagi masyarakat. Perkembangan selanjutnya banyak masyarakat dari luar kawasan Borobudur yang juga ikut terlibat baik sebagai pedagang asongan, atau membuka kios, bahkan peminta-minta. Sempat tersebar kabar terkait kerawanan di kawasan Borobudur seperti penodongan atau pedagang yang memaksa pengunjung.

Objek wisata ini menjadi salah satu andalan pariwisata Indonesia untuk menarik minat wisatawan asing. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Borobudur mayoritas dari Eropa 56 persen, Amerika 16 persen, dominan usia muda antara 19-29 tahun, berpendidikan tinggi, mayoritas bukan pengunjung berulang atau hanya sekali saja, rata-rata kunjungan 2,84 hari yang masuk kategori rendah.

Menurut laporan UNESCO, bahwa sekitar 59 persen wisatawan hanya berkunjung selama 1-3 jam di candi, dan hanya 2 persen yang berkeliling di pedesaan sekitar Borobudur. Dengan demikian, interaksi antara wisatawan dan penduduk sekitar juga minim. Beberapa kondisi seperti ketidaknyamanan, pedagang asongan yang menjual barang berkualitas rendah, menimbulkan image negatif terhadap Borobudur secara umum, sehingga menurunkan minat wisatawan mengeksplorasi kawasan Borobudur. Di sisi lain pemerintah memiliki agenda pengembangan kawasan Borobudur sebagai salah satu “Bali baru”. Oleh sebab itu perlu beberapa perbaikan.

Pengembangan kawasan Borobudur memiliki potensi kontradiksi antara pelestarian dan pemanfaatan, serta masalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemaknaan terhadap Candi Borobudur yang cenderung sempit. Kawasan Candi Borobudur cenderung dianggap berbentuk fisik monumen atau bangunan, tanpa mempertimbangkan hubungan dengan *landscape* (lingkungan) sekitarnya.

Candi Borobudur dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan lingkungan sekitar, termasuk masyarakat dan budayanya. Akibatnya aktivitas wisata hanya terpusat pada candi sebagai monumen fisik.

Hal tersebut tentu harus ada inovasi terkait kunjungan wisatawan, di satu sisi segi komersialisasi dan pelestarian harus dapat sejalan dengan dua kepentingan tersebut. Maka perlu adanya daerah penyangga Kawasan Wisata Borobudur. Dengan demikian agar sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Pada Bab II bagian kesatu Pasal 6 menyebutkan tujuan penataan ruang kawasan Borobudur untuk mewujudkan tata ruang kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya pelestarian kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Pada sisi lain, pemerintah menargetkan kunjungan 2 juta wisatawan asing dan 11 juta wisatawan domestik. Pada sisi lain juga daya dukung candi sangat terbatas, ditambah kerusakan candi, keausan bebatuan, aksi vandalisme, dan sejenisnya terus terjadi. Selain masalah

teknis di atas, dari aspek manajerial kawasan Borobudur juga belum terdapat sinergi antar stakeholder. Masing- masing memiliki agenda sendiri di dalam mengembangkan konsep wisata Borobudur.

Paradigma baru dalam pengelolaan wisata Borobudur dimana mulai bergeser dari berpusat pada monumen fisik candi menuju pada konsep Borobudur sebagai kawasan *landscape* yang meliputi lingkungan, masyarakat dan budayanya. Perlu adanya perubahan makna kawasan Borobudur yang tidak saja terkait bangunan fisik candi tetapi juga lingkungan masyarakat dan budayanya.

Candi Borobudur tidak lagi dimaknai situs atau bangunan yang terpisah dari pembangunan dan terisolasi dari perubahan yang terjadi, serta masyarakatnya. Upaya pelestarian dan pemanfaatan sangat terkait dengan isu-isu sosial, ekonomi, serta budaya di sekitarnya. Selama ini pemanfaatan Borobudur sebagai wisata hanya melibatkan pihak tertentu (PT TWC), kedepan perlu upaya memperluas cakupan dengan menempatkan lebih banyak aktor kepentingan dalam pengelolaannya.

Maka, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pengelolaan dengan pendekatan partisipatif, dimana mengutamakan keterlibatan masyarakat sekitar agar memiliki peran lebih besar, kepedulian, serta manfaat bagi kehidupan mereka. Candi Borobudur merupakan milik bersama, dimana banyak kepentingan terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan haruslah utuh, Borobudur sebagai sebuah *landscape*.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi hasil pertemuan 6th *International Experts Meeting on Borobudur 2013* bahwa Borobudur harus dipandang sebagai sebuah *landscape* dimana masyarakat masuk di dalamnya, masyarakat dengan budayanya sebagai bagian warisan dunia. Pariwisata di kawasan Borobudur juga harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan menjadi salah satu pilar pariwisata yang berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah memperluas kegiatan wisata, tidak hanya berpusat pada Candi Borobudur, namun menciptakan objek dan atraksi lain di sekitarnya, antara lain dengan mengembangkan wisata pedesaan sekitar Borobudur. Hal ini juga

memiliki tujuan memperpanjang lama tinggal di Borobudur dengan mengoptimalkan kawasan wisata pedesaan. (Sari, dkk. 2014)

Oleh sebab itu, pengembangan kawasan Borobudur perlu dibarengi dengan upaya mengubah mindset wisatawan bahwa berwisata Borobudur adalah berkunjung ke Kawasan Borobudur secara keseluruhan, bukan hanya ke candi, namun ke lingkungan sekitar. Langkah ini perlu dibarengi dengan penyiapan masyarakat dan lingkungan sekitar agar siap menjadi atraksi wisata yang menarik dan bernilai. Dengan demikian, kontradiksi antara kelestarian dan pemanfaatan bisa diminimalisir melalui perluasan destinasi wisata. Wisata Borobudur adalah berorientasi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkandan mengelola destinasi wisata mereka sendiri.

Pada saat ini memang telah tumbuh kesadaran masyarakat sekitar di beberapa desa untuk merubah mindset wisata Borobudur. Mereka telah melakukan berbagai upaya, terutama menjadikan desa mereka sebagai desa wisata, mendirikan beberapa galeri dan objek seni budaya. Desa wisata tersebut sebagai sebuah upaya agar masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata kawasan Borobudur. Mereka juga telah berupaya melakukan eksplorasi terhadap lingkungan alam, seni, budaya dan berbagai produk sebagai atraksi wisata berbasis pedesaan. Wisata-wisata tersebut juga menyediakan berbagai paket wisata seperti jelajah desa, outbond atau pentas seni. Sebagai desa yang berada di lereng menoreh juga mengeksplorasi potensi *landscape* perbukitan sebagai destinasi wisata. Konsep wisata desa tersebut menjadikan Candi Borobudur sebagai magnet atau ikon wisata, namun atraksi utama wisata justru berada di sekitar Borobudur.

C. Evaluasi

1. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa tentang Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Candi Borobudur!
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam aktifitas wisata untuk sektor informal!

BAB 10

Negara Kesejahteraan dalam Pengaturan Pariwisata di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian kesepuluh menjelaskan negara kesejahteraan dalam pengaturan pariwisata di Indonesia terdiri dari tujuan negara kesejahteraan dan sistem negara kesejahteraan. Sehingga, mahasiswa mampu memahami suatu negara yang memiliki konstitusi dengan prinsip negara kesejahteraan semua norma, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam program pembangunan disertai anggaran pendapatan dan belanja negaradan daerah, berorientasi untuk meningkatkan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya

B. Negara Kesejahteraan

Sejarah dari munculnya negara kesejahteraan pada umumnya dijelaskan dalam tahun yang berbeda-beda. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tersebut menunjukkan tentang munculnya negara kesejahteraan baik dari segi gagasan maupun implementasinya tertuju pada pertengahan abad XX, setelah terjadi *great depression*. Gagasan dari negara kesejahteraan pada awalnya sebagai terminologi yang menunjukkan suatu praktik negara dalam melakukan kebijakan makro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. (Siagian, dkk. 2006)

Gagasan tentang negara kesejahteraan (*welfare state*) sendiri tampil sebagai sebuah *discursive practice* pada dekade tahun 1970-an studi kontemporer tentang negara kesejahteraan modern mendapatkan banyak perhatian, baik dari kalangan sejarawan (*historians*), ilmuwan politik (*political scientists*), dan ilmuwan ilmuwan sosial lainnya (Iron Sarira, 2019).

Implementasi terhadap gagasan tersebut merupakan cerminan dari proses perkembangan demokrasi dan kapitalisme terutama di Eropa, dimana kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari proses negosiasi politik antara artikulasi perjuangan politik kalangan kiri dan kelas pekerja dengan perkembangan formal social kapitalisme. Benturan-benturan antara kelas pekerja dan modal berhasil didamaikan dengan terbangunnya *common platform* penataan negara berbasis *welfare state*. (Sihite, Richard. 2010)

Platform tersebut terwujud dalam berbagai program-program seperti pemenuhan berbagai kebutuhan mendasar manusia (*basi human needs*) oleh negara pada bidang pendidikan, perawatan kesehatan, penyediaan perumahan yang layak, perawatan untuk anak-anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi mereka yang lanjut usia, pengangguran maupun mereka yang memiliki kekurangan fisik. Beberapa program-program negara kesejahteraan telah diakomodasi oleh perkembangan negara di Eropa sejak abad ke-19. (Siagian, dkk. 2006)

Terminologi *Welfare State* pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1941 untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu. (Soekadijo, R.G. 2017) *Welfare State* atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. (Soekanto, dkk. 2017)

Definisi negara kesejahteraan (*welfare state*) sangatlah luas dan beragam. Pada satu sisi definisi negara kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. (Soekadijo. 2017) Pekerjaan adalah sumber pendapatan rakyat, jika negara dapat menyediakan pekerjaan secara penuh maka kemiskinan rakyat akan berkurang dan rakyat akan sejahtera.

Secara etimologis istilah negara kesejahteraan inidapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan jaminan berupa tunjangan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan oleh negara, pensiun atau tunjangan hari tua, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya (*Pass dan Lowes*). Secara singkat, istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang

mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. (Supranto, J. 2017)

Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan, dan kegiatan sosial. (Spillane, James. 2013)

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) pernah diperkenalkan oleh Spicker, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.

Negara kesejahteraan ditunjukkan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. (Spillane, James. 2014)

Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. (Spillane, James. 2014)

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni:

Tabel 10.1. Istilah Kesejahteraan

Istilah Kesejahteraan	
(1) Istilah umum	Sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai
(2) Tinjauan Ekonomi	Sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi);
(3) Tinjauan Kebijakan Sosial	Kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>);
(4) Tinjauan lain	Seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; - Keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; - Kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur). - Kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga - Menjaga anak (yang mencegahnya untuk dapat/bisa bekerja), Karena di beberapa kasus negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah <i>workfare</i>. Hal ini, tampaknya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLST) atau bentuk-bentuk bantuan lain yang lebih bersifat kedermawanan (<i>charity</i>), yakni tidak ada kewajiban atau keharusan bagi penerima untuk bekerja.

Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas. Pemerintah suatu negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara

pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebagai sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan ada juga yang menyebut sebagai anak kandung pergumulan ideologi dari teori sosialisme. Anehnya, praktik kenegaraan konsep negara kesejahteraan ini justru banyak dilakukan dan berkembang di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Pada konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Ketidak sempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan.

Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak warga negara dalam merespon konsekuensi kapitalisme.

Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara yang dimaksud di sini adalah suatu *agency* (alat) yang mengatur suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia.

Negara kesejahteraan menurut Esping-Andersen, bukanlah suatu konsep yang menggunakan pendekatan baku. Negara kesejahteraan pada umumnya diidentikkan dengan ciri-ciri yang mengikutinya yakni pelayanan dan kebijakan sosial yang disediakan oleh negara kepada warganya, seperti pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun,

pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan. Sehingga keduanya antara negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering diidentikkan bersama. Akan tetapi pada dasarnya kuranglah tepat karena kebijakan sosial tidaklah mempunyai relasi biimplikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan dengan tanpa adanya negara kesejahteraan, sedangkan negara kesejahteraan akan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.

Perkembangan suatu konsep negara hukum, mengalami perkembangan dari masa ke masa. Konsep negara hukum klasik atau formal menjadi konsep awal dalam negara hukum. Mengingat kelemahan konsep negara hukum klasik tersebut, paham negara hukum formal tersebut mengalami modifikasi menjadi konsep negara hukum modern yang juga dikenal dengan ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*). (Suhardin, Yohanes. 2017)

Gagasan negara kesejahteraan ini beresonansi dengan pemikir ahli ekonomi dari Inggris, John Maynard Keynes. Menurut Keynes pranata kemanusiaan, terutama negara, mempunyai peranan penting dalam “memutar” kehidupan manusia. Jika manusia dibiarkan “bertarung” dengan manusia lain tanpa ada pranata, yang terjadi adalah kemustahilan setiap upaya manusia itu sendiri.

Negara kesejahteraan secara singkat dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan demokratis yang menempatkan negara sebagai institusi. Juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.

Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) *social citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial. (Triwibowo dkk, 2006) Syarat-syarat ekonomi, sosial, dan

politik tersebut di atas, tidak semua negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan. (Sujamto. 2010)

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam menjalankan sektor kepariwisataan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sektor kepariwisataan adalah adanya regulasi/aturan yang jelas dan memadai. Dengan demikian, dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan melalui sektor Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan pengaturan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Pengelolaan sector Kepariwisata juga harus memberikan dampak kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Tujuan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia IV. Salah satunya menyebutkan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dihubungkan dengan bunyi Sila ke-5 Pancasila, sehingga jelas arahan umum itu menjadi, memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki implikasi bahwasanya Negara Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Jadi bukan hanya kesejahteraan dan keadilan bagi individu, golongan atau sekelompok tertentu saja.

Konsep negara hukum modern dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) juga memiliki tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai. Tujuan pokok negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan oleh Tjandra dalam bukunya yaitu:

Tabel 10.2. Tujuan Pokok Negara Kesejahteraan

Tujuan Pokok Negara Kesejahteraan menurut Tjandra	
(1)	Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik
(2)	Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata
(3)	Mengurangi kemiskinan
(4)	Menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin
(5)	Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi <i>disadvantage people</i> ;
(6)	Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam negara hukum modern dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), Utrecht mengungkapkan dalam bukunya bahwa hal yang menjadi tugas negara/pemerintah dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan prinsip negara hukum modern adalah yang senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh rakyatnya.

Krueger menyatakan, pada awalnya peran pemerintah sebatas pada penyediaan infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi. Namun, pada perkembangannya pemerintah memiliki peran yang semakin luas berkaitan dengan berbagai permasalahan dalam dinamika masyarakat, terutama mendorong bagaimana sebagian besar rakyat harus bisa hidup sejahtera. Konsep *welfare state* secara ideologis dinilai paling sesuai dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis ditandai dengan ekskalasi peran kualitatif dan kuantitatif dari negara melalui peran regulasi dan distribusi untuk mengarahkan masyarakat menuju ke arah kesejahteraan. (Susetyo Prabowohadi. 2013)

Jimly Asshidiqie menegaskan bahwa di dalam suatu negara yang memiliki konstitusi yang mencerminkan prinsip negara kesejahteraan dengan istilah lain konstitusi keadilan sosial (*social justice constitution*), semua norma yang tercermin dalam pelbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan semua tindakan

pemerintahan yang tercermin dalam program pembangunan disertai anggaran pendapatan dan belanja negara dan darah masing-masing, hendaklah diorientasikan untuk meningkatkan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Tabel 10.3. Peran negara kesejahteraan

Peran negara kesejahteraan	
(1) Sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara.	Sumber kesejahteraan masyarakat bisa berasal dari: a) Kesejahteraan masyarakat dapat mengalir lewat gaji atau pemasukan (<i>income</i>) dari tempat di mana ia bekerja. Gaji yang layak dan aturan pekerjaan yang manusiawi dapat membawa warga pada kehidupan yang sejahtera. Selain itu, adanya jaminan ketika mereka menghadapi masa sulit, seperti sakit atau di-PHK juga menjadi ukuran penting bagi kesejahteraan masyarakat; b) Adanya kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya juga menjadi ukuran kesejahteraan warga negara. Kemampuan itu dimungkinkan bila mereka sudah mendapatkan gaji yang lebih dari cukup. Bagaimana mungkin mereka dapat menabung atau membuat asuransi secara pribadi ketika gaji yang mereka terima sangat jauh dari cukup. Karenanya, kelayakan gaji menjadi pengandaian bagi inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya. c) Sumber kesejahteraan juga bisa datang dari donasi warga yang lebih mampu secara sukarela. Pemberian sukarela ini memang tidak hanya dalam bentuk uang. Ia bisa saja diberikan dalam bentuk penjualan barang di bawah harga pasar atau memberikan tambahan waktu libur kepada para pekerja. d) Peran negara bagi perwujudan kesejahteraan datang lewat kebijakan pemberian uang tunai atau dalam bentuk tertentu (<i>cash benefits or benefits in kind</i>).
(2) Penyampaian (<i>modes of delivery</i>) sumber daya kesejahteraan juga beragam	Penyampaian manfaat kesejahteraan itu, misalnya, bisa dilakukan dengan cara memberikan pelayanan gratis (seperti pelayanan kesehatan tanpa biaya) atau memberikan uang lewat peringanan pajak, dan

sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memiliki sistem negara kesejahteraan. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Menurut Goodin (1999:22), enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu:

- a) untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (*promoting economic efficiency*).
 - b) Mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*);
 - c) mempromosikan kesamaan sosial (*promoting social equality*);
 - d) mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*).
 - e) mempromosikan stabilitas sosial (*promoting social stability*).
 - f) mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (*promoting autonomy*)
-

C. Sistem Negara Kesejahteraan

Membangun negara kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil membangun negara kesejahteraannya. Demikian pula, negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni: *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan. *Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan *State welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. (Terry, George R. 2010)

Negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa "Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa". Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.

Penyelenggaraan sistem perlindungan sosial negara kesejahteraan ada hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di satu pihak, dan adanya kewajiban negara (*state obligation*) di pihak lain. Sehingga menciptakan Pelembagaan Sistem Negara Kesejahteraan pada Tingkat Nasional dan Pelambagaan Sistem Negara Kesejahteraan pada Tingkat Pemerintah daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah. (Wahab, S. 2012)

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan hukum dalam suatu negara dapat berasal dari *internal* sehingga mempengaruhi seluruh sistem hukum yang sedang berjalan, dapat pula dari *external* yang mempengaruhi sistem hukum nasional yakni adanya keharusan suatu negara menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum Internasional. Dalam konteks perubahan dan pembaharuan hukum di Indonesia, kedua faktor tersebut secara bersamaan telah mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada dan sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap hukum nasional yang ada. (Triwibowo, dkk. 2006)

Konsepsi negara kesejahteraan pada esensinya adalah memberi perlindungan atas kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Artinya ideologi negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia menjadi panduan terselenggaranya pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Negara kesejahteraan pada prinsipnya mengintegrasikan sistem sumber dan jaringan pelayanan sosial agar dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggungjawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan

liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Paham negara kesejahteraan adalah tanggung jawab sosial negara untuk mengurus nasib orang miskin dan yang tak berpunya. Negara dituntut berperan lebih, sehingga format kelembagaan organisasi birokrasinya juga menjangkau kebutuhan yang lebih luas. Terhadap semakin luasnya bidang-bidang yang mesti ditangani oleh pemerintahan *welfare state*, maka dalam perkembangannya kemudian muncul sebutan *intervensionist state*

Negara kesejahteraan adalah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya sebagai pondasi utama kebijakan sosial walaupun negara kesejahteraan bukanlah sekedar kumpulan kebijakan sosial, artinya meskipun negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mewujudkannya, suatu negara dapat menerapkan beberapa kebijakan sosial tanpa menganut negara kesejahteraan secara utuh.

Paham negara kesejahteraan sejatinya dapat diterapkan berdampingan dengan negara regulasi. Kesejahteraan adalah impian berbangsa dan menjalankan fungsi pengaturan adalah sarana pencapaiannya. Penyelarasan dua konsep ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tentu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif dan mengedepankan kepentingan rakyat, maka konsep negara kesejahteraan Indonesia ini akan terwujud. Tim Riset PSIK (2008) menyatakan bahwa sistem negara kesejahteraan diorientasikan dalam bagan dibawah ini:

Bagan 10.1 Sistem Negara kesejahteraan



Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan yang merupakan negara hukum modern merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara (khususnya eksekutif) yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Sehingga pengaturan dalam sektor pariwisata menjadi bagian

yang penting untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan yang sesungguhnya.

Pengelolaan sektor Kepariwisata juga harus berangkat dari perspektif perwujudan tujuan Negara kesejahteraan. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbentuk kesatuan, terbagi atas kurang lebih 17.508 pulau memiliki berjuta potensi pariwisata yang dapat menjadi daya tarik utama dalam sector Kepariwisata.

Potensi wisata yang tidak dikelola dengan standar yang baik atau bahkan tidak dikelola sama sekali. Hal ini menandakan masih belum tercapainya tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Seharusnya dengan begitu besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia, apabila regulasi/aturan yang ada sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan Kepariwisata benar-benar menggunakan perspektif welfare state, sector Kepariwisata Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga, selain perlunya.

Pembentukan peraturan yang lebih jelas lagi mengenai tata kelola pariwisata Indonesia, perlu juga strategi pemosisian (*positioning*) agar peningkatan tren pariwisata Indonesia terus meningkat dalam jangka panjang. Dari pemaparan tersebut, yang menjadi focus permasalahan adalah Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan begitu banyak potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut dapat diperoleh melalui pendapatan dari pemanfaatan sector Pariwisata yang ada.

Namun untuk dapat mengelola sector Kepariwisata yang ada di Indonesia, salah satu aspek penting adalah adanya regulasi/aturan yang secara menyeluruh dapat pengatur pengelolaan Kepariwisata. Regulasi/aturan tersebut harus menggunakan perspektif Negara Kesejahteraan (*welfare state*) agar memberikan dampak pada kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sector Kepariwisata dengan baik. (Wahab, S, dkk. 2011)

Aktivitas pariwisata di Indonesia mulai terlihat sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960

tentang Kepariwisata. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah karena banyaknya potensi wisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Melalui undang-undang ini juga Indonesia diakui oleh dunia sebagai negarayang memiliki aset sangat banyak dalam jumlah situs warisan dan budaya. Namun, dalam pelaksanaannya jumlah situs wisatayang sangat banyak ini tidak sejalan dengan jumlah turis mancanegara dan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Terjadi ketimpangan antara hal-hal yang nyata terjadi (*Das Sein*) dengan hal-hal yang seharusnya terjadi (*Das Sollen*) serta kesenjangan yang terjadi diantara keduanya.

Seiring dengan perkembangannya, undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang Kepariwisata dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Sehingga pada tahun 2009 dilakukan penggantian Undang-undang nomor 9 tahun 1960 diganti dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Kepariwisata di Indonesia. Undang-undang Kepariwisata terdiri dari 17 Bab dan 67 Pasal. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan Kepariwisata.

Asas penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas yang menjadi acuan untuk diterapkan dalam pelaksanaannya. Asas dalam penyelenggaraan Kepariwisata menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Kepariwisata. Namun sejauh ini dapat dikatakan belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya asas-asas penyelenggaraan Kepariwisata tersebut dapat diterapkan.

Selain ketentuan asas-asas penyelenggaraan Kepariwisata, undang-undang nomor 10 tahun 2009 juga mengatur tentang fungsi utama dari Kepariwisata. Fungsi dari Kepariwisata termuat dalam pasal 3 Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 yang menyebutkan:

“Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Fungsi tersebut disebutkan fungsi bagi wisatawan, bagi pemerintah dan bagi masyarakat pada umumnya. Fungsi bagi wisatawan, melalui rekreasi dan perjalanan yang dilakukan dapat berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Selain itu, Kepariwisata bagi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Bagian yang cukup penting dalam penyelenggaraan Kepariwisata adalah terkait dengan tujuan Kepariwisata. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimuat ketentuan terkait dengan tujuan kepariwisataan, yaitu: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menghapus kemiskinan, Mengatasi pengangguran, Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, Memajukan kebudayaan, Mengangkat citra bangsa, Memupuk rasa cinta tanah air, Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan Mempererat persahabatan antar bangsa.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Namun dapat dikatakan sampai sekarang, dengan potensi pariwisata yang begitu besar dimiliki Indonesia masih belum bisa menghapus kemiskinan. Bahkan masih terdapat pula masyarakat-masyarakat miskin di daerah dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Sehingga dapat dikatakan tujuan-tujuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik.

Prinsip penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia. Kepariwisata diselenggarakan dengan:

Tabel 10.3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia
Prinsip penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia

(1) Prinsip Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya	Sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
---	---

(2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal	- Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. - Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. - Memberdayakan masyarakat setempat. - Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan. - Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. - Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa prinsip penyelenggaraan.
--	--

Kepariwisataan yang termuat dalam ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tersebut salah satunya adanya prinsip untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Ternyata kesejahteraan rakyat masih menjadi prinsip dalam penyelenggaraan Kepariwisataan yang harus diperhatikan.

Dalam rangka melakukan pemerataan dalam penyelenggaraan kepariwisataan, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga memuat ketentuan terkait dengan langkah pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Antara lain :

Tabel 10.4. Pemerataan dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan
Pemerataan dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan

(1) <i>Pasal 3</i>	a) Fungsi penyelenggaraan Kepariwisataan di Indonesia bagi Pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara. b) Pemanfaatan sector Kepariwisataan yang sangat potensial akan menambah pendapatan negara yang termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(2) <i>Pasal 4</i>	a) Tujuan Kepariwisataan diantaranya salah satunya disebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan mengurangi pengangguran. b) Salah satu tujuan dalam perwujudan Negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) adalah pemerintah

		memiliki tanggungjawab untuk memberikan/ meningkatkan kesejahteraan rakyatnya kebijakan-kebijakan yang diberikan.
(3)	<i>Pasal 8</i>	Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataanyang terdiri : a) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, b) Rencana induk pembangunan kepariwisataanprovinsi, c) Rencana induk pembangunan kepariwisataankabupaten/kota
(4)	<i>Pasal 9</i>	a) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. b) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi c) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami adanya ketentuan dalam melakukan pembangunan sector kepariwisataan di Indonesia. Segala bentuk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut dimaksudkan agar langkah pembangunan kepariwisataan di Indonesia dapat terencana dengan baik, sehingga dapat terwujud tujuan penyelenggaraan Kepariwisata secara maksimal.

Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Perwujudan Prinsip Negara Kesejahteraan. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya rezim pengaturan Kepariwisata dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata.

Undang-undang tersebut dibuat seiring dengan sector Kepariwisata yang semakin berkembang. Namun dalam pelaksanaanya, sector kepariwisataan yang memiliki potensi yang sangat besar ternyata belum bias dimanfaatkan secara maksimal. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dibuat untuk menggantikan Undang-undang Kepariwisata sebelumnya.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang begitu besar

di Indonesia. Dalam landasan teoritik disebutkan terkait dengan pemahaman secara singkat maksud dari Negara kesejahteraan tersebut. Negara kesejahteraan secara singkat dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan demokratis yang menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan Kepariwisata di Negara Indonesia yang merupakan Negara kesejahteraan harus selalu berorientasi pada kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Secara normative disebutkan bahwasannya dengan penambahan pendapatan Negara digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pasal tersebut yang menjelaskan fungsi dari penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia dapat dikatakan sudah mengarah pada perwujudan prinsip negara kesejahteraan.

Kebijakan tersebut termasuk dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia. Ketentuan tersebut menjelaskan secara normative tujuan Kepariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga secara normatif aturan Kepariwisata dapat dinyatakan sejalan dengan perwujudan tujuan negara kesejahteraan.

Selain itu tujuan penyelenggaraan kepariwisataan juga disebutkan untuk menghapus kemiskinan. Salah satu orientasi system Negara kesejahteraan adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sehingga secara normative ketentuan terkait dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sudah sejalan dengan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diatur ketentuan terkait dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Pasal 5 huruf c menyebutkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwasannya dalam

prinsip penyelenggaraan Kepariwisata sesuai dengan perwujudan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan perencanaan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan dirancang oleh pemerintah pusat untuk kepariwisataan level nasional, pemerintah provinsi untuk kepariwisataan level provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk kepariwisataan level kabupaten/ kota. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang hendak di capai yang salah satunya memberikan kesejahteraan rakyat.

Pemahaman yang paling sederhana dalam memahami prinsip negara kesejahteraan adalah adanya kontribusi dan tanggungjawab yang dimiliki negara untuk berupaya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Proses pembangunan kepariwisataan melalui penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan oleh pemerintah memberikan gambaran kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui kebijakan pemerintah dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam hal ini, aturan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan perwujudan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*).

Berdasar beberapa analisis tersebut dapat dikatakan bahwasannya secara normativ peraturan terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah sejalan dengan perwujudan prinsip negara kesejahteraan. Penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya memang masih dikatakan belum bisa secara maksimal dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Persoalan tersebut lebih kepada pelaksanaan ketentuan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang belum bisa secara maksimal melaksanakan fungsi dan tujuan yang telah dirumuskan.

D. Evaluasi

1. Uraikanlah bagaimana tujuan negara kesejahteraan!
2. Jelaskan tentang tentang sistem negara kesejahteraan!
3. Bagaimana Sistem Negara kesejahteraan dalam pengaturan pariwisata!

BAB 11

Konsep negara Kesejahteraan dalam Pengembangan Wisata Candi Borobudur

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bagian kesebelas menjelaskan Konsep negara kesejahteraan dalam pengembangan wisata Candi Borobudur terdiri dari aspek pendanaan, aspek partisipasi masyarakat dan pengembangan desa wisata Candi Borobudur. Sehingga mahasiswa mampu memahami permasalahan dan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan pada pengembangan wisata Candi Borobudur.

B. Pendanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur pada Pasal 26 menegaskan bahwa Pendanaan penyelenggaraan Badan Otorita Borobudur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata. (Wardiyanta. 2016)

Persaingan dunia pariwisata sangatlah berat khususnya dengan negara ASEAN terkait infrastruktur pariwisata. Maksud dan tujuan di bentuknya ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah:

Tabel 11.1 Tujuan ASEAN

Tujuan ASEAN		
(1)	Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social serta pengembangan kebudayaan	Melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa asia tenggara yang sejahtera dan damai.
(2)	Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional	Dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara-negara di kawasan, serta mematuhi prinsip-prinsip perserikatan Bangsa-Bangsa.
(3)	Meningkatkan kerjasama yang aktif	Saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, social, teknik ilmu pengetahuan dan administrasi.
(4)	Memberikan bantuan dan bentuk sarana sarana pelatihan dan penelitian	Dalam bidang pendidikan, profesi , teknik dan administrasi.
(5)	Bekerjasama dengan lebih efektif	Dalam peningkatan pemanfaatan pertanian dan industry. Perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditas internasional.
(7)	Memajukan pengkajian asia tenggara	
(8)	Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional	Bertujuan menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama.

Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. yaitu:

Tabel 11. 2 Empat Pilar MEA

Empat Pilar MEA
(1) Pasar dan basis produksi tunggal
(2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi
(3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan
(4) Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global

Keempat pilar termuat dalam dokumen Blueprint yang disepakati dalam Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur pada Agustus 2006. Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. (Wijaya, H. A. W. 2015) Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari, yaitu:

Tabel 11.3. 5 Karakter Negara Anggota ASEAN

5 Karakter Negara Anggota ASEAN
(1) Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh
(2) ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis
(3) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral
(4) ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat
(5) ASEAN yang global

MEA 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Untuk mengimplementasikan Blueprint MEA 2015, ditentukan *scorecard* yang berisikan deliverables, yaitu: 611 langkah aksi kategori *Full Scorecard* dan 506 langkah aksi kategori *Focused Base*. (Widiastutie, Sophiana. 2016)

Per 31 Desember 2017, tercatat 72 dari 118 prioritas (61%) implementasi MEA di tahun 2017 telah berhasil diimplementasikan. Dari 46 prioritas yang belum diimplementasi, 12 di antaranya telah diimplementasi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Adapun Indonesia sejauh ini telah mengimplementasikan 85 dari 118 prioritas tersebut.

MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015, dan bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif; berdaya saing dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerja sama sectoral, tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat serta ASEAN yang global. (Wiratama, H. D. 2017)

Cakupan kerja sama ekonomi ASEAN: Kerja sama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 11.4 Profil Perekonomian ASEAN

Profil Perekonomian ASEAN	
(1)	Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral, dan tanaman pangan
(2)	Jumlah penduduk ASEAN yang besar, yaitu 632 Juta Jiwa (2015), mayoritas adalah usia produktif
(3)	Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata rata 5% -6% per tahun. Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antar negara anggota (<i>narrowing the development gap</i>), ASEAN memiliki <i>initiative for ASEAN Integration</i> (IAI) atau Inisiatif Integrasi ASEAN (IIA). IIA bertujuan mencipta kan pembangunan merata antara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam)
(4)	Pelaksanaan <i>Initiative for ASEAN Integration</i> : <i>Initiative for ASEAN Integration</i> dilaksanakan dalam bentuk, proyek pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan pembangunan lembaga, saran kebijakan, dan studi kelayakan
(5)	Pendanaan <i>proyek Initiative for ASEAN Integration</i> : Pelaksanaan proyek pada umumnya mendapat pendanaan dari ASEAN-6, mitra wicara, atau lembaga internasional dalam rangka IIA serta secara bilateral.
(6)	<i>Proyek-proyek Initiative for ASEAN Integration</i> : Pada awalnya proyek <i>Initiative for ASEAN Integration</i> dilaksanakan di bidang ekonomi seperti, pembangunan infrastruktur, SDM, peningkatan kapasitas integrasi kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam perkembangannya, proyek IIA diperluas mencakup bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Di samping itu, atas usulan Indonesia, ASEAN telah me nyetujui *ASEAN Framework on Equitable Economic Development (AFEED)* atau Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembangunan Ekonomi yang Setara. Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya, antara lain, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejah teraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Partisipasi menengah ASEAN. lebih luas dalam proses integrasi ASEAN.

Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk mendanai pengembangannya namun menjadi tugas bersama dalam hal ini pemerintah melalui APBN/APBD, BUMN dan peran serta swasta. Keterlibatan semua stakeholder terkait perlu dilakukan melalui integrasi pendanaan infrastruktur pendukung pariwisata. Kebutuhan pendanaan yang besar tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD dimana memiliki keterbatasan anggaran.

Integrasi pendanaan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata sangat diperlukan, khususnya dari sektor swasta yang dananya tidak terbatas seperti halnya APBN/APBD maupun BUMN. Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait telah menganggarkan dalam APBN pembangunan infrastruktur pariwisata maupun pendukung pariwisata.

Untuk mempermudah transportasi ke daerah wisata, pemerintah telah membangun jalan, bandara, pelabuhan, serta jalur kereta api. Selain itu, pemerintah juga melalui anggaran Transfer ke daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mamajukan pariwisata nasional dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan. (World Tourism Organization. 2012)

Keseriusan pemerintah dalam sektor pariwisata ini dibuktikan dengan mengalokasikan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN tahun 2020 berupa DAK Fisik, DAK Fisik tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pariwisata melalui penataan kawasan, aksesibilitas pariwisata dan amenitas pariwisata. Sedangkan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan dalam APBN tahun 2020 digunakan untuk peningkatan

kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan.

C. Partisipasi Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta bahkan organisasi non pemerintahan. Kegiatan pemberdayaan sejatinya memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok atau individu tertentu sehingga pemberian daya tersebut dapat menjadikan masyarakat atau individu tersebut mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan sehingga dapat berimplikasi pada ketahanan budaya, meingkatkan kesadaran masyarakat, hingga meningkatkan partisipasi masyarakat. kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain :

Tabel 11. 5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
(1)	Transformasi Kesadaran	Bentuk penyadaran atau bentuk perilaku sadar, dalam hal ini perlu merangsang kesadaran masyarakat tentang perlunya memperbaiki kondisi saat ini.
(2)	Pengembangan Kapasitas	Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, hal ini dilakukan agar terbukanya wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat.
(3)	Peningkatan kemampuan intelektual atau kecakapan-kecakapan	Terbentuknya inisiatif dan inovatif untuk kemandirian masyarakat yang disesuaikan dengan pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Pariwisata Candi Borobudur pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata.

Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan.

Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata, bukan hanya sekadar aspek ekonomi. Kalangan ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan adalah untuk manusia, sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan konsep *People-Centered Development*.

Kajian pariwisata yang menyangkut persoalan manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhan, menjadi paradigma baru dalam pengembangan pariwisata, hal ini menyangkut berbagai alasan. Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang berada di ruang hampa namun bersentuhan langsung dengan hidup dan kehidupan. Pariwisata bersifat sangat dinamis dan kreatif. Pariwisata tidaklah eksklusif, dalam arti bahwa pariwisata tidak hanya menyangkut suatu bangsa tertentu. Pariwisata selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. (Zaini, dkk. 2016)

Berdasarkan paradigma baru dalam pengembangan pariwisata Candi Borobudur tersebut maka aspek manusia yakni sebagai wisatawan (*visitors*) atau sebagai tuan rumah (*host*) menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur melalui kerja sama dengan Badan Otorita Borobudur. Kerjasama dapat berupa penyertaan modal, penyewaan, atau pinjam pakai dalam bentuk tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesatnya pertumbuhan wisatawan, mengakibatkan pembangunan prasarana penunjang kepariwisataan di suatu wilayah meningkat, yang diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin besar di seluruh sektor. Tingginya penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah tidak lepas dari peran pemerintah yang selalu berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut.

Peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja pariwisata merupakan implikasi dari peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Sektor pariwisata berhasil mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi seperti terlihat pada peningkatan kunjungan wisatawan manca negara (wisman). Perkembangan tersebut semakin menunjukkan potensi sektor pariwisata bersama ekonomi kreatif sebagai sektor ekonomi strategis dalam perekonomian nasional ke depan. Dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata sehingga mampu memberikan citra yang positif bagi wisatawan yang berkunjung.

Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam pengembangan SDM pariwisata, antara lain adalah:

Tabel 11.6 Permasalahan dalam Pengembangan SDM Pariwisata
Permasalahan dalam Pengembangan SDM Pariwisata

(1)	Rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata,	persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan konsumen yang sangat ditekankan di Eropa, Amerika, dan Australia, merupakan kendala yang sangat menghambat berkembangnya pariwisata. Masih sering ditemui bahwa harga yang ditawarkan pada turis baik domestik maupun mancanegara over priced. Belum lagi adanya tindakan persuasif berlebihan sehingga terkesan memaksa. Orientasi ekonomi yang terlalu berlebihan kepada turis jelas mengganggu kenyamanan turis yang sedang melakukan kegiatan perjalanan wisata.
(2)	masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata.	Banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurangnya dukungan dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran tersebut.

(3) kurangnya modal dan rendahnya sumberdaya manusia,	terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata kendala utama yang seringkali muncul pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sumberdaya manusia merupakan komponen utama dan penentu, dalam menjalankan fungsinya sebagai frontliners, yakni orang yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada para wisatawan
---	---

Potensi pengembangan pariwisata juga sangat terkait dengan lingkungan hidup dan sumberdaya. Sumberdaya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang statik seperti: hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, berenang dan lain-lain. Karena itu pariwisata sangat terkait dengan keadaan lingkungan dan sumberdaya. Selain itu merupakan budaya serta keindahan alam merupakan potensi yang sangat baik untuk kegiatan pariwisata. (Radjasa Mu'tasim. 2013)

Selanjutnya, masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Pengintegrasian masyarakat dalam pariwisata dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Berbagai permasalahan berupa tantangan dan hambatan akan ditemukan untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat lokal tidak dapat diabaikan dan merupakan input penting dalam proses perencanaan pembangunan destinasi pariwisata.

Selain dibutuhkannya partisipasi aktif dari masyarakat, perlu diadakan pelatihan dan pendidikan guna menciptakan Sumber Daya Pariwisata yang berkualitas. Dewasa ini dikenal strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*), di Indonesia sendiri telah diterapkan secara nasional. Sedangkan pihak yang menyelenggarakannya *community development* dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community Based Development Strategy*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat tertentu di

suatu daerah yang dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat tujuannya untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya yang dapat memenuhi kehidupan mereka sehingga diperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Masyarakat penerima wisatawan, dari satu sisi, dan para pelaku usaha pariwisata setempat, di lain sisi, hendaknya bersikap ramah dan menghormati wisatawan yang datang berkunjung serta memahami gaya hidup, cita rasa dan harapan wisatawan. Pendidikan sepatutnya diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut dan melayani wisatawan. (Ratih Sari, dkk. 2013)

Kemampuan masyarakat di bidang pelayanan jasa pariwisata perlu ditingkatkan. Adanya pendidikan yang baik di bidang pariwisata maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan pun akan meningkat, misalnya kemampuan berbahasa asing. Adanya peningkatan kualitas pelayanan, ke depannya akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pendidikan bisa dilakukan dengan cara pelatihan ataupun pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pengembangan pariwisata tidak hanya menuntut eksploitasi segala potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dijadikan produk ataupun daya tarik wisata. Namun diwajibkan untuk menjaga persepsi positif dari wisatawan yang datang. Oleh karena itu, perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan oleh pemerintah yang dibantu pihak swasta.

Pelatihan informal dapat dilaksanakan dengan memberikan pelatihan singkat misalnya mengenai keterampilan di bidang attitude atau tingkah laku. Hal ini bertujuan agar masyarakat pengelola memiliki pengetahuan mengenai cara melakukan bisnis yang baik sehingga wisatawan tidak merasa terpaksa dan tertipu saat membayarkan sejumlah uang, dimana antara harga dan kualitas tidak sebanding.

Partisipasi harus bisa mengubah masyarakat dari obyek menjadi subyek pembangunan dan karenanya harus menguntungkan/mensejahterakan masyarakat. Termasuk desa wisata yang dikembangkan, maka desa wisata harus memiliki manfaat terhadap Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pemberdayaan Sosial Budaya,

pemberdayaan lingkungan pedesaan serta Pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia. (Risnain, Muh. 2016)

Sikap dapat diterjemahkan sebagai sikap terhadap obyek tertentu yang berupa sikap pandangan atau perasaan. Sikap ini disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap obyek tertentu. Sikap adalah kesiapan atau keadilan untuk bertindak. sikap merupakan faktor terpenting untuk menentukan suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda maka proses implemementasi menjadi terancam kesuksesannya.

Hoofsteede merumuskan pengertian partisipasi secara sederhana sebagai berikut: *"the taking in one more proses of proses"* (partisipasi adalah ambil bagian dalam suatu tahap dari suatu proses). Davis mengemukakan partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita cita kelompok atau turut bertanggung jawab terhadapnya. Kesiediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Adapun bentuk dan jenis partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Davis sebagai berikut:

Tabel 11.7. Bentuk dan jenis partisipasi

Bentuk Partisipasi	Jenis Partisipasi
1. Konsultasi	1. Partisipasi dalam pikiran
2. Sumbangan spontan	2. Partisipasi dalam tenaga
3. Sumbangan dari luar yang berbentuk proyek bersifat berdikari	3. Partisipasi dalam pikiran dan tenaga
4. Sumbangan dalam bentuk jasa kerja	4. Partisipasi dalam keahlian
5. Proyek yang dibiayai oleh komuniti setelah ada konsensus dalam rapat komuniti	5. Partisipasi dalam barang
6. Aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela	6. Partisipasi dalam uang
7. Mengadakan perjanjian kerjasama untuk bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan	7. Partisipasi dengan jasa-jasa

-
8. Melakukan pembangunan secara endogen dalam lingkungan keluarga
 9. Pembangunan proyek-proyek komunitas yang otonom
-

Hubungan sikap dan partisipasi dalam keberhasilan pengembangan pariwisata, menurut Gunn dalam Wilson adalah faktor keramahan. Hal ini wisatawan diperlakukan dengan baik oleh masyarakat lokal maupun oleh pengusaha di bidang pariwisata, sehingga wisatawan merasa nyaman untuk melakukan kegiatan wisata di daerah tersebut dan imbasnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan pengusaha di bidang pariwisata. Semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan untuk membiayai seluruh kegiatan wisata yang dilakukan.

Keramahan tersebut tercermin dari sikap masyarakat dalam menyambut dan menerima para wisatawan di tempat mereka. Sikap merupakan kondisi mental yang kompleks yang melibatkan keyakinan dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Selain menunjukkan keramahan, sikap pun menunjukkan dukungan masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata di suatu wilayah. kecenderungan sikap masyarakat tersebut lebih mengarah ke positif atau negatif. Sikap mempengaruhi keberhasilan pengembangan tersebut. Sikap masyarakat yang diimplementasikan dalam partisipasi masyarakat sudah barang tentu merupakan faktor yang akan mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. (Siagian, Sondang, P. 2006)

Aspek sosial menyangkut kesiapan masyarakat terhadap perubahan yang akan terjadi dari pengembangan daerah wisata. Jika masyarakat memahami kehadiran pengembangan pariwisata, maka akan berdampak positif bagi setiap anggota masyarakat yang akhirnya akan tercipta suasana baru yang aman dan terpelihara sesuai harapan bersama. Sebaliknya, jika masyarakat tidak siap maka kehadiran wisatawan dengan budaya yang berbeda dapat menimbulkan *culture shock* bagi masyarakat lokal, sehingga masyarakat dapat kehilangan tanda dan simbol-simbol budaya yang sudah melekat dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat dalam

pembangunan pariwisata yang tercermin melalui sikap dan partisipasinya, haruslah menjadi faktor yang benar-benar diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

D. Pengembangan Desa Wisata Candi Borobudur

Desa wisata menjadi salah satu alternatif wisatawan untuk menghabiskan liburan. Sapaan akrab dan pemandangan indah khas pedesaan menjadi daya tariknya. Banyak desa yang menjadi desa wisata tetapi dari aspek manajemen kepariwisataan tidak mempunyai. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola kurang trampil dalam mengelola desa wisata yang baik. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengelola pariwisata.

Pendampingan pengelolaan desa wisata dari perusahaan memang baik, akan tetapi perlu diperhatikan pendekatan yang dilakukan dan pelibatan langsung masyarakat lokal agar tidak terjadi salah persepsi terhadap sebuah program yang digulirkan. (Sihite, Richard. 2010) Kegiatan pengelolaan desa wisata jika sudah melalui pendekatan yang baik dan diterima oleh masyarakat maka perlu menjaga semangat dan antusias masyarakat agar tidak redup selain itu perlu adanya perbaikan akses-akses jalan menuju lokasi agar tidak terjadi arus urbanisasi. (Soekadijo, R.G. 2017)

Kendala utama pengembangan desa wisata ada pada aspek pelayanan, jaringan, dan pemasaran. Cara menerima wisatawan kebanyakan belum sesuai dengan standar pelayanan kepariwisataan. Sepertinya kurang penting tapi berdampak luas bagi pelanggan. Hal-hal semacam inilah yang belum diperhatikan sebagian desa wisata dalam merumuskan kebijakan.

Desa wisata terbagi dalam tiga kategori, yaitu tumbuh, berkembang dan mandiri. Desa wisata kategori tumbuh, 100 persen masih membutuhkan fasilitas dari dinas. Pada kategori tersebut, masyarakat belum tahu kegiatan yang harus dimiliki desa wisata, pembangunan dan akses pemasarannya. Oleh Karena itu, desa wisata dikategorikan belum bisa dilepas.

Sedangkan untuk desa wisata berkembang, pendampingan sudah dikurangi porsi nya dan 50 persen desa wisata sudah bisa berjalan sendiri. Untuk mandiri, desa wisata sudah bisa berjalan sendiri meski tidak didampingi. Sejauh ini, tidak ada kategori desa wisata gagal, hanya ada naik peringkat. Seperti dari kategori tumbuh ke berkembang.

Dari ketiga kategori tersebut, desa wisata, tumbuh dan berkembang menjadi prioritas. Sementara mandiri tetap didampingi dengan peningkatan atraksi yang baru. Sejauh ini, ada beberapa wilayah yang ingin menjadi desa wisata dan mengumumkan dirinya sebagai desa wisata di media konvensional. Namun, agar mendapat fasilitas dari dinas terkait, wilayah itu harus menjadi anggota forum komunikasi (forkom). kaitannya dengan fungsi forkom sebagai media untuk berdialog. (Spillane, James, J. 2014)

Mereka mengakui bahwa adanya desa wisata tidak serta merta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun diakui pula bahwa kesempatan meningkatkan penghasilan dari adanya desa wisata cukup terbuka lebar. Ada potensi untuk meningkatkan kemakmuran warga adanya desa wisata ini meskipun sampai saat ini masih belum terlalu dirasakan.

Pengelola wisata di desa-desa sekitar Borobudur sebagian besar dikelola oleh masyarakat, terutama berbentuk kelompok masyarakat, atau kelompok sadar wisata. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator, namun seringkali masyarakat atau kelompok tersebut bergerak sendiri. Beberapa tahun terakhir, pelaku wisata desa di sekitar Borobudur telah berupaya membangun jejaring kerjasama melalui Klaster Pariwisata Borobudur. Mereka menawarkan paket wisata jelajah desa-desa sekitar Borobudur memanfaatkan kendaraan tradisional (kereta kuda), dan singgah di beberapa tempat seperti sentra kerajinan, galery, kuliner, dan UMKM.

Akan tetapi usaha tersebut masih terkendala minimnya sinergi baik diantara masyarakat sendiri maupun dengan PT Taman Wisata Candi. Peran pemerintah daerah juga dirasakan masih kurang optimal di dalam pengembangan desa wisata tersebut. Disamping masalah tersebut, di dalam perbaikan pengelolaan kawasan Borobudur terdapat

beberapa potensi, baik bersumber dari masyarakat, pemerintah, bahkan lembaga asing. (Soekanto, Soerjono. 2017)

Wisata Candi Borobudur sebagai BUMN pengelola wisata candi juga mulai berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar agar mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata Candi Borobudur. Konsep yang dikembangkan adalah *Community Based Tourism* (CBT), yang berorientasi pembangunan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan melalui pengelolaan potensi ekonomi, warisan budaya dan tradisi serta ekowisata (*ecotourism*) dengan meng-utamakan peran aktif masyarakat lokal dan pengunjung secara berkelanjutan. Harapan konsep ini mampu mendorong ekonomi berkelanjutan warga sekitar Borobudur dalam Interconnecting Tourism System berbasis komunitas. Konsep tersebut diwujudkan dengan pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur.

Konsep Wisata Candi Borobudur, “desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata, dimana penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli, komponen utama dalam desa wisata adalah akomodasi dan atraksi”.

Program ini diawali dengan mengidentifikasi dan menggali potensi, menghidupkan potensi dan menyajikannya sebagai atraksi wisata. Kemiteraan antara wisata Candi Borobudur dengan masyarakat desa dilakukan melalui jalur formal, yaitu pemerintah desa, kemudian pemerintah desa mengkoordinis masyarakatnya. (Soekanto, Soerjono. 2017)

Wisata Candi Borobudur mendapatkan mandat dari Kementerian BUMN menggandeng 20 BUMN untuk memberikan dukungan desa di sekitar Borobudur, setiap BUMN mendanai 1 desa dalam pengembangan wisata desa. Desa memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan dana kepada BUMN sponsor. Adapun 3 BUMN berperan sebagai pembina, yaitu PT TWC, PT Patra Jasa, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang bertugas memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata.

Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN bekerjasama untuk membangun daerah yang termasuk Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN). Salah satu bentuk kerjasama tersebut dengan

menciptakan Balai Ekonomi Desa atau disingkat Balkondes yang merupakan program guna memanfaatkan potensi lokal agar dapat dirasakan secara global. Balkondes saat ini tersebar diseluruh Indonesia terutama pada beberapa wilayah yang dijadikan Kawasan Super Prioritas Nasional(KSPN), pemerintah menargetkan 100 titik balkondes pada tahun 2017. (Ratih Sari, Suzanna. 2013)

Beberapa wilayah yang diajdikan titik pendirian balkondes antara lain sekitar Candi Borobudur, Labuhan Bajo(NTT), Morotai, Danau Toba, dan Wisata Dieng. Menariknya, dari 100 titik, 20% (3 BUMN Pendamping dan 14 BUMN Sponsor) diantaranya berada di wilayah sekitar Candi Borobudur. (Iwan Triyuwono. 2010)

Salah satu dari tiga balkondes awal yang beridiri di Kecamatan Borobudur terletak di Desa Wringinputih Dusun Bojong yang merupakan wilayah bagian utara desa. Balkondes Desa Wringinputih sendiri berada di bawah naungan Bumdes Guyub Rukun dan berdiri sejak Juli tahun 2017. Hingga saat ini telah terjadi setidaknya tiga kali perubahan pengelola balkondes yaitu pada tahun 2017-2019, 2019-2020, dan 2020- sekarang.

Balkondes Wringinputih memiliki potensi lokal yang berbeda dari wilayah lain, yaitu potensi adanya tumbuhan bambu yang melipah. Jika diamati, kontruksi bangunan Balkondes Wringinputih mayoritas berbahan dasar bambu. Bahkan keunikan lain yang dimiliki oleh balkondes ini adalah pembangunan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat tanpa melalui pihak ketiga yang notabnya pembangunan balkodes lainnya melibatkan pihak ketiga.

Balkondes Wringinputih diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia beserta menteri BUMN pada September tahun 2018 satu tahun setelah pembangunan resmi dilakukan. Pembangunan balkondes secara keseluruhan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh pemerintah, secara kebetulan swasta yang mendamppingi Balkondes Wringinputih adalah PT Pertamina(Persero). Fasilitas yang dimiliki oleh Balkondes Wringinputih saat ini antara lain adalah terdapat satu Hall utama yang dapat digunakan menjadi berbagai kegiatan, terdapat 20 homestay, terdapat lapangan yang luas, atraksi Permainan Jemparingan, Paint Ball, Edukasi kegiatan merawat

budaya batik tulis dan fasilitas Gerbang Utama Desa. Dengan berbagai infrastruktur yang dimiliki, Balkondes Wringinputih memiliki target pasar yaitu wisatawan yang berkunjung ke kawasan Candi Borobudur baik yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara.

Potensi akan elemen budaya lokal dirasa dapat memberikan peluang (Santika & Suryasih, 2018; Sugiyarto & Amaruli, 2018) tersendiri dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di sebuah wilayah. Balkondes Wringinputih memiliki beberapa kegiatan yang berbasis pada nilai-nilai pelestarian kebudayaan dan sudah berjalan antara lain: (1) menjadi wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan diskusi, 2) terlaksananya kegiatan senam aerobik ibu-ibu PKK Desa Wringinputih, 3) terciptanya sanggar tari tradisional untuk anak-anak dan remaja, 4) melestarikan budaya lokal berupa sanggar gamelan dan tari topeng ireng.

Balkondes Wringinputih didorong untuk dapat mewujudkan beberapa potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa antara lain adalah menciptakan sanggar tari dengan durasi pelatihan sebanyak dua kali dalam seminggu, sanggar membantik dengan durasi pelaksanaan kegiatan selama dua kali dalam seminggu yang berjumlah 30 peserta, sanggar kesenian gamelan dengan jadwal latihan sebanyak 1 kali dalam sebulan, dan paguyuban jemparingan dengan durasi pelaksanaan satu kali dalam seminggu serta sasaran pesertanya adalah bapak-bapak dan pemuda yang tertarik mengikuti aktifitas tersebut.

Berbagai macam kegiatan yang sudah terlaksana ini merupakan bentuk komitmen pengelola Balkondes Wringinputih dalam menjaga budaya lokal serta meningkatkan kesadaran wisata masyarakat Desa Wringinputih. Selain menjaga budaya lokal kegiatan di atas juga dapat menjadikan sebuah etalase dan hiburan bagi wisatawan yang berkunjung pada Balkondes Wringinputih.

Selain budaya lokal, pengelola juga mengarahkan agar wisatawan dapat merasakan potensi lokal lain yang dimiliki oleh Desa Wringinputih yaitu kekayaan atas tanaman bambu. Pengelola mengarahkan agar wisatawan dapat berkunjung ke kampung bambu yang berada di wilayah Desa Wringinputih, bahkan jika dilihat kasat

mata konstruksi bangunan di Balkondes Wringinputih berbahan dasar bambu.

Target di setiap desa terbangun fasilitas Balai Ekonomi Desa (Balkondes) beserta pendukung seperti homestay, workshop. Agenda ini diharapkan dapat meningkatkan wisata desa di sekitar Borobudur dengan konsep village tour, serta memperlama masa tinggal wisatawan di kawasan Borobudur.

Tabel 11.8. Daftar Desa & Potensi didalamnya

No.	Nama Desa	Potensi
1.	Borobudur	Candi Borobudur, Waroeng Kopi Borobudur
2.	Wanurejo	Candi Pawon
3.	Wringinputih	Hutan Bambu
4.	Karangrejo	Punthuk Setumbu, Bukit Barede
5.	Karanganyar	Gerabah tradisional
6.	Kembanglimus	Gereja Ayam, Bukit Purwosari
7.	Ngadiharjo	Punthuk Ki Bomosekti
8.	Giritengah	Punthuk Sukmo Joyo, kambing Etawa
9.	Candirejo	Omah pring (rumah adat)
10.	Tuksongo	Kerajinan topeng
11.	Tegalarum	Pembibitan tanaman
12.	Giripurno	Mata air Sileng
13.	Kebonsari	Kerajinan bambu
14.	Majaksingi	Kebun kopi
15.	Kenalan	Kerajinan anyaman pandan, Gunung Gondopurawangi
16.	Bigaran	Kakao, cengkeh
17.	Sambeng	Tikar pandan
18.	Ngargogondo	Desa Bahasa
19.	Bumiharjo	Rebana
20.	Tanjungsari	Kerajinan abu vulkanik, home industri tahu

Output utama dari konsep desa wisata tersebut adalah terdistribusinya wisatawan ke desa-desa, sinergi BUMN dan masyarakat, meningkatnya kapasitas masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan secara fisik terbangunnya Balkondes dan Homestay.

Balkondes adalah sentral pelayanan wisata dasar (kuliner dan hospitality), didukung keberadaan Homestay agar wisatawan bisa tinggal bersama penduduk dan berbaur dengan masyarakat. Balkondes

dibangundi atas tanah desa, dengan dana BUMN yang ditunjuk sebagai sponsor, serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fasilitas ini berisi galeri, ruang pertunjukan, dan workshop sebagai center point wisata desa. Dari 20 desa yang ditargetkan, pada tahun 2017 sudah terealisasi 16 Balkondes, namun tercatat hanya 4 Balkondes yang aktif. Pembangunan homestay dilakukan di tanah warga, dengan dana dari BUMN sponsor yang ditunjuk, kemudian pengelolaan akan dilakukan oleh Hotel Manohara, dan dalam pemasaran dilakukan oleh Hotel Indonesia Group.

Selain itu, di banyak Balkondes terdapat galery, pertunjukan dan workshop, jika dibangun homestay yang menjadi bagian dari fasilitas Balkondes. Harapan dengan adanya Balkondes dan homestay ini dapat memperpanjang masa tinggal/*length of stay* wisatawan melalui adanya atraksi baru, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Konsep desa wisata tersebut menurut PT TWC sebagai solusi antara keinginan mencapai target kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019 yang jika dihitung rata-rata per hari di atas 5.000 orang dengan keharusan melakukan konservasi (daya tampung candi). Konsep manajemen wisata terkoneksi antara candi dan desa, maka akan terjadi distribusi wisatawan.

Wisata keliling desa-desa di kawasan Borobudur sudah mulai berjalan, misalnya menggunakan delman, mobil, dan sepeda. Namun belum didapat angka pasti berapa banyak wisatawan yang berkunjung ke desa-desa tersebut. Perkembangan saat ini masih perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektifitas konsep Balkondes dan homestay tersebut.

Konsep mengenai wisata desa yang berpusat di Balkondes, yang berisi workshop, gallery, kuliner dengan dukungan homestay mampu menarik wisatawan. Bagaimanakah interkoneksi antara candi dengan desa. Saat ini sebagian besar masih dalam tahap pembangunan, dan tingkat kunjungan wisatawan juga belum tumbuh sesuai harapan.

Selain PT TWC dan BUMN lainnya, UNESCO juga melakukan beberapa upaya untuk memberdayakan masyarakat di sekitar Borobudur. Menurut kajian UNESCO selama ini masyarakat lokal tidak

selalu mendapatkan manfaat dari aset ekonomi dari Borobudur. Pada 2013-2014 UNESCO melakukan penilaian tentang potensi daerah Borobudur, pemetaan budaya berbasis masyarakat, dan survei dasar terhadap pelaku seni yang melibatkan 20 Desa di Kecamatan Borobudur dan lebih dari 150 orang. Hasilnya rekomendasi berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk eksplorasi seni budaya dalam rangka memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

UNESCO melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pada 8 desa di sekitar Candi Borobudur dan Prambanan. Kelompok perempuan dan pemuda menjadi sasaran kegiatan ini. Mereka didorong untuk menciptakan produk yang inovatif berbasis budaya dan kreativitas.

Ada 7 jenis kreativitas yang dikembangkan yaitu batik, jumputan (*tie-dye*), keramik, tur berbasis masyarakat, pertunjukan tradisional, makanan tradisional, dan galeri komunitas. Kegiatan ini juga melibatkan peran serta pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka keberlanjutan Galeri Komunitas. Sebanyak 95 pemuda di Borobudur telah mendapatkan pelatihan tentang pengembangan industri kreatif “General Creative Industries” yang seperti kuliner, fashion/busana, kerajinan keramik, dan sebagainya.

Model kelembagaan dan sumber daya manusia di desa wisata lebih menekankan kepada:

Tabel 11.9. Model Kelembagaan SDM Desa Wisata

Model kelembagaan dan SDM desa Wisata		
(1)	Investasi Pada modal manusia (human capital)	Dalam bidang pendidikan dan kesehatan
(2)	Peningkatan kapasitas organisasi di pedesaan	Disamping organisasi pemerintahan desa yang secara bersama-sama memiliki keinginan untuk mengembangkan desa wisata sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan
(3)	Memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok	Sehingga efisiensi bisa tercapai.

(4)	Memperbaiki budaya	Kerja dan tanggung jawab
(5)	Menghilangkan sifat dan mental negatif	Boros, konsumtif yang dapat merusak produktivitas
(6)	Pendidikan	Lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam bentuk keahlian yang dibutuhkan oleh pasar. Pendidikan pelatihan tidak hanya memberikan keilmuan, tetapi juga kesadaran dalam menumbuhkan sikap menerima, bekerja sama, dan munculnya perilaku baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan

Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dalam tata cara dan tradisi yang berlaku. Jika diamati kembali, pembangunan desa wisata bertujuan untuk:

Tabel 11.10. Tujuan pembangunan desa wisata

Tujuan Pembangunan Desa Wisata		
(1)	Mendukung program pemerintah	Mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan obyek wisata alternatif
(2)	Menggali potensi desa	Pembangunan masyarakat sekitar
(3)	Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa	Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa
(4)	Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian yang mapan	Agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata (ruralisasi)
(5)	Menumbuhkan rasa bangga	Bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal didesanya serta mengurangi tingkat

		urbanisasi
(6)	Mempercepat pembauran	Antara orang-orang non pribumi dengan orang pribumi
(7)	Memperkokoh persatuan bangsa	Sehingga bisa mengatasi disintegrasi

Pentingnya suatu pendekatan dalam proses pembangunan agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan/pembagian zonasi yang tepat dan penataannya. Lanskap yang didasarkan kepada kondisi potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat. Unsur penting berikutnya, dalam kawasan desa wisata yang berkelanjutan, ada pelatihan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan, karena jenis pariwisata ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaannya. Unsur penting lainnya adalah erat kaitannya dengan pembentukan kelompok pengusaha setempat, pembinaan kelompok pengusaha lokal dapat membentuk suatu fungsi yang bermanfaat dan dapat memunculkan usaha-usaha baru.

Pembangunan desa wisata diawali dengan memajukan/menampilkan produk lokal seperti barang kerajinan makanan khas, minuman dan produk-produk lainnya yang memberikan cita rasa kepada wisatawan tentang daerah tersebut dan dapat digunakan untuk mempromosikan kekhasan tersebut kepada wisatawan. Semua itu adalah produk yang dapat dimanfaatkan oleh usaha pariwisata lokal untuk memajukan ciri lokal. Pembentukan kelompok pengusaha lokal juga dapat memperkuat kedudukan pengusaha kecil yang perlu banyak dorongan agar menjadi kuat dan mapan.

Keaslian memberikan manfaat bagi produk wisata, termasuk desa wisata. Keaslian yang utama adalah kualitas, asli, keorisinilan, keunikan, khas daerah dan kebanggaan daerah. Keaslian dapat terwujud melalui gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat yang secara khusus berkaitan dengan perilaku integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi masyarakat desa wisata.

Keaslian juga dipengaruhi oleh keaslian ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut misalnya warisan budaya, pertanian, bentangan alam, jasa dan yang paling penting adalah peristiwa sejarah dan budaya dari daerah itu. Dengan demikian dalam proses perencanaan pemodelan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat muncul secara partisipatif sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat bottom up.

Pengelolaan desa wisata masih sederhana terlihat dari promosi kepada calon turis yang masih kurang. Kebanyakan mengandalkan promosi yang dilakukan oleh Pemda. Para pengelola belum memikirkan promosi melalui internet dimana cakupannya lebih luas. Karena promosi yang lebih mengandalkan bantuan dari pemda kabupaten maupun provinsi. Diakui bahwa antara yang dipromosikan dengan apa yang dialami turis sering terjadi perbedaan. Tentunya kalau hal ini dibiarkan akan merugikan desa wisata. Harusnya warga yang mengelola promosi desa wisata sehingga dapat mengatur kesesuaian antara yang dipromosikan dan yang disediakan.

E. Evaluasi

1. Sebutkan dasar hukum pendanaan wisata Candi Borobudur!
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat pada wisata Candi Borobudur!
3. Deskripsikan bagaimana model pengembangan desa wisata di kawasan wisata Candi Borobudur bagi kesejahteraan masyarakat sekitar!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Admosudirdjo, P. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus Sulastiyono. 2011. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Suryono, 2014. *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Transparansi*, Volume 6, Nomor 2, September.
- Alexander Abe, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta, Pembaruan.
- Aliyah dan Nahar. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. "Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8 / No . 2 / Mei
- Amalia Diamantina, *Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien*, MHH Jilid 39 No 1 Maret 2010
- Amran Hmzah. 2012. *Exploring the Issue Associated Wuth the Development, Management and Promotion of Islamic Tourism*. Universiti Teknologi Malaysia.
- Anggraeni, R. (2018). Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Badan Pengelola Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Di Kecamatan Borobudur. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran.
- Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- B. Biwoho, Ratna Pudjowati, yulia Himawati. 2010. *Pariwisata Citra dan Manfaatnya*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata. (B. Biwoho, 2010)
- Badan Pusat Statistik 2020. Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2019 [Online]. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1711/jumlah-kunjungan->

- wisman-keindonesia-desember-2019-mencapai-1-38-juta-kunjungan-.html. [Accessed 20 September 2020].
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Bahagijo, Sugeng, "Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia", *Jurnal Politika*, Vol.2, No.3, 2006.
- Balkondes Candirejo Magelang Sebagai Bentuk Pengembangan Desa Wisata yang Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 70–89. <https://doi.org/10.31002/jkkm.v3i1.1364>
- Baskoro, BRA& Cecep Rukendi. (2008). "Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas; Sebuah Kajian Teoritis". *Jurnal Kepariwisata Indonesia Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia*, Vol. 3 No I Maret, 5-7.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Breman Jan, dan Gunawan Wiradi. 2014. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20*. Jakarta: LP3ES.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- BUMN Bersinergi Membangun Balkondes Borobudur. *MediaIndonesia.Com*.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/259427-20-bumn-bersinergi-membangun-balkondes-borobudur> Hidayah, A. N., & Agustinah, R. (2019).
- Dadang Juliantara, *Arus Bawah demokrasi: Otonomi dan Pembangunan*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Umum, 2010
- Dadang Juliantara, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- Direktorat Jendral Pariwisata. 2016. *Kebijaksanaan Pariwisata Nasional*. Jakarta: Direktorat Jendral Pariwisata.
- Djohan, Djohermansyah, 2010. *Problematisasi Pemerintahan dan Politik Lokal* (Cet. Pertama), Jakarta, Bumi Aksara.
- Eddy Kiswanto, 2005. Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 9, Nomor 2, November.

- Edwin, G. (2015). Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata Dikecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3(1)
- Elviandri , Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, 2019. Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni
- F, Marbun, S., Mahfud MD, Moh., 2009. PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kelima, Jogjakarta; Liberty, Yogyakarta. Fahad Salim Bahammam. 2012. *Panduan Wisatawan Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Firman Freaddy Busroh, 2016, Teknik PerundangUndangan, Jakarta: Cintya Press. Hans Nawiaskey, 1984,
- Firmasyah, M. (2019). Desa Wisata Dorong Kenaikan Pendapatan Daerah. Radarsurabaya.Jawapos.Com. <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/06/15/141472/desa-wisatadorong-kenaikan-pendapatan-daerah>
- Frinces, Z.H. 2017. *Manajemen Strategik: Resep Daya Saing dan Unggul*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Gamal Suwanto. 2014. *Perencanaan Produk Pariwisata*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata.
- Gamal Suwanto. 2017. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Gomes, Faustino Cardoso. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Gratner, William C. 2016. *Tourism Development; Principles, Processes, Yogyakarta: Andi. and Policies. New York: Van Nostrand Reinhold.*
- H. Kodhyat. 2016. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Graha Ilmu.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara (Green Mind Community), Cetakan I, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Hapsarai, D. O., & Rahayu, S. (2018). Pengelolaan Balai Ekonomi Desa dalam Mengembangkan Pariwisata di Kawasan Candi Borobudur. In Adinegara (Vol. 7, Issue 6). Hemawati, R. (2019). 20

- Hendry Simamora. 2010. *Manajemen Pemasaran Internasional (cetakan pertama)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Heng, T.M, dan Low L. 2010. *Economic Impact of Tourism in Singapore*. Annals of Tourism research, 17, 246-269, Management.
- Hikmat, H. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora. <https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2937/pemerintah-dorongterbentuknya-desa-wisata>
- I Gde Pitana, dan I Ketut Surya Diarta. 2019. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- I Gde Pitana, dan Putu G. Gayatri. 2015. *Sosiologi Pariwisata; Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- I Gusti Bagus Rai Utama, dan Ni Made eka Mahadewi. 2012. *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- I Gusti Ngurah Gorda. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- lin Meriza, 2018. Pengawasan (*Controlling*) Dalam Institusi Pendidikan At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Volume 10, No. 1, Juni
- Imawan, Riswandha, Dampak Pembangunan Nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah, Laporan penelitian. Yogyakarta, PAU Studi Sosial UGM, 199
- Indra, Muh. Ridwan, 2007. Kedudukan Lembaga lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut Uud 1945, Sinar Grafika, Jakarta,
- International Tiscali Encyclopaedia (on-line), "welfare state", <http://www.tiscali.co.uk/reference/welfarestate>, diakses 27 Juni 2016. [http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library/files/Norway_Constitution_1814_\(as%20amended\)_en.pdf](http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library/files/Norway_Constitution_1814_(as%20amended)_en.pdf).
- Internet Indonesia dan Negara Kesejahteraan, <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negarakesejahteraan>.
- Iwan Triyuwono. 2010. *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Lkis.
- Izatul Yussuf, Azizi Bahauddin, dan Badaruddin Mohamed. 2012. *Tourist Evaluation on The Food Experience In Tourism: Case Study In*

- Terengganu*. Paper Sustainable Tourism Research Cluster, Universiti Sains Malaysia.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*, Einsiedeln: Benziger.
- Kantaprawira Rusadi, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kemendes, 2019. *Pemerintah Dorong Terbentuknya Desa Wisata*. Kemendes.Go.Id.
- Kemenpar, 2018. "Balai Ekonomi Desa Dukung Pariwisata di Area Borobudur". dalam https://www.cnnindonesia.com/gay_a-hidup/20180910155730-269-329201/balai-ekonomi-desadukung-pariwisata-di-area-borobudur diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 11:30.
- Lupiyoadi, R 2016. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manahati Zebua. 2014. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata di Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba.
- Manan, Bagir, 2009. Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta.
- Marbun, SF., 2011. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UIIPress.
- Mardisano, 2002. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Penerbit Andi Yogyakarta
- Marilang, 2012. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni, Marilang,
2010. "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual*, Edisi Khusus, Juni,
- Marpaung, H, dan Bahar, H. 2012. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Maschab, Mashuri, 2012. *Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas UGM.
- MD, Moh.Mahfud, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mill, R.C dan Morrison A.M. 2018. *The tourism System*. Kendal Hunt Publishing Company
- Miriam, Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Muh Arfin M. Salim. 2019. *Pariwisata Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Kepariwisata, Volume 01 Nomor 2 Februari Akademi Pariwisata Makasar.
- Muhammad Arief Satrio, 2021 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pariwisata Mandalika Melalui Kerangka Branding 'Wonderful Indonesia', *Indonesian Perspective*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2021)
- Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora Tambun, 2020. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech), *PATIK : JURNAL HUKUM* Vol : 09 No. 3, Desember
- Nazir, M. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Ndraha, Talizuduhu, 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : BumiAksara
- Nurlelawati, 2019. Diplomasi Budaya Indonesia Melalui Nation Branding Wonderful Indonesia Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Mandalika 2011-2017. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, 7, pp. 1-12.
- Oka. A Yoeti, 2012. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa Offset.
- Oka. A Yoeti, 2013. *Tours and Travel Marketing*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Panjaitan, Marojohan S., "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 01, 2012.
- Pedrana, Margherita. (2013) "*Local Economic Development Policies and Tourism. An Approach to Sustainability and Culture. Regional Science Inquiry*". *Journal European University of Rome*. Volume 1 No 2.
- Pranowo, M. Bambang. 2018. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Pratikno, 2011. *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fak. Sospol UGM.
- Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL). 2011. *Menuju Desa 2030*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Rabiatul Adawiyah, W., Praptapa, A., & Mafudi, 2017. Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (*Community*

- Based Rural Tourism*) Di Desa Papringan. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper.
- Radjasa Mu'tasim, Timbul Haryono, dan Sunardi. 2013. *Agama dan Pariwisata; Telaah Atas Trasformasi Keagamaan Komunitas Muhammadiyah Borobudur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rama Yudha, Prihadi Nugroho. (2017). "Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat Sebagai Dampak Pengembangan Pariwisata Alam Perdesaan: Studi Kasus Pemandu Wisata Air Terjun Nyarai Kecamatan Lubuk Alung, Provinsi Sumatera Barat". *Journal of Science and Applicative Technology - Institut Teknologi Sumatera*.
- Ramaini. 2012. *Gegrafi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Rani Maswati, 2018. Fungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, Jurnal "Gema Kampus" Edisi Vol.13 No.1 2018
- Ratih Sari, Suzanna, 2013. *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Richer, L.K, 1989. *The Politics of Tourism in ASIA*. Honolulu, Hawaii: The University of Hawaii Press.
- Ridwan, M, 2012. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT.Sofmedia.
- Rismiati, C.E, dan I.B Suratno, 2011. *Pemasaran Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Risnain, Muh., "Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan", Jurnal RechtsVinding, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Riwu Kaho, Josef, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*(Cetakan ke-4),PT.RajaGrafindo Persada.
- Riyanto Sofyan. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Buku Republika.
- Rossi, Ino. 1974. *The Unconscious in Culture; The Structuralism of Claude Levi Strauss in Perspective*. New York: E.P Dutton & Co.
- Sari, Suzanna Ratih, 2014. *Peranan Pariwisata dalam Pembangunan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Siagian, Sondang, P, 2006 *Teori dan Kepemimpinan*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta
- Siagian, Sondang, P, 2006, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* Penerbit Gunung Agung, Jakarta
- Sihite, Richard. 2000. *Hotel Management*. Surabaya: SIC.
- Soekadijo, R.G. 2017. *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai System Linkage*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Soekadijo. 2017. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage")*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru) Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Spillane, James, J. 2014. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta:Penerbit Kanisius.
- Spillane, James. 2013. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah, dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James. 2014. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supranto, J. 1997. *Metode Riset; Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardin, Yohanes 2007."Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 3,
- Sujanto, 2010. *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, edisi revisi, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Susetyo Prabowohadi, 2013. *Teknik Memandu Wisata*. Yogyakarta: Ria.
- Terry, George R, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- The Constitution Of Japan, http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesahtraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Wahab, S, 2012. *Manajemen Kepariwisataaan*. Frans Gromang (Penerjemah). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahab, S, dan C, Cooper, 2011. *Tourism In The Age of Globalization*. London: Routledge.
- Wardiyanta, 2016. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yoyakarta: Andi Yogyakarta

- Widiastutie, Sophiana, 2006. "Profil Negara Eropa Negaranegara Nordic (The Nordic Countries)", Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. II, No. 3.
- Wijaya, H. A. W, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo
- Wiratama, H. D, 2017. *Diplomasi Pariwisata Sebagai Nation Branding Indonesia Di Tingkat Global*. Sidoarjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- World Tourism Organization, 2012. *Tourism in the Age of Alliance, Mergers, and Acquisition*. Madrid: The World Tourism Organization.
- Zaini, Naya Amin, 2016. "Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)", Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, No.2.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum lahir di Purwokerto 3 Oktober 1967. Menyelesaikan pendidikan, S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1990), S2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (1999) dan S3 dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2017), merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2019-2023). Beberapa jabatan telah diemban sebelumnya di lingkungan universitas, antara lain Kepala Perpustakaan (2006 -2010), Anggota Pusat Kajian Konstitusi dan Kemitraan Daerah (2006-sekarang), Kepala Laboratorium Pengganti Antar Waktu FH (2008-2012), Kepala UPT (2011-2012), Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (2017-2021) .

Disamping itu, beberapa jabatan di luar Universitas, yaitu Anggota MPD Kota/Kabupaten Magelang (2006-2009, 2012-2015, 2019-2022), Ketua Forum Komunikasi Pengelola Perpustakaan Kota Magelang (2008-2012), Anggota APPTHI, Anggota APSIHI, Pengurus Wilayah Jateng APHTN-HAN (2017-2022), Pengurus MAHUTAMA (2018-2022), Pengurus Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Magelang (2021-2022), Pengurus ICMI Magelang (2021-2026). Ketua Penerima Hibah DRPM-PDUPT (2018 dan 2019). Karya buku: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik (2016), Model Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (2020)



Dakum, S.H.I, M.H. lahir di Cilacap, 05 Agustus 1986. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), Strata Dua (S2) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018). Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain; Kepala Laboratorium Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang (2021-sekarang), Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota dan Kabupaten Magelang (2021-sekarang), Section Editor Jurnal Asy-Syirah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-2019), Anggota Gugus Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembina Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2021-sekarang), Anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (2019-sekarang), dan Anggota Tim Pengembang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2022). Anggota Tim Reformasi Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang (2021-sekarang). Publikasi tahun (2019-2022) terdiri dari 10 Jurnal Nasional dan 1 Prosiding Internasional.



Dr. Wafda vivid izziyana, S.H., M.H lahir di Grobogan 24 Januari 1989. Menyelesaikan pendidikan, S1 FH Universitas Islam Sultan Agung (2010), S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014) dan S3 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019), saat ini merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Beberapa jabatan telah diemban sebelumnya antara lain Ketua Program studi FH UM Ponorogo (periode 2014 -2017), (periode 2017 -2020) , Ketua team taskforce Akreditasi Prodi Ilmu Hukum UM Ponorogo (2016 & 2019), Pengurus Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik UM Ponorogo (2017-2019), Anggota APPTHI (2015-2018), Anggota APSIHI, Pengurus Wilayah Jawa Timur APHTN-HAN (2016-2018), Pengurus Majelis Hukum dan HAM PDM Ponorogo (2016-2020). Ketua Majelis Hukum dan HAM Ranting Khusus Aisiyah Ponorogo (2016-2020), Team Pakar Raperda DPRD Ponorogo (2017-2020). Team Pakar Raperda DPRD Demak (2022).

Publikasi 5 Tahun terakhir; 15 Jurnal Internasional ,5 Prosiding Internasional, 25 Jurnal nasional, 3 prosiding Nasional, 1 Haki dan 5 buku